

# **MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL**

**(Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi  
Aceh dan Propinsi Lampung)**

Oleh:

**Prof. Dr. H. Faisal  
Dr. Asriani  
Dr. Erina Pane**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M)  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menemukan satu model kebijakan bagi pengembangan wisata syariah atau wisata halal. Dengan kata lain penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menghadirkan argumentasi dan justifikasi akademis terhadap pentingnya melakukan perubahan pada model kebijakan pariwisata konvensional di daerah berdasarkan hukum, realita sosial, ekonomi, budaya dan politik, yang semata-mata ditujukan agar perubahan terhadap model kebijakan ini selanjutnya mampu menghadirkan wisata dalam perspektif yang berbeda, secara holistik serta dilandasi dasar hukum yang komprehensif. Di samping itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar kedepannya dapat dikembangkan model kebijakan yang harmonis dengan kebijakan-kebijakan lain di daerah.

Terselesainya penelitian ini merupakan keberhasilan berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak dengan memberikan berbagai masukan, saran dan kritik serta data yang dibutuhkan, karenanya, menjadi etika ilmiah untuk memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak tersebut, termasuk setiap

individu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pada tempatnya pula puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan terselesaikannya penelitian ini. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi penelitian inspiratif bagi penelitian selanjutnya dan membawa kemanfaatan.

Bandar Lampung, Desember 2018

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	7
	C. Batasan Masalah Penelitian	10
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Manfaat Penelitian	11
	F. Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	A. Pengertian Pariwisata	13
	B. Industri Pariwisata	40
	C. Prasarana dan Sarana Pariwisata	42
	D. Jenis Usaha Jasa dan Usaha Sarana Wisata	45
	E. Definisi Wisata Syariah	54
	F. Kondisi Wisata Syariah Dunia	58
	G. Kebijakan Publik	70
	H. Penelitian Terdahulu	73
BAB III	METODE PENELITIAN	80
	A. Pendekatan Masalah	80
	B. Jenis dan Sumber Data	80
	C. Prosedur Pengumpulan Data	81
	D. Prosedur Pengolahan Data	81
	E. Analisis Data	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN	83

	A. Propinsi Nusa Tenggara Barat	83
	B. Propinsi Aceh	
	C. Propinsi Lampung	89
		129
BAB V	PEMBAHASAN	157
	A. Pola Umum Kebijakan Wisata di Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung	157
	B. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	175
	C. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Aceh	181
	D. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Lampung	185
BAB VI	PENUTUP	194
	A. Kesimpulan	194
	B. Saran	195

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fesyen, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim, nilai Islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup Islami, pertumbuhan transaksi perdagangan antara negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), partisipasi perusahaan multinasional, teknologi dan keterhubungan/konektivitas antar negara.

Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk *lifestyle* (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan). Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan *hanyasightseeing*) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*).

Trendwisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly Travel Destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain. Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Label wisata syariah di Indonesia sendiri kurang mendapat persetujuan dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya (2015) karena dinilai terkesan eksklusif dan pelarangan berbasis agama tertentu. Sedangkan penggunaan istilah lain seperti *Islamic tourism* (wisata islam), *halal tourism* (wisata halal), wisata keluarga dan religi juga dinilai belum sesuai. Pada suatu forum diskusi berkelompok dengan tema *Halal Tourism dan Lifestyle 2015* yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di NTB, nama "wisata syariah" menurut Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya (2015), dinilai tidak terlalu menjual di pasar wisata Indonesia. Nama yang sempat ditawarkan oleh Menteri Pariwisata adalah *universal tourism* (UT), karena di

dalamnya melekat ketentuan dan nilai-nilai syariah dalam muatan paket dan kemasan wisata syariah sehingga bisa digunakan oleh wisatawan lain selain wisatawan muslim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah satu anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Sapta Nirwandar, bahwa penggunaan *branding* wisata syariah masih *debatable* dan penggunaannya kerap diidentikkan dengan radikalisme. Sehingga perlu adanya perumusan konsep *branding* yang tepat untuk pengembangan jenis wisata syariah di Indonesia.

Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata jiarah dan religi (*pilgrims tourism/spiritual tourism*). Dimana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh *World Tourism Organization* (UNWTO) dengan judul "*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*" (UNWTO, 2011). Wisata jiarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jenis wisata jiarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk baru nilainilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagimasyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal yangmustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedangberkembang di arena pariwisata dunia.

Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilai cukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negaranegara Timur Tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki *disposable income* yang besar. Menurut *Pew Research Center* (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 23 persen jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen penduduk dunia (*Worldaffairsjournal*, 2015). Dan diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia.

Potensi pasar muslim dunia memang sangat menggiurkan bagi pelaku usaha bisnis pariwisata. Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam *Global Islamic Economy Report 2014–2015*, total pengeluaran muslim dunia pada tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai US\$1,292 miliar atau sebesar 10,8 persen dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akan mencapai US\$2,537 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman global pada 2019. Di sektor perjalanan, pada tahun 2013 umat muslim dunia menghabiskan sekitar US\$140 miliar untuk berwisata atau sekitar 7,7 persen dari pengeluaran global. Diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi US\$238 miliar atau 11,6 persenpengeluaran global sektor perjalanan di tahun 2019 (di luar perjalanan haji dan umrah). Di sektor media dan rekreasi, muslim dunia menghabiskan sekitar US\$185 miliar atau 7,3 persen pengeluaran global pada tahun 2013

dan diperkirakan mencapai US\$301 miliar pada 2019 atau sekitar 5,2 persen dari pengeluaran global (Reuters & DinarStandard, 2014).

Studi yang sama juga dilakukan oleh MasterCard dan CrescentRating (2015) dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015, bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim yang merepresentasikan 10 persen dari keseluruhan industri wisata dan segmen ini memiliki nilai pengeluaran sebesar US\$145 miliar. Diperkirakan pada tahun 2020 angka wisatawan muslim akan meningkat menjadi 150 juta wisatawan dan mewakili 11 persen segmen industri yang diramalkan dengan pengeluaran menjadi sebesar US\$200 miliar. Berikut ini adalah 10 besar negara tujuan wisatawan muslim:

Tabel 1. Sepuluh Besar Negara Tujuan *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) dan Non-OIC dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015

Peringkat	Destinasi OIC	Skor	Destinasi Non-OIC	Skor
1	Malaysia (1)	83,8	Singapura (9)	65,1
2	Turki (2)	73,8	Thailand (20)	59,2
3	UEA (3)	72,1	Inggris (25)	55,0
4	Saudi Arabia (4)	71,3	Afrika Selatan (30)	51,1
5	Qatar (5)	68,2	Perancis (31)	48,2
6	Indonesia (6)	67,5	Belgia (32)	47,5
7	Oman (7)	66,7	Hongkong (33)	47,5
8	Jordania (8)	66,4	Amerika Serikat (34)	47,3
9	Moroko (9)	64,4	Spanyol (35)	46,5
10	Brunei (10)	64,3	Taiwan (36)	46,2

Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015

Berdasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015 dalam kelompok destinasi *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), Indonesia (skor indeks 67,5) menempati peringkat ke-enam setelah Qatar (skor indeks 68,2), Arab Saudi (skor indeks 71,3), Uni Emirat Arab/UEA (skor indeks 72,1), Turki (skor indeks 73,8), dan Malaysia (skor indeks 83,8). Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OIC, dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya. Studi GMTI menganalisis data lengkap yang meliputi 100 destinasi dengan hasil rata-rata berdasarkan sembilan kriteria seperti kecocokan sebagai destinasi liburan keluarga dan keamanan (kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburan keluarga, perjalanan yang aman), ketersediaan layanan dan fasilitas *muslim friendly* di destinasi wisata (makanan halal, kemudahan akses untuk beribadah, layanan dan fasilitas bandara, pilihan akomodasi), *Halal awareness* (mengutamakan kehalalan, kemudahan komunikasi)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan industri pariwisata syariah bukanlah suatu ancaman bagi industri pariwisata yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan tidak menghambat kemajuan



usaha wisata yang sudah berjalan. Bahkan sejumlah negara-negara di dunia telah menggarap industri pariwisata syariah. Sebagai contoh di Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan China sudah terlebih dahulu mengembangkan pariwisata syariah. Thailand memiliki *The Halal Science Center Chulalongkorn University*, pusat riset itu bekerja sama dengan Pemerintah Thailand dan keagamaan membuat sertifikasi dan standardisasi untuk industri yang dilakukan secara transparan, bahkan pembiayaannya tertera jelas dan transparan. Australia melalui Lembaga *Queensland Tourism* mengeluarkan program pariwisata syariah pada bulan Agustus 2012 melalui kerjasama dengan hotel-hotel ternama mengadakan buka puasa bersama, menyediakan tempat sholat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat perbelanjaan, memberikan petunjuk arah kiblat dan Alquran di kamar hotel, hingga menyediakan petugas di *Visitor's Information Offices* yang mampu berbahasa Arab. Korea Selatan melalui Perwakilan Organisasi Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) mengakui siap menjadi destinasi wisata syariah dengan menyediakan paket wisata bagi Muslim dan fasilitas yang mendukung. Demikian pula Jerman menyediakan tempat shalat yang bersih dan nyaman di Terminal 1 Bandara Munich, Jerman sejak bulan Juni 2011 (Sofyan, 2012:13-19).

Bagaimana dengan kondisi industri pariwisata syariah di Indonesia? Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal. Padahal jika digarap lebih serius, potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar. Belum banyak biro perjalanan yang mengemas perjalanan *inbound* dengan paket halal travel, tetapi lebih banyak pengemasan perjalanan *outbound* seperti umrah dan haji. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata, angka wisatawan dari beberapa negeri Timur Tengah berdasarkan kebangsaan, yaitu Bahrain sebesar 98 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014 (naik 1,02 persen), Mesir sebesar 675 orang pada tahun 2013 menjadi 733 orang pada tahun 2014 (naik 8,59 persen), dan Uni Emirat Arab sebesar 1.322 orang menjadi 1.428 orang (naik 8,02 persen), sedangkan Arab Saudi mencatat angka pertumbuhan turun 3,90 persen dari 7.522 orang (tahun 2013) menjadi 7.229 orang tahun 2014 (Kempar, 2015). Jika dilihat dari angka jumlah kunjungan wisman muslim memang dinilai cukup kecil. Namun, target wisata syariah sebenarnya bukan hanya wisatawan muslim, tetapi juga wisatawan non muslim. Karena pada hakekatnya wisata syariah hanyalah sebagai pelengkap jenis wisata konvensional.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air. Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata syariah meliputi empat jenis komponen usaha pariwisata, yaitu perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, dan spa. Terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang dipersiapkan Indonesia untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (IndonesiaTravel, 2013). Wilayah tujuan wisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya

manusia, budaya masyarakat, produk wisata daerah, serta akomodasi wisata. Pada dasarnya pengembangan wisata syariah bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama seperti wisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Contohnya adalah menyediakan tempat ibadah nyaman seperti sudah dilakukan di Thailand dan negara lainnya yang telah menerapkan konsep tersebut terlebih dahulu. Potensi wisata syariah di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alternatif selain wisata konvensional, hanya saja *branding* dan pengemasannya masih belum memiliki konsep yang tepat.

## B. Identifikasi Masalah

Tujuan diadakannya pengembangan wisata syariah adalah untuk menarik wisatawan muslim maupun non-muslim, dan wisatawan dalam maupun luar negeri. Bagi Indonesia sendiri, dimaksudkan juga untuk mendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis syariah di lingkungan pariwisata Indonesia. Di Indonesia masih belum jelas *branding* dan nomenklatur tentang wisata syariah ini. Apakah menggunakan nama *syariah travel*, *Islamic tourism*, *halal travel*, *muslim friendly destination* atau sebagainya? Semua itu masih dalam tahap diskusi pembahasan antara Kementerian Pariwisata dan pelaku pariwisata. Meski *branding* tersebut belum final, bukan berarti usaha untuk industri ini belum dapat dijalankan. Adapun salah satu langkah nyata dalam usaha mengembangkan pariwisata syariah adalah dengan merancang produk dan daerah tujuan pariwisata

syariah. Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami yang di dalamnya terdapat produk makanan halal, minuman non-alkohol, hotel halal, ketersediaan sarana ibadah yang bersih, aman, dan nyaman, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Meskipun nomenklatur pengembangan wisata syariah belum jelas.

Namun, dalam usaha pengembangannya, Kemenparekraf menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Dan pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam Permen tersebut berisikan kriteria hotel syariah dengan kategori Hilal 1 dan Hilal 2 yang dinilai dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah, misalnya, dalam hotel ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah sehingga harus ada toilet *shower* bukan hanya tissue, makanan halal, tapi tidak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja, minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti *wine*. Sedangkan dalam hotel

Hilal 2, segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam hotel syariah ini. Untuk klasifikasi hotel syariah hilal satu minimal memenuhi 49 poin ketentuan, untuk naik ke level hilal dua harus memenuhi 74 poin. Seperti diketahui bahwa destinasi wisata di Indonesia sangatlah banyak dan tidak hanya terbatas pada ketiga belas destinasi wisata syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian perlu kiranya mengeksplor potensi pengembangan wisata syariah di daerah lain di Indonesia. Namun, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum maksimal digarap jika dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan konsep Tiga Great yang diusung oleh Kementerian Pariwisata, maka dari 13 daerah destinasi itu akan dibagi dengan tiga pintu masuk utama yakni Jakarta, Bali, dan Batam. Wisman dapat menjangkau daerah sekitar yang menjadi destinasi wisata syariah. Melalui Jakarta, wisman dapat juga mengakses destinasi di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Melalui Bali dapat mengakses Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di Batam lebih diarahkan ke Sumatera Barat. Tetapi, dilihat secara keseluruhan, daerah yang baru komitmen dan benar-benar menyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Lampung memasang target wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Lampung sebesar 1,8 juta orang pada tahun 2015 dan target tahun 2018 sebesar 2,8 juta orang. Angka itu naik 30 persen dari tahun 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kunjungan ke Lampung terus naik. Misalnya, pada 2014, kunjungan wisatawan ke Lampung berjumlah 1,4 juta orang, 50.072 di antaranya turis mancanegara. Sedangkan pada 2013, kunjungan ke Lampung hanya 1,1 juta orang (BPS Lampung, 2018). Bahkan Pemkot Bandar Lampung telah meluncurkan *branding* pariwisatanya yaitu *World Islamic Tourism* yaitu pada tanggal 31 Maret 2015 (BPS Lampung, 2018).

Beberapa hal masih menjadi kendala dalam menerapkan wisata syariah yang perlu dibenahi, salah satu diantaranya aspek sertifikasi produk-produk halal. Di Indonesia, restoran dan kafe yang menyediakan makanan dan minuman halal masih baru dalam tataran *self claim*, belum bersertifikat. Jumlah restoran dan hotel yang menjamin makanannya halal masih jarang. Banyak yang menyarankan agar di dapur hotel ada pemisahan antara makanan halal dan non-halal. Demikian pula masih ada beberapa fasilitas yang harus dibenahi untuk memastikan Indonesia siap untuk menyambut wisatawan mancanegara muslim. Masalah air pun tak luput diperhatikan. Saat ini, terutama di hotel dan pusat perbelanjaan mewah, toiletnya sudah banyak mengadaptasi gaya barat. Bahkan terkadang di toilet, hanya tersedia kertas tisu, tanpa air mengalir. Padahal, air mengalir benar-benar penting, terutama untuk bersuci.

Industri pariwisata syariah Indonesia juga harus didukung oleh pemerintah, industri dan strategi pemasaran yang baik, standar dan regulasi yang tepat harus diperkuat oleh tenaga profesional keuangan yang cukup, lembaga pelatihan kepariwisataan syariah yang baik kemudian didukung oleh keuangan syariah yang kompetitif. Menurut pendiri dan CEO Crescentrating, Fazal Bahardeen, Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti Negara tetangga Malaysia dan Thailand (Murdaningsih &

Pratiwi, 2015). Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi wisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung?
2. Bagaimanakah model kebijakan strategis untuk mengembangkan wisata syariah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung?

### **C. Batasan Masalah Penelitian**

Mengingat luasnya ruang lingkup wisata syariah, maka penelitian ini dibatasi dengan memfokuskan analisis potensi pengembangan wisata syariah di destinasi wisata Propinsi Lampung, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Propinsi Aceh, dengan tanpa menghilangkan autentik dan keunikannya. Beberapa variabel dan indikator menggunakan kombinasi sembilan aspek kesiapan destinasi wisata syariah yang dikembangkan oleh Crescent Rating dalam studi GMTI dan studi dari Riyanto (2012) dalam bukunya berjudul Prospek Bisnis Wisata Syariah. Studi ini akan diukur pula kesiapan destinasi wisata Propinsi Lampung berdasarkan observasi, sehingga dengan menggabungkan potensi dan tingkat kesiapan destinasi diharapkan dapat menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata syariah berdasarkan karakteristik daerah. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara survei menggunakan kuesioner pada pemangku kepentingan di Lampung.

Selain itu penelitian ini menggunakan FGD dan studi literatur sebagai data tambahan/pelengkap data primer. Adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka kurun waktu pengamatan dibatasi selama 3 hari di Nusa Tenggara Barat, 3 hari di Banda Aceh dan selebihnya penelitian di Lampung. Penelitian dilakukan terhadap pemangku kepentingan di Lampung. Lampung dipilih sebagai salah satu lokus penelitian karena Lampung berpotensi mengembangkan wisata syariah. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai pembandingan karena Nusa Tenggara Barat sudah menerapkan wisata syariah dalam produk wisatanya. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan strategi apa yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis potensi wisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung?
- b. Menghasilkan model kebijakan strategis untuk mengembangkan wisata syariah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung sehingga mampu mengembangkan destinasi wisata syariah yang berdayasaing dan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata syariah, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam penerapannya mendapat banyak hambatan terutama yang berkaitan dengan kajian pengembangan wisata syariah di Propinsi Lampung. Keluaran dari kegiatan ini berupa hasil penelitian yang mampu memberikan solusi terhadap pengembangan kebijakan pengembangan wisata syariah di Propinsi Lampung. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Propinsi Lampung, Lombok Nusa Tenggara Barat dan Banda Aceh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada responden dan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber yang dianggap memahami mengenai perkembangan wisata syariah di Propinsi Lampung, Lombok Nusa Tenggara Barat dan Banda Aceh dipilih sebagai perbandingan pengembangan wisata syariah.

Beberapa tahapan dan waktu pelaksanaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- (a) Tahap persiapan, yakni meliputi penyusunan rancangan kegiatan, koordinasi dan penyiapan instrumen penelitian.
- (b) Pelaksanaan penelitian, meliputi penyiapan logistik kegiatan, penyiapan tempat FGD, koordinasi dengan informan dan narasumber di Lombok Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung. Wawancara dan observasi juga dilakukan guna melengkapi data dan informasi penelitian.
- (c) Evaluasi dan pelaporan kegiatan, yakni melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan tertentu dengan metode diskusi dengan pihak-pihak terkait.
- (d) Pelaporan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Wisata agama dan motivasi rohani telah menyebar luas dan menjadi populer dalam beberapa dekade terakhir, menempati segmen penting dari pariwisata internasional dan telah tumbuh secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Wisata religimenjadisalahsatu bentuk pariwisata yang kurang dipelajari dalam penelitian pariwisata (Timothy & Olsen, 2006:1). Pertumbuhan yang konsisten disegmen pasar ini telah menjaditren global dalam industri pariwisata. Trend perjalanan keagamaan tidak dianggap sebagai fenomena baru. Untuk melakukan perjalanan, wisata religitelah lama menjadimotif integral dan biasanya dianggap sebagai bentuk tertua dari perjalanan ekonomi. Setiap tahun jutaan orang melakukan perjalanan ketujuan ziarah utama diseluruh dunia. Diperkirakan bahwa hampir 240 juta orang pertahun pergi berziarah, sebagian menjadi Kristen, Muslim dan Hindu. Wisata religimenjadi identik dengan pertumbuhan pariwisata pada masa modern.

Agama memainkan peran penting dalam pengembangan wisata selama berabad-abad dan telah mempengaruhi bagaimana orang memanfaatkan waktu luang. Timothy & Olsen (2006:9) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah wisatawan dengan motivasi agama jugatelah menarik perhatian akademisi, pemerintah dan lembaga pariwisata untuk mengembangkan pariwisata. Studi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama bagi sejumlah besar wisatawan agama terkait dengan kunjungan pada situs dari kitab, al-Quran atau teks-teks suci lain, atau dengan adanya spiritualisme, seperti mukjizat dan wahyu.

Ada variabel hubungan antar lembaga-lembaga agama dan pariwisata. Di satu sisi, wisata religidapat diidentifikasi sebagai jenis tertentu pariwisata yang termotivasi baik sebagian atau secara eksklusif untuk alasan agama (Rinschede, 1992). Sigaux (1996) dan Vukonic (1996) menerangkan bahwa wisata religimenjadi salah satu bentuk tertua dari pariwisata, dengan adanya migrasi manusia yang terkait dengan agama sejak masa-masa awal. Hal ini diwujudkan dalam keragaman aktivitas wisata-religius, dari perjalanan jangka panjang (yaitu ziarah) ke dan/atau tetap di pusat-pusat agama untuk melihat dari jarak dekat ke pusat-pusat keagamaan atau situs untuk tujuan perayaan agama, kontemplasi atau musyawarah. Dalam kasus yang pertama, seluruh perjalanan wisata mungkin memiliki tujuan agama, sedangkan kasusterakhir, kunjungan ke tempat keagamaan memiliki unsur multifungsiberupa sekedar perjalanan wisata.

Disisilain, pariwisata dapat dianggap identik sebagai agama. Dalam masyarakat sekuler modern, tidak hanya bebas memiliki (yaitu diskresi atau non-kerja) waktu secara

umum menjadiruang untuk kontemplatif dan kreatif, kesatuan pemikir dan tindakan (Vukonic, 1996), kesempatan bagi manusia untuk mengenali dan mengembangkan kebutuhan rohani mereka, tetapi juga pariwisata, sebagai penggunaan tertentu seperti waktu luang, telah datang untuk dilihat oleh sebagian orang sebagai perbuatan spiritual atau perjalanan suci.

Graburn (1983) mengamati bahwa pariwisata secara fungsional dan simbolis setara dengan lembaga lain yang digunakan manusia untuk memperindah dan menambahkan arti bagi kehidupan mereka; bisa dimengerti baik sebagai ritual sekuler biasa (liburan tahunan) yang berperan sebagai refleksi dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja, atau sebagai bagian ritual yang lebih spesifik atau transisi pribadi (Nash, 1996) yang dilakukan di persimpangan tertentu dalam hidup masyarakat hidup (Graburn, 1998). Dalam kedua kasus, bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa pariwisata dalam bentuknya yang modern setara dengan kunjungan dan ziarah yang ditemukan pada masyarakat tradisional, masyarakat yang takut kepada Allah (Graburn, 2001:43).

Hubungan bervariasi antara pariwisata dan agama dapat dikonseptualisasikan sebagai kontinum berdasarkan tingkat intensitas motivasi keagamaan yang melekat, sebagaimana dinyatakan Smith (1989) sebagai pencarian sesuatu. Pada satu sisi yang ekstrem terdapat bentuk ziarah yang bersifat suci, sebuah perjalanan yang didorong oleh iman, agama dan pemenuhan spiritual; sedangkan pada sisi lain terdapat wisatawan yang mungkin berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kebutuhan rohani melalui pariwisata. Pada dua sisi ini dapat ditemukan perbedaan bentuk atau intensitas wisata religi yang termotivasi dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dengan agama atau, sebaliknya, berbasis kebutuhan budaya atau pengetahuan. Seperti ditegaskan Smith (1992) bahwa, beberapa wisatawan mungkin berperan sebagai peziarah agama, sedangkan yang lain mungkin sebagai wisatawan dari haji.

Namun, meskipun ada hubungan antara pariwisata dan agama, terutama dalam konteks historis, perhatian atas studi ini relatif sedikit yang telah memberikan kontribusi kepada subjek dalam literatur pariwisata. Lebih khusus, meskipun keberadaan manusia, seperti dikatakan Vukonic (1996) disebut sebagai *homo turisticus religiosus*, atau wisata religi telah diterima secara luas dan dibahas ampaibatas tertentu pada literatur pariwisata, baik dalam konteks konsumsi (Vukonic, 1996; Smith, 1992; Franklin, 2003) dan penawaran (Shackley, 2001).

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan budaya memiliki peninggalan sejarah dan tradisi yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek keagamaan dan praktik religimasyarakat. Warisan budaya dan agama dan

keragaman suku, etnis, bahasa, dan adat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata. Secara khusus, umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentu memiliki keunikan yang menjadi ciri khas bangsa dengan destinasi pariwisata yang ada, seperti keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, sampai kuliner yang dimilikinya (Jaelani, Setyawan, & Hasyim, 2016). Polarisasi budaya dan praktik keagamaan muslim menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi negeri ini yang kemudian dikenal dengan wisata religi. Istilah wisata religi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam global, kemudian berubah menjadi istilah wisata syari'ah dan beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran istilah lagi menjadi wisata halal. Kedua istilah ini (wisata syari'ah dan wisata halal) akan digunakan secara bersamaan dalam tulisan berikut karena memiliki substansi dan dimensi agama yang sama, atau istilah halal sebagai bagian dari 5 jenis hukum Islam (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) pada prinsipnya diturunkan dari istilah syari'ah (Jafari & Scott, 2014).

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global (lihat Samori, Salleh, & Khalid, 2016: 132). Dinamika pariwisata dunia dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai 1.110 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015 ditengah situasi global yang tidak kondusif, perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4,5%. Jadi, pariwisata tetap mengalami pertumbuhan signifikan.

Ekonomi global kembali meningkat pada 2016 sebagai faktor pendorong sektor pariwisata dari sisi permintaan. Indonesia juga mengalami peningkatan di dunia Pariwisata, dari 9,3 juta pada tahun 2014 menjadi 10,4 juta pada tahun 2015 (naik 2,9%), dan tahun 2016 mampu menembus angka 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat, dibawah Thailand, Malaysia, Singapura. Berdasarkan kewarganegaraan, Singapura, Malaysia dan Tiongkok adalah 3 kontributor wisatawan mancanegara terbesar. Sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (Bappenas, 2016).

Studi tentang wisata halal ini berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budayayang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual



masyarakat modern. Artinya, meskipun wisata halal ini termasuk bentuk pariwisata kontemporer sebagai fenomena modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Hal ini berbeda dengan masyarakat di Indonesia, praktik keagamaan bertujuan memenuhi kebutuhan spiritual, termasuk praktik ziarah di Cirebon (Jaelani, 2016a) sebagai bagian dari aspek pariwisata (Jafari & Scott, 2014), hal ini menjadi tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lama seiring dengan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia. Namun, konteks ini akan berbeda jika dikaitkan dengan bidang pariwisata sebagai bagian dari industri atau kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dan diproyeksikan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Jaelani, 2016b). Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

#### A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization* (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Pariwisata itu sendiri, secara sederhana sering diartikan sebagai perjalanan untuk bersenang-senang. Namun, secara etimologis kata "pariwisata" berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari tiga suku kata sebagai berikut: *Pari* : berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata *paripurna*) *Wis* (*man*) : berarti rumah, properti, kampung, komunitas. *Ata* : berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*). Berdasarkan pengertian di atas, "pariwisata" berarti bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Istilah pariwisata di Indonesia muncul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI).

Pengertian atau definisi "pariwisata" berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan,

perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.

Herman V. Schulz, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Austria memberikan batasan akan pengertian pariwisata sebagai berikut: *"Tourism is the entry, stay and movement of foreigners inside a certain country, city or region"*. Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan datangnya, menetapnya, dan Bergeraknyawisatawan dalam suatu kota, daerah atau negara. Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka sifatnya lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara tegas menunjukan aspek-aspek sosiologis, psikologis, seni-budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.

Pengertian yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf sebagai berikut: *"Tourism is the totality of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (Ortsfremde), provided the stay does not imply the establishment of a permanent resident"*. Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu perjalanan dan menetapnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, dimana hal tersebut tidak bersifat permanen dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang dilakukannya. Batas yang diberikan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf merupakan pengertian yang dapat diterima secara resmi oleh *The Association International des Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST)*. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara internasional, orang menyeberang perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 24 jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill dan Morrison, 1998:2).

Definisi WTO (*World Tourism Organisation*) tentang pariwisata sekarang ini menjadi salah satu yang paling banyak diterima di seluruh dunia. Chadwick (1994:66) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan orang di luar lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi.

Pariwisata adalah konsep yang rumit mencakup berbagai pertimbangan sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Medic & Middleton (1973) menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada pariwisata. Buhalis (2000: 98) meyakini bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab I disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Dalam pandangan Islam, pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah. Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubungkan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesarnya yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112). Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an (lihat Q.S. al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70). Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasulullah dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebarkan seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantunya seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup (Jaelani, 2016).

Tidak hanya untuk keuntungan spiritual, tapi aktivitas perjalanan juga penting untuk keuntungan fisik. Pada sisi lain, promosi wisata atas dasar tujuan agama dan tempat bersejarah untuk wisatawan internasional bisa memperoleh tambahan pendapatan ke negara Muslim. Selain itu, Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menekankan untuk mengembangkan kegiatan wisata bagi negara-negara anggotanya. Semakin banyak wisatawan muslim dalam dunia Islam dapat menyebabkan pemahaman yang lebih baik, merangsang kolaborasi dan melayani kepentingan umum.

Gagasan tentang wisata religi itu sendiri muncul cukup kontroversial, tidak hanya dari sudut pandang otoritas keagamaan, tetapi juga dari sisi akademik dalam studi pariwisata. Dalam setiap kasus, keadaan ini tidak harus menggunakan pendekatan ilmiah dalam menjawab persoalan ini dengan beberapa cabang ilmu-ilmu sosial, di antaranya pengetahuan geografis dapat memberikan kontribusi yang spesifik, khususnya melalui dua perspektif berupageografi agama dan geografi

pariwisata. Sebaliknya, menjadi subjek dalam evolusi konstanta karena pola perilaku baru dan sikap terhadap agama, menjadi hampir wajib untuk memperjelas beberapa poin melalui upaya penelitian interdisipliner.

Pada saat ini muncul beberapa pertanyaan di bidang geografi, "mengapa dan atas dasar apa suatu ruang didefinisikan sebagai sakral; apa implikasi ini memiliki sebutan yang mungkin untuk penggunaan dan karakter daerah; bagaimana orang percaya menanggapi gagasan tempat suci, dan bagaimana tanggapan mereka (khususnya melalui ziarah) tercermin dalam arus geografis dan pola daerah" (Park & Yoon, 2009).

Tajzadeh Namin A.A. (2013) melakukan review tentang wisata syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an. Wisata syari'ah ini memiliki arti: *studying the life of the people of the past* (QS. 3:137); *studying the destiny of the people of the past* (QS. 30:42); *studying how prophets were raised* (QS. 16: 36); *studying the life of evil doers* (QS. 6:11); *thinking about the creation; thinking about what happened to wrong doers; visiting safe and prosperous towns* (QS. 34:11); *the Holy Quran calls people to travel and to learn lessons from what happened to the infidels and deniers of divine signs; in general, it can be said that traveling helps people achieve theoretical and practical explanations and to reaffirm their faiths in the resurrection day. Traveling helps people learn from the past and prevents tyranny and oppression; and travelling improves sight, hearing, and inner knowledge and rescue people from inactivity and inanimation.*

Selain bersumber dari al-Qur'an, wisata syari'ah atau wisata halal dapat ditelusuri pada tradisi Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan hadits. Beberapa hadits menunjukkan suatu kegiatan yang disebut dengan wisata sekarang ini. Sebagai contoh Ibrahim Abu Isma'il As-Saksaki mendeskripsikan bahwa "*Rasulullah saw reported to have said: I heard Abu Burda who accompanied Yazid bin Abi Kabsha on a journey. Yazid used to observe fasting on journeys. Abu Burda said to him, 'I heard Abu Musa several times saying that Allah's Apostle said, When a slave falls ill or travels, then he will get rewards similar to that he gets for good deeds practiced at home when in good health.'*" (Sahih Bukhari, Vol. 4, Book 52, Hadith 239).

Pada hadits lain, Teoman Duman (2011:5) mengutip sebuah hadits bahwa, "Prophet Muhammad (Peace be upon him- PBH) said *"The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he/she has intended."* (Sahih-AlBukhari, 2011). Sementara itu, Din (1989) menegaskan bahwa "*the act of travel in Islam is considered a "purposeful" activity which puts great emphasis on Islamic motivations as acting in the cause of God (fi-sabilillah), submission to the way of God (through the Hajj and the Umrah), realization of the smallness of man and the greatness of God, encouraging and strengthening the bond of sillaturrahim (Muslim fraternity) and conducting business. Muslims are*

*encouraged to achieve physical, social and spiritual goals by travelling*" (Din, 1989).

Hadits lainnyadiwayatkanolehAbuShuraihAl-Ka'bi: *whereRasululah saw. says: "WhoeverbelievesinAllahandtheLastDay,shouldservehisguest generously. The guest'sreward is: To provide himwitha superiortype of food for a nightandadayandaguestistobeentertainedwithfoodforthreedays, and whateverisofferedbeyondthat, is regarded as somethinggivenincharity. Anditis notlawfulforaguestto staywithhishostforsuchalong periodsoastoputhimina critical position."* (Sahih Bukhari, Vol. 8, Book 73, Hadith 156).

Dengan demikian, praktikwisata halal telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat untuk kepentingan sosial dan spiritual. Dari sisi hukum Islam, Nabi Muhammad saw. menjelaskan pulatentang adanya keringanan dalam shalat dengan cara mengumpulkan atau meringkas jumlah rakaat shalat ketika seseorang sedang melakukandalam perjalanan jauh dengan tujuan ibadah. Jadi, al-Qur'an dan hadis telah memberikan penjelasan hukum Islam tentang wisata dari sisi syari'ah melalui ketetapan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan menurut Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa pengertian pariwisata hendaknyamemperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu manusia (*man*), orang-orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (*space*), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu (*time*), waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkandiatas, terlihat bahwa pada dasarnya pariwisata mencakup segala bentuk/macam perjalanan yang berhubungan dengan kegiatan rekreasi/*pleasure*. Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan adanya suatu karakteristik khusus atau faktor-faktor pembentuk pariwisata sebagai berikut:

- a. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan dilakukandari suatu tempat ke tempat lainnya
- c. Perjalanan (apapun bentuknya) harus selaludikaitkan dengan rekreasi.
- d. Orang yang melakukan perjalanan tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai *konsumen* di tempat tersebut.

Pariwisata berdasarkan faktor-faktor diatas, diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk bersenang-senang dan memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 2 Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan dan
- k. kesatuan.

Kemudian fungsi kepariwisataan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam Pasal 4, ditentukan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Mengenai Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 1. Konsep Wisata Religi, Wisata Syaria'ah, dan Wisata Halal

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syaria'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain.

Dari sisi industri, wisata syaria'ah merupakan suatu produk lengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.

Wisata religi yang dimaksudkan bisa berarti pula wisata ziarah. Secara etimologi, ziarah dapat berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, namun dalam aktivitas pemahaman masyarakat kunjungan kepada orang yang telah meninggal melalui kuburannya. Kegiatannya pun lazim disebut dengan ziarah kubur.

Dalam Islam, ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan sunah. Praktik ziarah sebenarnya telah ada sebelum Islam, namun lebih-lebihkan sehingga Rasulullah sempat melarangnya. Tradisi ini pun dihidupkan kembali bahkan dianjurkan untuk mengingat kematian. Praktik ziarah sebenarnya telah ada sebelum Islam, namun overload sehingga Rasulullah SAW pernah melarangnya. Tradisi ini pun dihidupkan kembali bahkan dianjurkan untuk mengingat kematian. Barber (1993) mengartikan "pilgrimage as a journey resulting from religious causes, externally to a holy site, and internally for spiritual purposes and internal understanding" (see Galzacorta & Omil, 2016:52). Pengertian wisata religi dikembangkan pula sebagai semua upaya pemasaran dan pengembangan produk yang diarahkan pada umat Islam, meskipun tidak terkait motivasi agama (Henderson, 2010), atau upaya yang menekankan pentingnya turis Muslim dan non-Muslim sebagai pasar baru dan tujuan untuk pariwisata (Ala' Hamarneh, 2011). Dengan kata lain, Islamic tourism untuk mempromosikan pariwisata di kalangan umat Islam, mengembangkan tujuan wisata baru, dan memperkuat kerjasama antar organisasi dan antar-pemerintah di Dunia Islam.

Zamani Farahani and Anderson (2009) menegaskan bahwa "*Islamic tourism can be defined as traveling activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at one place outside their place of normal residence for a period less than one year and to engage in activities with Islamic motivations. It*

*should be noted that Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of Islam; i.e. halal*".

Jadi, pariwisata Islam dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan Muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka indikator wisata religid dalam Islam dapat disimpulkan berikut ini:

1. Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budaya-agama Islam) (Ala-Hamarneh, 2011).
2. Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim (Shakiry, 2008)
3. Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam) (Hassan, 2007).
4. Pariwisata Islam: suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar transendental (Hassan, 2004)
5. Wisata Islam: perjalanan yang bertujuan dengan motivasi "keselamatan" atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam (Din K., 1989:552).

Pariwisata Islam atau wisata dalam Islam berfokus pada isu-isu seperti keterlibatan (Muslim), tempat (tujuan Islam), produk (daerah tempat tinggal, makanan, dan minuman), dimensi (ekonomi, budaya, agama, dll.), dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis). Motivasi dan niat yang sangat penting dalam Islam, karena mereka terkait dengan sikap dan tujuan mereka (Ala-Hamarneh, 2011; Hassan, 2007; Henderson, 2010). Di beberapa negara, seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei, istilah wisata religid atau wisata Islam lebih dikenal sebagai wisata syari'ah.

Wisata religid menunjukkan aktivitas perjalanan dengan motivasi atau tujuan keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama (Muslim, Kristen, Hindu, Budha) yang biasanya dengan mengunjungi tempat-tempat suci agama atau tokoh agama. Pengertian tersebut berlaku juga untuk makna ziarah (pilgrimage) sebagai bagian dari aktivitas wisata. Karena itu, wisata religid sebagai suatu aktivitas ekonomi lebih tepat digunakan istilah wisata syari'ah jika yang melakukan aktivitas perjalanan adalah seorang Muslim, seiring dengan nomenklatur pada perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Wisata religid dapat berfungsi sebagai suatu kegiatan yang memiliki motivasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan tersebut dapat mencakup haji, umrah, dan sebagainya. Bentuk lain dapat berupa ungkapan rasa syukur kepada



Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim dan pengakuan atas kebesaran-Nya yang dapat diamati di mana saja baik pada masa lalu maupun sekarang (Din, 1989, 551-2).

Wisata religi dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan Muslim ketika menuju satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi agama. Perlu dicatat bahwa kegiatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu halal (Zamani Farahan dan Anderson, 2009).

Sofyan (2012:33) menegaskan bahwa definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Adapun kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadilandaskan bagiperilaku dan kegiatan umat Islam (Diyana Islami Baskanlig, 2011). Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Istilah sebaliknya adalah "haram" yang mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.

Kata "halal" berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga, definisi halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, perilaku, cara dan diet (Ijaj, 2011).

Selain itu, definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di Timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di Barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan

biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syariah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatasi pada persyaratan makan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek (Ijaj, 2011).

Selain itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, apakah istilah halal atau pemenuhan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu proses atau nilai yang diperoleh dalam memainkan peran penting untuk membentuk pikiran konsumen Muslim, terutama ketika membutuhkan konsumsi. Namun, jenis konsumsi tingkat produk apa yang harus ditawarkan oleh banyak merek sebagai pendekatan yang lebih luas dari definisi halal yang harus diterapkan pada merek barang atau makanan (Ijaj 2011).

Sebagai konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka dari sisi demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalam membuka kemungkinan cakrawala baru. Perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional mampu memproduksi minuman ringan, permen karet, dan suplemen kesehatan, vaksin, susu formula, bahan dan banyak lagi. Konsumsi halal menargetkan sebagai segmen pemasaran baru. Selain itu, produk halal bagi konsumen memberikan ruang untuk oleh semua orang sebagai perkumpulan global disekitar topik ini (Md. Aminul Islam and Laura Kärkkäinen, 2013).

Dengan demikian, istilah wisata halal sebagai manifestasi sosialisasi dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JI Expo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), Presiden Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, "wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013). Untuk lebih jelas, seperti dirinci Hamzah dan Yudianta (2015) dalam Dini Andriani, et.al. (2015), perbedaan antar wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah atau wisata halal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.  
Perbedaan wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah

No.	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Syariah/Halal
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spiritualitas	Meningkatkan spiritualitas
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi afektif	Aspek spiritual yang bisa menyenangkan	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar perlengkapan	Sekedar perlengkapan	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata,
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik dan halal
7	Relasi Masyarakat dan Lingkungan	Komplementar dan hanya untuk	Komplementar dan hanya untuk	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: data diolah 2018

## 2. Wisata Halal dalam Industri Pariwisata Nasional

Indonesia memiliki banyak potensi berupa pemandangan alam yang bagus dengan 17.100 pulau dan 742 bahasa. Selain itu, Indonesia yang berpenduduk 250 juta orang merupakan negara kepulauan terbesar dengan panjang 5.120 km dari barat ke timur dan 1.760 km dari utara ke selatan. Dalam pariwisata syariah diperlukan beberapa aspek utama, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, pelayanan buka puasa selama Ramadhan, serta adanya pembatasan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah (Lukman Hakim, <http://travel.kompas.com>). Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air. Daya saing pariwisata Indonesia sekarang ini berada di peringkat 50 dunia, dari sebelumnya berada

dadi posisi 70. Indonesia terus berusaha menjadi yang terbaik, sehingga pada 2019 Indonesia ditargetkan beradadi posisi 30

Data statistik wisatawan mancanegara pada Kementerian Pariwisata RI mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara dari 19 pintu masuk utama pada tahun 2015 sebanyak 9,420,240 orang, dan periode Januari–Desember 2016 mencapai 10,405,947 orang. Hal ini berarti bahwa kunjungan wisatawan mengalami pertumbuhan sebesar 10,46% (www.kemenpar.go.id).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro memaparkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 21,2% dalam periode Triwulan III 2015–Triwulan III 2016. Rata-rata kunjungan wisman triwulan III tahun 2016 berjumlah 1.023.793 kunjungan, dan merupakan yang tertinggi berdasarkan catatan statistik kedatangan wisman bulanan. Dampaknya adalah sektor pariwisata secara konsisten menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia (Bappenas, 2016). Pariwisata ditahun 2013 mencapai 10.0541 juta US Dollar, sedangkan pada tahun 2016 melonjak 11.761.7 juta USDollar.

Oleh karena itu, Bappenas telah merencanakan pembangunan sektor pariwisata, yakni konsisten pada arah pembangunan hingga tahun 2025 berupa pengembangan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Bambang Brojonegoro (2016) menegaskan bahwa pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia. Selain itu mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Kebijakan lainnya berupa jaminan lokasi destinasi wisata, penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat, layanan kemudahan bagi turis yang berkunjung, SDM dan kelembagaan pariwisata, pengembangan 10 destinasi prioritas, dan promosi wisata Indonesia.

Pada Rakornas Kepariwisata ke-4 pada 6–7 Desember 2016 di Jakarta dengan tema “Indonesia Incorporated, Meraih Target 15 Juta Kunjungan Wisatawan mancanegara dan 265 Juta Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2017”, yang dihadiri lebih dari 700 orang stakeholder pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata pertama kali mengumumkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) yang mengacu pada Travel and Tourism Competitive Indeks (TTCI) World Economic Forum dan United Nations World Organization yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia untuk mengukur kesiapan daerah

tujuan wisata. Sejumlah indikator lain juga diterapkan, seperti *policy support* (prioritas pariwisata, keterbukaan regional, daya saing harga, *environment sustainability*), *tourism enabler* (lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan dan kebersihan, SDM dan tenaga kerja, kesiapan teknologi informasi), *infrastructure* (infrastruktur bandara, infrastruktur pelabuhan dan darat, infrastruktur pelayanan pariwisata), dan *natural & cultural resources* (sumber daya alam dan sumber daya budaya) (<http://lifestyle.liputan6.com>).

Berdasarkan IPI tersebut, daya saing tertinggi industri pariwisata Indonesia masih didominasi di kota-kota besar. Denpasar, Bali menduduki peringkat IPI tertinggi dengan skor 3,81 dari rentang skala 0 sampai 5. Berikut 10 kabupaten dan kota dengan peringkat tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia.

Tabel 3. Sepuluh Peringkat Tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia Tahun 2016

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Denpasar, Bali	3,81
2	Surabaya, Jawa Timur	3,74
3	Batam, Riau	3,73
4	Sleman, Yogyakarta	3,72
5	Semarang, Jawa Tengah	3,59
6	Badung	3,55
7	Bandung, Jawa Barat	3,39
8	Banyuwangi, Jawa Timur	3,30
9	Bogor, Jawa Barat	3,27
10	Bantul, Jawa Timur	3,22

Sumber: <http://lifestyle.liputan6.com>

Adapun dilihat dari indikator aspek lingkungan pendukung bisnis pariwisata, peringkat kota di Indonesia dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4 Lima Peringkat Tertinggi Aspek Lingkungan Pendukung Bisnis Pariwisata Tahun 2016

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Denpasar	3,71
2	Sleman	3,42
3	Semarang	3,26
4	Surabaya	3,21
5	Bantul	3,19

Sumber: <http://lifestyle.liputan6.com>

Untuk aspek tata kelola pariwisata, maka peringkat kota di Indonesia dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. Lima Peringkat Tertinggi Aspek Tata Kelola Pariwisata Tahun 2016

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Surakarta	3,99
2	Denpasar	3,79
3	Bandung	3,68
4	Makasar	3,59
5	Yogyakarta	3,54

Sumber: <http://lifestyle.liputan6.com>

Sementara dari aspek pendukung pariwisata dengan indikator aspek infrastruktur pendukung pariwisata, data peringkatnya berikut ini:

Tabel 6. Lima Peringkat Tertinggi Aspek Infrastruktur Pendukung Pariwisata Tahun 2016

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Makasar	4,33
2	Denpasar	4,12
3	Bandung	4,12
4	Surabaya	3,89
5	Palembang	3,75

Sumber: <http://lifestyle.liputan6.com>

Sedangkan dilihat dari indikator aspek potensi wisata alam dan wisata buatan, data peringkatnya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 7 Lima Peringkat Tertinggi Aspek Potensi Wisata Alam dan Wisata Buatan

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Sukabumi	3,79
2	Bandung	3,45
3	Bogor	3,39
4	Wakatobi	3,29

Sumber: <http://lifestyle.liputan6.com>

Untuk mewujudkan pengembangan wisata halal dalam industri pariwisata nasional, Dirjen Pemasaran Pariwisata akan melakukan pelatihan SDM, capacity building, dan juga sosialisasi. Kementerian Pariwisata juga akan belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan konsep wisata halal, seperti Malaysia yang sudah lebih dulu dikenal sebagai destinasi wisata halal, serta melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA). PHRI bisa memastikan hotel-hotelnya halal untuk wisatawan Muslim, sementara ASITA bisa membuat paket-paket wisata ke tempat wisata religi dan ziarah.

Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kementerian Pariwisata, 2012). Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi (Dini Andriani, et.al., 2015).

Dalam perkembangan pariwisata halal, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pasal 1, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain, yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah (Peraturan ini telah dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 11 tahun 2016). Tujuan pariwisata halal adalah meningkatkan kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri untuk mengunjungi berbagai destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong tumbuh kembang bisnis syariah dalam industri pariwisata ([www.indonesiatravel](http://www.indonesiatravel)).

3.

Indonesia sebagai Kiblat Wisata Halal Dunia

I

Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim.

Wisata

halal bersifat terbuka untuk semua orang.

Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di hotel, restoran, serta spa. Diharapkan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi. Ciri wisata halal antara lain ada paket-paket wisata halal yang meliputi destinasi ramah wisatawan Muslim, serta hotel, restoran, dan spa yang halal (Kemenparekraf, 2013).

Salah satu tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal adalah menarik semakin banyak wisatawan asing, terutama Muslim. Terselip pula alasan lain yang mendasari diluncurkannya wisata jenis ini. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia, 1,2 juta diantaranya adalah Muslim, yang tentunya mengharapkan wisata berbasis syariah. Dengan wisata halal, mereka akan mudah menemukan makanan halal dan tempat ibadah. Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan semata untuk menarik wisatawan asing hingga meningkatkan jumlah kunjungannya per tahun. Keinginan dari turis domestik juga menjadi alasan karena menurut Kemenparekraf, semakin banyak wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal.

Esthy

Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenpar RI menyatakan bahwa untuk wisatawan domestik, kesadaran mereka untuk menginginkan produk halal semakin tinggi, jadi semakin banyak permintaan. Semakin banyak wisatawan yang menginginkan restoran berlabel halal serta hotel yang aman bagi keluarga dan anak-anak. Otomatis wisata syariah disini sangat dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tersebut (<http://lifestyle.liputan6.com>).

Di samping itu, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) menjalinkan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

m



- 7) mematuhi kode etik kepariwisataan duniadan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No.10/2009 tentang Kepariwisata, Bab III).

Untuk mewujudkan pengembangan wisata halal dalam industri pariwisata nasional, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf akan melakukan pelatihan SDM, capacity building, dan juga sosialisasi. Kemenparekraf juga akan belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan konsep wisata syariah, seperti Malaysia yang sudah lebih dulu dikenalkan sebagai destinasi wisata syariah. Kemenparekraf turut melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA). PHRI bisa memastikan hotel-hotelnya halal untuk wisatawan Muslim, sementara ASITA bisa membuat paket-paket wisata ke tempat wisata religi dan ziarah.

Wisata halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Dalam menerapkan wisata syariah di Indonesia yang diluncurkan tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim.

Menurut Ma'ruf Amin, Ketua MUI, menegaskan bahwa bagi turis Muslim, wisata syariah adalah bagian dari ibadah. Bagi yang non-Muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Sertifikasi halal MUI sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi pasti dijamin sehat dan bersih. Wisatawan Muslim tak perlu khawatir akan kehalalannya, dan wisatawan non-Muslim bisa meyakini bahwa makanan ini pasti bersih.

Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syariah. Kementerian Pariwisata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan dan digerakkan pada agen-agen wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah dan sesuai syariah.

Dalam kompetisi World Halal Tourism Awards 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan. Menurut Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, kemenangan ini justru menjadi awal untuk membangun ekosistem baru wisata

halal di Indonesia, yang akan memberi kontribusi besar bagi pencapaian target kunjungan wisata. Indonesia sudah menjadi kiblat wisata halal dunia.

Adapun penghargaan dalam World Halal Tourism Awards 2016 dengan 12 kategori yang diraih Indonesia adalah:

- 1) World's Best Airline for Halal Travelers: Garuda Indonesia.
- 2) World's Best Airport for Halal Travelers: Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh Indonesia.
- 3) World's Best Family Friendly Hotel: The Rhadana Hotel, Kuta, Bali, Indonesia.
- 4) World's Most Luxurious Family Friendly Hotel: Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.
- 5) World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.
- 6) World's Best Halal Tour Operator: Ero Tour, West Sumatera Indonesia
- 7) World's Best Halal Tourism Website: [www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com), Indonesia.
- 8) World's Best Halal Honeymoon Destination: Sembalun Village Region, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
- 9) World's Best Hajj & Umrah Operator: ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.
- 10) World's Best Halal Destination: West Sumatera, Indonesia.
- 11) World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera, Indonesia
- 12) World's Best Halal Cultural Destination: Aceh, Indonesia.

Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuty mengatakan, banyak alasan mengapa Indonesia bisa menjadi kiblat bagi pariwisata halal dunia. Pertama, Indonesia memiliki banyak atraksi wisata dunia yang sudah dilengkapi dengan amenities, seperti hotel berstandar internasional. Kedua, aksesibilitas, yaitu bandar yang berstandar internasional dan domestik, serta upaya pengembangan soft infrastrukturnya berupa sumber daya manusia.

Ketiga, produk pariwisata halal merupakan produk wisata alternatif, artinya setiap wisatawan juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitasnya. Produk wisata halal bukan hanya untuk turis timur tengah, tetapi juga untuk negara-negara seperti China, Korea, dan Jepang yang juga merupakan pasar potensial. Keempat, Indonesia merupakan pasar wisata halal terbesar yang diperkuat dengan tim percepatan pembangunan produk wisata halal (<http://lifestyle.liputan6.com>).

## B. Industri Pariwisata

Bila meninjau pariwisata dari segi ekonomi, seperti misalnya dari segi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), maka menurut G. Janata pariwisata dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: *dynamic sector* dan *static sector*. *Dynamic sector* adalah kegiatan yang berhubungan dengan *travel agent*, *tour operator*, angkutan atau transportasi wisata dan pelayanan lain yang berkaitan. Sedangkan yang dimaksud dengan *static sector* adalah perusahaan akomodasi, *catering services*, transportasi (secara umum), *entertainment*, *souvenir-shop*, dan lain-lain. Banyak aktivitas lain yang dapat menciptakan permintaan akan pelayanan perusahaan-perusahaan di atas. Fenomena ini ternyata berkesinambungan dan terjadi secara terus menerus. Setiap ada satu kegiatan yang mendorong terjadinya kegiatan perjalanan wisata, maka selalu ada permintaan akan jasa-jasa pelayanan yang sifatnya menyatu/tergabung (walupun produknya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda). Proses dari fenomena secara keseluruhan, sebagai akibat dari adanya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan macam-macam tujuan, dapat menciptakan permintaan (*demand*) akan beragam jasa pelayanan dari macam-macam perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dapat disebut dengan istilah "industri pariwisata".

Para ahli umumnya memberikan batasan pengertian kata "industri" sebagai berikut:

- a. Industri, adalah segala usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Industri, adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sejenis atau serupa
- b. Industri, adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan (*firms*) yang menggunakan bahan mentah yang sama.
- c. Industri, adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan (*firms*) yang mempunyai proses yang sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan "industri" adalah segala usaha yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa melalui suatu proses produksi.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/

atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

Menurut McIntos (1980) pariwisata adalah gabungan kegiatan, pelayanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti

transportasi, akomodasi, makanandan minuman,pertokoan, fasilitaskegiatanhiburan,dan pelayananlainnya yangtersediabagi individu ataukelompok yangmelakukan.Pariwisatamerupakan suatuusahayang komplek,halini dikarenakanterdapat banyakkegiatanyangterkaitdalam penyelenggaraan pariwisata.Kegiatan-kegiatan tersebutdiantaranyaseperti usaha perhotelan(*homestay*), usaha kerajinan/cinderamata, usahaperjalanan, danusaha-usahalainnya.Usahapariwisata dapatdapatdikaitkandengansaranapokokkepariwisataanyaituperusahaanya ng hidup dankehidupannyasangattergantungkankepadaaruskedatanganorang-orangyang melakukanperjalananwisata(Yoeti, 1996).

### C. Prasarananadan Sarana Pariwisata

#### 1. PrasaranaPariwisata

Prasarana(*infrastructures*)adalahsemua fasilitasyangmemungkinkanproses perekonomianberjalandenganlancar sedemikianrupa,sehinggadapat memudahkanmanusiauntukdapatmemenuhikebutuhannya.Prof.Salah Wahab dalambukunya*Tourism Management*,membagi prasaranakedalamtigabagian, yaitu:prasarana umum(*generalinfrastructures*),kebutuhan masyarakatbanyak (*basic needsofcivilizedlife*),danprasaranakepariwisataan.

##### a)PrasaranaUmum(*General Infrastructures*)

Prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak yang pengadaannya bertujuanuntuk membantukelancaranroda perekonomian,yaitu:

- (1) Pembangkit tenaga listrik dan sumber energi lainnya
- (2) Sistem penyediaan air bersih
- (3) Sistem jaringan jalan raya dan jalur kereta api
- (4) Sistem irigasi
- (5) Perhubungan dan Telekomunikasi

##### b) Kebutuhan Masyarakat Banyak(*Basic Needsof Civilized Life*)

Prasaranayang menyangkutkebutuhanorang banyak,seperti halnyarumah sakit, apotik, bank,kantor pos,pompabensin,danadministrasi pemerintahan (polisi, pengadilan,badanlegislatif,danlain-lain).

##### c) Prasarana kepariwisataan

###### a.*Receptive Tourist Plant*

Segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata, yaitu:Perusahaan yangkegiatannyaadalah merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi orang yang akan melakukan perjalanan wisata(*touropoperator andtravelagent*).Badanatauorganisasiyang memberikan penerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentang suatu daerah tujuan wisata (*Tourist Information Centeryangterdapat diairport, terminal, pelabuhan,atausuatu resort*).

###### b.*Residental Tourist Plant*

Semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang diperuntukkan bagi wisatawan dan juga segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Misalnya hotel, motor hotel (motel), wisma, homestay, cottages, camping, youth hostel, serta rumah makan, restoran, self-services, cafeteria, coffeeshop, grill room, bar, tavern, dan lain-lain.

#### c. *Recreative and Sportive Plant*

Semua Fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olahraga. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah fasilitas untuk bermain golf, kolam renang, boating, surfing, fishing, tennis court, dan fasilitas lainnya.

## 2. Sarana Pariwisata

Sarana Pariwisata (*tourism superstructures*) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupan perusahaan tersebut sangat tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana Pariwisata dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata,

#### a) Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*)

Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, yaitu : *Travel Agent and Tour Operator*, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, badan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata dan atraksi wisata.

Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata, jika salah satu tidak ada maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan. Sarana pokok pariwisata ini oleh Nyoman S. Pendit disebut dengan istilah “perusahaan utama yang langsung” yang terbagi ke dalam Objek Sentra dan Subjek Sentra sebagai berikut: *Objek Sentra*: termasuk perusahaan akomodasi, perusahaan pengangkutan/transportasi, tempat peristirahatan yang khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, perusahaan manufaktur (kerajinan tangan atau barang-barang kesenian), toko-toko souvenir, badan usaha yang menyajikan hiburan-hiburan (*EO*) atau menyediakan pemandu (*guide*) serta penerjemah, lembaga khusus untuk mempromosikan pariwisata. *Subjek Sentra*: perusahaan penerbitan pariwisata yang memajukan promosi pariwisata secara umum ataupun khusus, kantor yang membiayai pariwisata (*Travel Bank, Travel Credit, Social Tourism, and Youth Travel*), asuransi pariwisata (seperti kecelakaan, sakit dan biaya rumah sakit saat melakukan perjalanan).

#### b) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Supplementing Tourism Superstructures*)

Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok pariwisata, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Sarana pelengkap pariwisata oleh Nyoman S. Pendit disebut sebagai “perusahaan pariwisata sekunder”, karena tidak seluruhnya tergantung kepada kedatangan wisatawan tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya. Nyoman S. Pendit memberi contoh perusahaan pariwisata sekunder sebagai berikut: Perusahaan yang membuat kapal khusus untuk wisatawan, seperti: *cruiser*, gerbong khusus bagi wisatawan, mobil atau bus khusus bagi wisatawan, toko pakaian (*boutiques*), toko perhiasan (*jewellery*), toko kelontong dan toko foto (cuci-cetak), binatang, salon (*barbershop*), salon kecantikan, dan lain-lain.

#### c) Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*)

Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Selain berfungsi untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, sarana penunjang pariwisata memiliki fungsi yang jauh lebih penting yaitu membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Misalnya *night club*, *casinos*, *steambaths*, dan lain-lain. Adanya sarana pelengkap dan penunjang pariwisata seperti yang telah diuraikan di atas akan mendukung sarana-sarana pokok. Hal ini berarti bahwa ketiga sarana pariwisata tersebut, satu sama lainnya harus saling mengisi dan melengkapi.

### D. Jenis Usaha Jasad dan Usaha Sarana Wisata

Adapun Jenis Usaha Pariwisata antara lain:

1. *Usaha Daya Tarik Wisata*: usaha pengelola dan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
2. *Usaha Kawasan Pariwisata*: usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
3. *Usaha Jasa Transportasi Pariwisata*: usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
4. *Usaha Jasa Perjalanan Wisata*:
  - a. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
  - b. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan komoditas serta pengurus dokumen perjalanan.

5. *Usaha Jasa Makanan dan Minuman*: usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
  - a. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - b. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - c. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - d. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - e. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
  - f. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
6. *Usaha Penyediaan Akomodasi*: usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
  - a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
  - b. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
  - c. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

- d. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tinggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- e. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

7. *Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi*: usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

- a. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- b. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- c. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- d. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan tata nupramuria.
- e. Pantipijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
- f. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- g. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan tata nupamandulagu.
- h. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengelolaan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

8. *Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran*: pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas



prestasinya,sertapenyelenggaraanpamerandalamrangka penyebarluasan informasidanpromosi suatu barang danjasayang berskalanasional,regional,dan internasional.

9. *UsahaJasaInformasiPariwisata*: usahapenyediaandata,berita,feature,foto, video,danhasilpenelitianmengenaikepariwisataanyangdisebarkandalamb entuk bahancetakdan/atauelektronik.
10. *UsahaJasaKonsultan Pariwisata* :usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenaiastudikelayakan,perencanaan, pengelolaanusaha, penelitian,dan pemasaran dibidangkepariwisataan.
11. *UsahaJasaPramuwisata*: usahapenyediaandan/ataupengoordinasiantenag a pemanduwisatauntukmemenuhikebutuhanwisatawandan/ataukebutuha nbiro perjalananwisata.
12. *Usaha Wisata Tirta* yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usahapenyelenggaraanwisatadanolahraga air,termasuk penyediaansarandan prasaranasertajasalainnyayangdikelolasecarakomersial diperairanlaut,pantai, sungai, danau,danwaduk.
  - a. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaansarandanprasaranasertajasalainnyayang dikelolasecara komersialdi perairan laut.
  - b. Wisatasungai, danau danwaduk adalahpenyelenggaraanwisatadanolahraga air,termasuk penyediaansarandanprasaranasertajasalainnyayang dikelola secara komersialdi perairansungai,danau danwaduk.
13. *Usaha Spa* : usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasiterapi air,terapiaroma, pijat,rempah-rempah,layanann makanan/minuman sehat, dan olah aktivitasfisikdengantujuanmenyeimbangkan jiwa danragadengantetapmemperhatikantradisidanbudayabangsa Indonesia.

Jenis-jenis SaranaPariwisata :

1. *PenyediaanAkomodasi*  
Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tempattinggal wisatawan,misalnya:
  - a. Hotel,merupakansalahsatujenisakomodasiyangpalinglengkapdanpalin g banyakjumlahnyayang menggunakansebagianatauseluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umumyangdikelolasecara komersial.

- b. Motel(MotorHotel),adalahsuatubentukbangunanyangdigunakan untuk usahaperhotelandengansaranatambahan berupagarasi disetiapkamar. Biasanyamotelini bertingkatdua, bagian atas sebagaikamar untuk beristirahat sedangkan bagian bawah sebagaiberupagarasimotor atau mobil.Fasilitas yangdisediakan antara lain pompa bensindan bengkel mobil atau motor. Namalainuntukmoteladalahmoberge,motorlodge,motorcourt,danmotor inn.
- c. Cottages, adalah suatu bentuk bangunan yang dipergunakan untuk usaha pelayananakomodasi denganfasilitastambahanlainnya,beruparentalsepeda secara gratis untuk kegiatan bersepedadi sekitar cottages.
- d. Losmen(HotelMelati),adalahsuatuusahadenganmenggunakanseluruhatau sebagiandari bangunanyang khusus disediakanbagisetiapwisatawan sebagai jasa pelayanan.
- e. Inn,merupakanjenispelayananhoteldenganmenambahkanfasilitasesktra tanpadipungutbiaya,sepertidisediakangurumembatikuntukparatamu tanpa dipungutbiaya.
- f. Bungalow,adalahbangunanataurumahyangdigunakanuntuk peristirahatan terakhir, biasanya terletak di pinggirankotaataudidaerah-daerahluar kota.
- g. Homestay,adalahbangunanmilikpribadiyangdigunakanuntuk penginapan sementarabagiwisatawanyang ekonominyalemah ataubiasadisebutkaum hippies.
- h. Apartement,adalahpenginapanuntukjangkawaktuagaklama, misalnyapada waktumusim panas ataumusimlibur,dimanaselainmenyediakankamartidur jugamenyediakanlivingroom,teras, dankadang-kadangperlengkapanmasak-memasak.

## 2. Restoranatau rumahmakan

Restoranadalahindustri jasanya bergerak dibidangpenyediaanmakanandan minumanyang dikelolasecarakomersial.Secaraumumrestoran dibagi duayaitu: restoranyangberadadi dalam hotel dan di luar hotel.

### a. Restorandi dalam hotel.

Secaraumum restorandidalam hotel terdiri dari3macamyaitu:

- a. Rotisserie,adalahrestoraneksklusifyangmemilikitempatpembakar(Grill) yangdapatdilihatolehtamu.
- b. Grill, adalahrestoranuntuk chopsdibakar menurut selera tamu.

- c. CobaretatauSupper Club,adalahrestoranyangmengadakanpertunjukan padasaatmakan.

b. Restorandi luarhotel

- a. A'laCarteRestaurant: adalahrestoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilihsendiri makananyangmerekainginkan.
- c. TableD'hoteRestaurant adalahsuaturestoranyangkhususmenjual menu tabled'hote,yaitusuatususunanmenuyang lengkap(dari hidangan pembuka sampai penutup) dan tertentu.
- d. Coffee ShopatauBrassereiadalahsuaturestoranyang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasanya berhubungandenganhotel,pada umumnya system pelayanannya adalah denganAmericanservice dimanayangdiutamakanadalahkecepatanya.
- e. CafelariaatauCaféadalahsuaturestorankecil yang mengutamakan penjualan cake(kue-kue),sandwich(rotiisi),kopi dan teh.Pilihan makanannya terbatasdantidakmenjualminumanberalkohol.
- f. Canteenadalahrestoranyang berhubungandengankantor, pabrik,dan sekolah,tempatsimpanapara pekerjaatau pelajar biasa mendapatkanmakan siang ataucoffebreak,yaituacaraminumkopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar.

### 3. Transportasi

Transportasi adalah bidang usahajasyang bergerak dalam bidang angkutan baik darat,laut, maupun udarayang pengelolaannyadapatdilakukanolehswasta maupunBUMN.Peranan tranportasisangatpenting didalamkegiatanpariwisata. Tanpatransportasiwisatawanakansulituntuk melakukanperjalanan darisatu tempat ketempattujuanwisata,jikatidakadatransportasi maka tidak ada pariwisata.

Jenis-jenis transportasi dalam pariwisata adalah:

a. Transportasi udara

Penggunaantransportasiudarauntuktujuanperjalananwisatasemakinpopuler terlebih-lebihuntukperjalananjarakjauh.Contohnyapesawatterbang.

b. Transportasi laut

Merupakan jenis transportasi yang bergerak di dalam angkutan laut yang membawawisatawanmelalui jalur laut.Contohnyakapalferrydankapalpesiar

c. Transportasi darat

Angkutandaratadalahsaran transportasiyangdigunakanuntuk jalur daratdari satutempatke tempatlain denganmenggunakansepedamotor,mobil, bus, kereta api dansepeda

4. ObjekWisata adalahdayatarik utamawisatawanyangdating berkunjung kesuatutempatseperti pantai, pegunungan, danau, air terjun dan lain-lain.

5. Atraksi wisata

Suatukegiatanyang berupapertunjukansepertitari, musikdan upacaraadat suatu budayasetempatbaiktradisionalmaupunmodern.

6. MoneyChager

Tempat penukaran matauangasingatau moneychanger sekaranginitelah berkembang denganpesatnya.Penukaranuang tidakhanyadilakukandibanksaja melainkanjugabias dilakukandiperusahaan-perusahaanpenukaranuangyang tersebardi daerah-daerahstrategis.

### **E. Definisi Wisata Syariah**

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaan syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan

yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudianta, 2015).

Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah *Halal tourism* atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), *President Islamic Nutrition Council of America*, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Berikut ini tabel perbandingan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah:

Tabel 8.  
Perbandingan wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan Spirituaitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang	Aspek spiritual yang bisa menenangkan	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta

		berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	jiwa. Guna mencari ketenangan batin	menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015

Menurut Duran dalam Akyol & Kili  (2014), pariwisata memiliki bermacam dampak sosial dan budaya. Wisata halal adalah suatu produk baru dari pasar muslim dan non-muslim. Menurut Zulkifli dalam Akyol & Kili  (2014), pasar halal diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi). Menurut Duman dalam Akyol & Kili , *Islamic tourism* didefinisikan sebagai:

*“the activities of Muslims travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for participation of those activities that originate from Islamic motivations which are not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited”* (Kili , 2014)

Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall & Prayag, Halal atau *Islamic tourism* didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyak negara di dunia Islam yang memanfaatkan kenaikan permintaan untuk layanan wisata ramah Muslim (Razzaq, Hall, & Prayag, 2015). Sedangkan menurut Sapta Nirwandar (2015) dalam (Achyar, 2015) keberadaan wisata halal sebagai berikut:

*Halal tourism* adalah *extended services*. Kalau tidak ada dicari, kalau ada, bisa membuat rasa aman. Wisata halal bias bergandengan dengan yang lain. Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnya ada hotel

halal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjamin kehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas. Ini justru memperluas pasar, bukan mengurangi. Dari yang tadinya tidak ada, jadi ada". Pada acara *Focus Group Discussion (FGD) Halal Tourism & Lifestyle 2015* di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan pendapat pribadi bahwa nama dari wisata halal harus universal, beliau mengusulkan istilah "*Universal Tourism*",

karena wisata halal bukan semata-mata tentang kuliner. Ada industri lainnya seperti fesyen, finansial, kesehatan dan sebagainya. Sehingga kata "Universal" baginya sudah mewakili seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim (Putri, 2015).

#### F. Kondisi Wisata Syariah Dunia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), memberikan pengaruh terhadap daya beli wisatawan Muslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, banyak kalangan kelas menengah Muslim dari belahan dunia lain ingin mengeksplorasi tempat-tempat wisata baru. Berikut tabel populasi dan daya beli masyarakat muslim:

Tabel 9.  
Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim

<b>Largest Muslim Population</b>	<b>Largest Muslim % of Total Population</b>	<b>Highest Purching Power of Muslim Population</b>
Indonesia	Bahrain	Saudi Arabia
Pakistan	Kuwait	Turkey
India	Saudi Arabaia	Iran
Bangladesh	Algaria	Malaysia
Turkey	Iran	Qatar
Egypt	Oman	Russia

Iran	Turkey	France
Nigeria	Yemen	Libya
China	Tunisia	UAE
Ethiopia	Iraq	United States
Algeria	Libya	Algeria
Monaco	Pakistan	Singapore
Sudan	UAE	Indonesia
Afghanistan	Qatar	Egypt
Iraq	Egypt	The Netherlands

Sumber: A.T. Kearney dalam Sofyan (2012:40)

Berdasarkan data di atas, Malaysia mampu memanfaatkannya dalam meningkatkan wisatawan Muslim. Total estimasi wisatawan mancanegara Muslim ke Malaysia berdasarkan *Islamic Tourism Malaysia* tahun 2010 sebesar 5.817.571 atau 24% dari total wisatawan mancanegara Malaysia sebesar 24.557.200 (Sofyan, 2012:40).

Tabel 10.  
Sepuluh Besar Negara Tujuan OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) dan Non-OIC *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015

Peringkat	Destinasi OIC	Skor	Destinasi Non-OIC	Skor
1	Malaysia (1)	83,8	Singapura (9)	65,1
2	Turki (2)	73,8	Thailand (20)	59,2
3	UEA (3)	72,1	Inggris (25)	55
4	Saudi Arabia (4)	71,3	Afrika Selatan (30)	51,1
5	Qatar (5)	68,2	Perancis (31)	48,2
6	Indonesia (6)	67,5	Belgia (32)	47,5
7	Oman (7)	66,7	Hongkong (33)	47,5
8	Jordania (8)	66,4	Amerika Serikat (34)	47,3
9	Maroko (9)	64,4	Spanyol (35)	46,5
10	Brunei (10)	64,3	Taiwan (36)	46,2

Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, belum mampu menjadi negara tujuan wisata bagi *muslim traveller*. Berikut contoh dari negara-negara yang menjadi destinasi bagi muslim *traveller*, yaitu:

#### a. Turki

Meskipun Turki adalah negara sekuler, Islam adalah bagian penting dari kehidupan Turki. Menurut laporan Pew Research Center tahun 2010 jumlah penduduk Turki 98% adalah muslim sehingga diasumsikan bahwa



sebagian besar produk makanan koheren dengan konsep halal di Turki (Pew Research Center, 2010).

Selain faktor jumlah penduduk muslim yang besar, meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan kaum konservatif kelas menengah atas telah juga mempengaruhi permintaan untuk pasar halal terutama wisata halal (Duman dalam Akyol & Kilinç, 2014). Untuk memenuhi permintaan wisata halal, salah satunya dengan audit halal oleh World Association Halal. Hotel pertama yang menerima "sertifikat halal" di Turki adalah Adenya Hotel & Resort. Selain itu, standar bintang hotel "*crescent standards*(standar sabit)" menunjukkan kualitas di sektor perhotelan Islami (Kilinç, 2014). Menurut catatan Himpunan Pemilik Hotel Mediteranian (AKTOB), tahun 2002 Turki hanya memiliki hotel 5 buah, saat ini setidaknya tercatat ada 75 hotel di Turki yang memasang label hotel Islami bersahabat dengan jilbab, liburan sesuai syariah, dan wisata halal. Hotel islami banyak dijumpai di destinasi misalnya di Canakkale Kas dan Kusadasi. Hotel-hotel tersebut tidak menghadirkan alkohol dan babi, memisahkan kolam renang untuk tamu pria dan wanita, serta mengharuskan pegawainya untuk berpakaian sopan. Tayangan televisi dan situs-situs internet dipilih sesuai dengan aturan Islam. Mushala yang disediakan juga dilengkapi peredam suara dari luar (Nashrullah & Pratiwi, 2014).

Dalam jajak pendapat yang dibuat BBC Turki baru-baru ini, 60% wisatawan mencari hotel berlabel halal dan jumlah itu terus meningkat. Kebanyakan wisatawan menghindari hotel yang menyajikan alkohol dan makanan tak halal. Presiden Asosiasi Jurnalis Pariwisata (TUYED) Kerem Kofteoglu menyampaikan, sektor pariwisata harus toleran terhadap semua jenis wisatawan, termasuk bagi wisatawan berkerudung dan yang tidak. Kofteoglu mengatakan, "Kami tak bisa memilih tamu yang singgah." (Nashrullah & Pratiwi, 2014)

*Muslim Traveler Index Europe 2014* memperkirakan nilai wisata halal Eropa mencapai 137 miliar dolar AS. Turki sendiri termasuk menjadi lima besar negara tujuan wisatawan pencari pariwisata syariah di Eropa. Nilainya bahkan mencari 103 miliar euro pada 2013 atau sekitar 13 persen dari total nilai pariwisata halal dunia. Turki diperkirakan akan meraih hingga 141 miliar euro dari sektor ini pada 2020.

#### **b. Malaysia**

Menurut laporan Pew Research Center tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia sebesar 28.400.000. Tahun 2020 menurut Pew Research Center, diperkirakan jumlah penduduk Malaysia meningkat menjadi 33.360.000 terdiri dari Muslim sebesar 66,1 %, Budha menjadi 15,7 %, Nasrani sebesar 9,4 %, dan Hindu sebesar 5.8 % (Pew Research Center, 2015).

Henderson dalam Akyol & Kilinç (2014) berpendapat bahwa konsep *Islamic tourism* adalah salah satu yang berkembang pesat di beberapa negara di selatan Asia Timur seperti Malaysia dan Singapura. Wisata Islami di Malaysia bagus karena mereka memiliki sistem khusus pariwisata Muslim yang mempromosikan wisata Islam dalam agenda pariwisata nasional. Dari catatan Crescentrating, tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Malaysia mencapai 5,9 juta orang. Sementara yang datang ke Indonesia hanya sekitar dua juta orang saja dari total 10-11 juta wisatawan asing yang masuk (Pratiwi & Murdaningsih, 2015).

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. *Malaysia* sebagai negara federal tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura, saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang

menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula Ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.

Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Lembaga rating wisata muslim dunia, Mastercard-CrescentRating kembali merilis hasil Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk 2018. Hasilnya Malaysia secara berturut-turut selama delapan tahun kembali menjuarai indeks wisata halal dunia. Dalam perkembangan pariwisata di Malaysia, upaya pertama yang mereka lakukan adalah menciptakan produk yang menarik untuk dijual, karena mereka sadar Malaysia intens sekaya Indonesia yang memiliki banyak potensi produk wisata yang menjual seperti Borobudur, Bali, dan lain sebagainya. Produk yang mereka ciptakan diuasi:

1. Mengkapitalisasi Malaysia yang terdiri dari berbagai negara dengan tiga bahasa utama yaitu Melayu, Cina, dan India yang merepresentasikan Asia, mereka menciptakan tagline "Malaysia Truly Asia".
1. Contohnya adalah produk wisata lain yaitu menciptakan ikon wisata "Twin Towers Petronas". Pengembangan potensi wisata yang ada di Pulau Langkawi

Kedua, pengembangan konektivitas (kemudahan bepergian ke seluruh dan ke Malaysia). Malaysia mudah diakses dan destinasi dapat berkembang. Salah satu indikatornya adalah pengembangan Bandara Internasional di Kuala Lumpur yang dimulai dengan Subang dengan kapasitas 400.000 penumpang per tahun, ternyata mendapatkan 15 juta per tahun, kemudian pindah ke Sepang, sekarang telah terealisasi mencapai 50 juta penumpang per tahun melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) .

Ketiga, pelestarian kearifan lokal yang kental dengan gaya hidup Islami dengan pengembangan Homestay di daerah-daerah tujuan wisata yang dikembangkan Dapat memberikan semua elemen masyarakat dalam pengembangan ekonomi.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (a) mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Mengedepankan wujud atau akhlak yang baik, baik dalam memberikan pelayanan maupun menciptakan produk wisata.

- (b) menyesuaikan hal-hal yang baik dari sistem dan standar yang digunakan oleh peradaban Barat, sebagai contoh pelayanan prima dalam produk pariwisata, dalam mengembangkan program-program pengembangan kapasitas untuk peningkatan pelayanan dan produk wisata.
- (c) menjalankan konsep dan berorientasi pasar. Sebagai contoh, wisatawan dari barat mungkin menginginkan hal-hal yang tidak selaras dengan produk wisata halal, hal tersebut tidak perlu dilarang/dipaksakan kepada wisatawan yang tidak menginginkan, dan harus difasilitasi pada produk wisata yang sesuai dengan tarif tersebut. Produk wisata halal harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Muslim dari berbagai negara yang berbeda.

Yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia adalah pemerintah, melalui lembaga bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim). Dengan begitu, peredaran sertifikat ini mudah diawasi lantaran satu pintu. Di Malaysia dikenal Jakim sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal dalam produk pariwisata halal. Sebagai sebuah agensi utama pengurusan hal ehwal islam di peringkat persekutuan serta urus setia kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI), maka Jakim melaksanakan tiga fungsi utama berikut

1. Penggubalan dan Penyeragaman Undang-Undang Syarak
2. Penyelarasan Pentadbiran Islam
3. Penyelarasan dan Pembangunan Pendidikan Islam

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri akan berperanan sebagai agensi pusat dalam perancangan pengurusan Hal Ehwal Islam dan pembangunan ummah dengan fungsi-fungsi seperti berikut:

- a. bertanggungjawab seperti perancang yang menentukan pembangunan dan kemajuan Hal Ehwal Islam di negara ini;
- b. merangka dasar bagi pembangunan Hal Ehwal Islam di negara ini dan menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam
- c. membantu menggubal dan menyeragam undang-undang dan peraturan yang diperlukan serta menilai dan menyelaras pelaksanaan undang-undang dan pentadbiran yang sedia ada dari masa ke semasa dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam;
- d. Melaksanakan program-program pembangunan ummah dan penghayatan Islam dalam pengurusan negara;
- e. Menyelaraskan mekanisme penguatkuasaan undang-undang serta peraturan-peraturan pentadbiran Hal Ehwal Islam di seluruh negara;
- f. Membuat penilaian program-program Hal Ehwal Islam yang dilaksanakan di negara ini;
- g. Bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan pusat rujukan maklumat mengenai hal ehwal Islam; dan
- h. Melaksanakan usaha-usaha pembangunan ummah melalui kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa.

### **c. Thailand**

Jumlah penduduk Thailand berdasarkan riset Pew Research Center tahun 2010 sebagian besar adalah 93,2% Budha, 5,5% Muslim, dan sisanya agama lainnya kurang dari 1%. Meskipun sebagian besar penduduknya beragama Budha, Thailand telah mendirikan Halal Science Center di Chulalongkorn University. Dalam usaha meningkatkan wisata halal Thailand mengumumkan *Muslim Friendly Thailand*, seperti dilansir dari Deutsche Presse-Agentur, Rabu (10/6), aplikasi ini akan diluncurkan pada tanggal 22 Juni mendatang dalam bahasa Inggris, Thailand, dan Arab. Piranti lunak ini dirancang untuk membantu wisatawan menemukan restoran halal, hotel, masjid, dan operator tour. Otoritas wisata Thailand mengatakan, aplikasi ini merupakan bagian dari kampanye untuk menarik lebih banyak pengunjung dari Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia, yang menyumbang tiga juta wisatawan ke negara itu tahun lalu (Putri, 2015).

#### **d. Singapura**

Singapura sebagai negara yang memprioritaskan sektor pariwisata, dianggap paling paham dalam melayani wisatawan termasuk wisatawan Muslim. Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha pariwisata diberikan *halal award* (Sofyan, 2012). Menurut Pew Research Center tahun 2010, penduduk Singapura terdiri dari beberapa umat beragama, yaitu: Buddhist (34 persen), Christians (18 persen), Folk Religions (2 persen), Hindus (5 persen), Muslim (14 persen), Jews (<1 persen), Unaffiliated (16 persen), other religions (10 persen).

Dari data di atas, mayoritas penduduk Singapura beragama Budha, populasi Islam berada di posisi keempat. Sebagai negara yang mayoritas beragama Budha, Singapura berhasil mencapai peringkat 9 menurut Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015 untuk negara Non-OKI yang menjadi tujuan wisata muslim terbaik di dunia. Badan Pariwisata Singapura atau "*Singapore Tourism Board*" meluncurkan buku panduan wisata halal bagi pelancong Muslim dari Indonesia. Kriteria dalam survei GMTI meliputi berbagai macam faktor meliputi kecocokan sebagai tempat berlibur bersama keluarga bagi keluarga Muslim, tingkat pelayanan bagi wisatawan Muslim, ketersediaan fasilitas bagi wisatawan Muslim, pilihan akomodasi yang baik, jumlah kedatangan wisatawan Muslim, pilihan menu dan makanan halal, dan lainnya. Direktur Eksekutif STB Wilayah Asia Tenggara Edward Koh menyampaikan Singapura memiliki banyak fasilitas makanan halal yang sudah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Halal yang dimiliki negara itu. Sebanyak 108 wisatawan Muslim berkunjung ke Singapura, dengan nilai 145 miliar dolar AS dan mempresentasikan 10 persen dari total perekonomian dunia (Putra, 2015).

#### **e. Korea Selatan**

Meskipun mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, sebagian tempat wisata di Korea Selatan sudah menyediakan fasilitas yang memudahkan para turis Muslim. Tujuan wisata halal di Korea antara lain: Gyeonggi-do (banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang menyediakan tempat ibadah dan makanan halal bagi umat Muslim meliputi Everland,

Korea Folk Village di Yongin, Petite France di Gapyeong, Skin Anniversary di Paju dengan Woongjin Playdoci dan Aiins World di Bucheon (Rezkisari, 2014).

Selain Gyeonggi-do, terdapat juga destinasi wisata halal yaitu Gangwon. Pemerintah Korea Selatan aktif dalam mempromosikan paket wisata syariah ke Indonesia. Strategi promosi yang dilakukannya adalah dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara perwakilan organisasi pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) dengan Garuda Indonesia Holiday (GIH). Provinsi Gangwon mendukung kerja sama ini dengan menyediakan restoran yang ramah bagi Muslim dan Mushala. Saat ini produk wisata halal ke Korea yang telah dikembangkan oleh GIH adalah berupa produk 3M5H, 4M6H, dan produk 5M7H, yang menyertakan makanan halal di restoran ramah Muslim pada semua jadwalnya, serta kunjungan ke mushala untuk shalat (Putri & Pratiwi, 2015).

### **3. Kondisi Wisata Syariah di Indonesia**

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan *Global Halal Forum* bertema *Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination* pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan Kemenparekraf, 2013, *Indonesia as Moslem Friendly Destination* (Buku Panduan Wisata), penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek utama pariwisata, yaitu:

### 1) Produk

Pengembangan Produk harus berdasarkan Kriteria Umum dan Standarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan Daya Tarik.

### 2) SDM dan kelembagaan

Kompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjang dengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim.

### 3) Promosi (indonesia.travel, 2013)

Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku Wisatawan Muslim, *World Islamic Tourism Mart* (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates Holiday World, *Crescentrating.com*, *halaltrip.com*, etc. Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitas, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal *Crescentrating* bersama *MasterCard*, *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. *Crescentrating* menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO *Crescentrating* Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah bersertifikat baru 37 hotel. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat halal.

## G. Kebijakan Publik

Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah

merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Michael Howlett dan Ramesh, 1995:4). Kebijakan publik dapat semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Yeremias Keban, kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Arifin Tahir, 2011:38).

Definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Menurut Subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Subarsono, 2005:3).

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

James E. Anderson mengatakan *Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: *Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*. (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-



nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat) (Budiman Rusli, 2013:37).

Menurut Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Michael Howlett dan Ramesh, 1995:4).

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn dalam bukunya Dwiyanto Indiahono bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara sempurna, maka perlu beberapa persyaratan tertentu yaitu:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau institusi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau keadaan yang serius
2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari dengan hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan langsung ketergantungan harus kecil
6. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Dwiyanto Indiahono, 2009:55).

Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga definisi di atas adalah kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu dan kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Guna menghindari adanya plagiarisme, beberapa hasil penelitian dan publikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penelitian yang berjudul *"Internet and Halal Tourism Marketing"* oleh Mevlüt Akyol dan Özgür Kiliç

Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, Ankara-Turkey*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyajikan konsep pemasaran halal di dunia dan di Turki. Dalam konteks ini, salah satu perusahaan perantara, yang disebut "hotel halal", dianalisa dalam kerangka deskriptif. Penelitian yang dikembangkan adalah definisi marketing halal, konsep wisata halal dan hotel halal, deskripsi wisata halal di Turki, pentingnya internet dalam marketing wisata, dan analisis visual dan textual dari website hotel-hotel halal di Turki. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaku marketing halal harus mempertimbangkan harapan hotel halal baik untuk wisatawan Muslim dan non-Muslim. Muslim mencari liburan yang koheren dengan Islam dan harapan non-Muslim juga mendapatkan keamanan dan kebersihan. Hal tersebut harus diperhitungkan oleh pelaku marketing halal. Hasil analisis visual dan tekstual menunjukkan bahwa sebagian besar hotel Islam koheren dengan Islam. Misalnya, memberikan prinsip makanan dan non-alkohol halal, fasilitas terpisah untuk wanita dan ruang doa adalah fitur utama dan umum dari Islam atau hotel halal.

Selain itu, hotel islami, internet dan media sosial menyediakan *platform* komunikasi yang signifikan untuk hotel halal karena halal berorientasi pemasok industri dan perantara umumnya menargetkan populasi Muslim. Dengan demikian, internet mungkin menawarkan kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian dari pasar ini. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah ukuran sampel mungkin tidak cukup besar untuk menggeneralisasi temuan. Yang kedua adalah hanya menganalisis hotel bintang lima, sehingga hotel dibawahnya dikeluarkan. Keterbatasan terakhir adalah hanya menggunakan situs web untuk mendapatkan gambar dari hotel karena itu, media lain seperti majalah, surat kabar dan televisi tidak dimasukkan. Dengan mempertimbangkan studi lebih lanjut, menganalisis persepsi halal, sikap dan perilaku pembelian dapat mengembangkan lebih penjelasan terhadap konsep *marketing* halal.

b. Penelitian Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana.

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini mengupas tentang potensi industri halal dalam wisata syariah dan membandingkan antara bisnis syariah dengan konvensional. Disampaikan bahwa perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan konvensional adalah visi dan misinya. Visi bisnis syariah ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya adalah berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi.

Disampaikan dalam tulisan mereka bahwa perlu mengintegrasikan antara wisata syariah dan konvensional untuk difokuskan pada industri

halal. Dalam perkembangannya wisata konvensional lebih dulu berkembang ketimbang wacana wisata syariah. Meskipun Indonesia sudah lama menerapkan wisata syariah dari produk pangan yang halal. Namun kurangnya sosialisasi dan promosi, wisata syariah menjadi minus disini. Karena patut belajar dari Bali yang menjadi daerah tujuan wisata. Untuk pengembangan wisata syariah bisa mencontoh konsep wisata konvensional dalam hal promosi, paket wisata dan layanan. Lombok katakanlah, secara alam lebih unggul, alami dan indah dari Bali, secara budaya jauh lebih Islami. Namun karena kurangnya promosi, jumlah wisatawan yang berkunjung disini juga masih minim.

c. Serrin Razzaq, C. Michael Hall & Girish Prayag. *The capacity of New Zealand to accommodate the halal tourism market – or not.*

Mereka meneliti situs penyedia akomodasi di Auckland dan Rotorua, dua tujuan wisata utama di Selandia Baru, negara yang semakin berusaha untuk memposisikan diri sebagai tujuan ramah halal di Asia dan Timur Tengah. Analisis dari 367 situs akomodasi yang ditemukan hanya tiga situs yang secara khusus menyebutkan halal dan juga mengidentifikasi sejumlah atribut yang dapat mencegah lebih banyak wisatawan halal konservatif. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan terhadap kapasitas sektor akomodasi Selandia Baru untuk kedua menyampaikan informasi akomodasi yang tepat untuk pasar Islam serta memberikan pengalaman memuaskan untuk mereka yang tinggal. Perbaikan substansial dalam pelatihan dan pendidikan direkomendasikan.

Selandia Baru telah semakin mempromosikan dirinya sebagai tujuan ramah Muslim untuk menarik wisatawan halal. Banyaknya eksportir daging sapi halal dan domba negara ini berusaha untuk mempromosikan penawaran halal lainnya. Namun, penyediaan wisata halal dan perhotelan adalah proses yang jauh lebih rumit daripada daging halal. Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih bernuansa konsumen Islam dan posisi sosial-budaya mereka dan tuntutan yang berbeda ini akan memiliki pada pemasok. Sejumlah atribut yang berbeda dari akomodasi halal diidentifikasi dari literatur (Battour et al, 2010; Henderson, 2010; Stephenson 2014) dan diterapkan pada analisis isi dari situs penyedia akomodasi dari Auckland dan Rotorua. Hanya 3 dari 367 situs dianalisis disebutkan halal dan hanya satu yang bersertifikat.

d. Penelitian Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Unggul Priyadi, Yazid, Eko Atmaji.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengembangan desa wisata yang ada di kabupaten Sleman untuk menjadi desa wisata syariah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode SWOT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi wisata di kabupaten Sleman cukup besar untuk dikembangkan menjadi desa

wisata karena telah tersedia fasilitas yang mendukung yaitu tempat ibadah yang memadai dan mudahnya akses makanan halal. Kendala dalam usaha pengembangan antara lain masyarakat masih belum memahami desa wisata syariah, kurangnya promosi dan layanan yang belum berstandar serta terbatasnya kreatifitas kerajinan dan kesenian.

Alternatif strategi pengembangan yang ditawarkan peneliti yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang desa wisatasyariah, optimalisasi potensi alam, sosial dan budaya untuk merespon minatmasyarakat untuk berkunjung atau meningkatkan frekuensi kunjungan ke desa wisata. Namun yang paling penting adalah komitmen semua pihak dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun untuk mengembangkan desa wisata syariah di kabupaten Sleman.

e. Penelitian Penciptaan Nilai Pariwisata: Sebuah Pendekatan Islam  
(*Value Creation in Tourism: An Islamic Approach*) oleh Abolfazi Tajzadeh Namin.

Di dalam penelitian ini disampaikan meskipun Islam dianggap sebagai pasar utama global, namun nilai-nilai islami belum didefinisikan secara baik di pasar pariwisata. Peneliti mengembangkan sebuah model, de Figureted di bawah ini, untuk penciptaan nilai pariwisata Islam. Dalam pandangan peneliti, mata rantai yang hilang dalam pariwisata secara umum dan khususnya pariwisata Iran adalah menciptakan nilai melalui pariwisata Islam. Dengan kata lain, untuk meningkatkan tujuan wisata di Iran dan dunia islam, maka perlu untuk mengkaitkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengelola tujuan dengan cara yang strategis dalam rangka menyediakan keunggulan kompetitif dalam dunia yang dinamis saat ini. Untuk memenuhi harapan wisatawan Muslim tidak hanya untuk memberikan wisatawan dengan pengalaman diinginkan tetapi juga untuk melindungi nilai-nilai yang ada dan kualitas hidup di tujuan.

Pada model di atas, terdapat interaksi antara semua komponen model. Model tersebut berguna untuk semua pemangku kepentingan (termasuk orang) baik di tingkat mikro dan makro. Dengan kata lain, sukses di tingkat nasional dan internasional perlu menciptakan keseimbangan antara tujuan destinasi dan unsur-unsur yang ada untuk menciptakan nilai dalam pariwisata Islam secara konsisten untuk pengembangan pariwisata di Iran dan promosi nilai-nilai Islamdi seluruh dunia. Dengan demikian, mereka harus memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam interaksi budaya dan pengetahuan lebih tentang nilai-nilai dan norma-norma mereka.Semua elemenbudaya, nilai-nilai, dan norma-norma harus digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan sosial serta melindungi hak asasi manusia. Pendekatan yang disampaikan peneliti untuk mempromosikan wisata Islam adalah marketer ikut terlibat dalam membuat pola *travelling* dan paket wisata.

- f. *Promoting Islamic Tourism in Brunei: Through Customers Understanding Toward the Syariah Compliant Hotel Concepts*, oleh Mohamed

Penelitian yang dilakukan oleh Ezzat, et.al dengan judul *Sharia-Compliant Hotels in Egypt*; dan penelitian yang dilakukan oleh Purtaheriet.al dengan judul *Impact of Religious and Pilgrimage Tourism in Rural Areas: The Case of Iran*. Pertama, penelitian Mohamed (2013) yang berjudul *Promoting Islamic Tourism in Brunei: Through Customers Understanding Toward the Syariah Compliant Hotel Concepts*. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang diperlukan setiap Negara muslim agar sukses diperhotel yang sangat kompetitif. Dalam hal ini, Mohamed menguji kerangka kerja dengan pengunjung massa (domestik dan internasional) melalui pemahaman mereka tentang pentingnya menerapkan konsep *Syariah Compliant Hotel* (SCH). Sehingga memungkinkan Mohamed untuk menganalisis dan mengevaluasi kemungkinan membangun lokasi SCH di Brunei. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman pelanggan secara keseluruhan terhadap konsep SCH berada pada tingkat yang rendah. Selain itu, juga ditemukan bahwa diantara tiga variabel independen (sikap, penerimaan, dan kepercayaan), faktor sikap memiliki beta tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan menjadi faktor yang paling dominan dan berpengaruh dalam mempengaruhi pemahaman konsumen terhadap konsep SCH.

g. Penelitian berjudul *Sharia-Compliant Hotels in Egypt* oleh Ezzat, et.al. Penelitian tersebut berusaha memberikan kejelasan tentang arti dari SCH dan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan (SCH) di Mesir. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan Pendekatan Delphi. Temuan dari penelitian tersebut adalah (i) Pada kategori operasi, terdapat ciri-ciri yang penting, yakni: tidak melayani makanan yang mengandung babi dan minuman beralkohol, staf perempuan untuk tamu untuk orang Muslim saja, namun juga tersedia bagi mereka yang menaati syarat dan ketentuan hotel.

h. Penelitian yang berjudul *Impact of Religious and Pilgrimage Tourism in Rural Areas: The Case of Iran*. Penelitian yang dilakukan oleh Purtaheriet.al menyajikan analisis empiris wisata ziarah dan wisata religi, serta dampak dari jenis wisata tersebut di daerah pedesaan di Iran. Penelitian memberikan contoh dampak dan transformasi wisata ziarah dan wisata religi di tiga pusat desa sebagai Desa Model Wisata. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuesioner survey. Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa parapeziarah dan wisatawan religi sangat berpengaruh di area pedesaan, namun aspek sosial wisata ziarah dan wisata religi memiliki pengaruh besar pada rumah tangga pedesaan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desa-desayang terkait dengan wisata religi telah mendaftarkan dampak yang cukup signifikan dari desa-des tersebut yang terkait dengan pariwisata ziarah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan didukung pula dengan data kuantitatif. Cakupan sumber data diperoleh dari

observasi dan wawancara dengan informan dan narasumber di Lombok Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung. Menurut Sugiyono (2012:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama atas rasa ingin tahu peneliti untuk menilai kebijakan strategis pengembangan wisata syariah di Propinsi Lampung.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari data yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah segala sesuatu

yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dibuat peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh dengan melakukan survey, menggunakan daftar pertanyaan terhadap pelaku usaha wisata, pemangku kebijakan, FGD, wawancara mendalam, dan observasi.

Guna melengkapi informasi/data, survei dan wawancara juga dilakukan dengan dinas/instansi pemerintah daerah terkait, masyarakat lokal dan pelaku wisata.

- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga berasal dari kantor-kantor pemerintah dan instansi terkait, antara lain gambaran umum lokasi penelitian, dan beberapa informasi lain yang berisikan tentang pariwisata syariah.

### **C. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengambilan data sekunder dengan studi literature dan pengambilan data primer melalui observasi, dan wawancara dengan narasumber (Dinas Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata Banda Aceh dan Dinas Pariwisata Propinsi Lampung).

### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti

2) Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3) Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **F. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Utara menjadialah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak di bagian utara pulau Lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Barat: Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat, Sebelah Selatan: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Sebelah Timur: Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratannya kini seluas 809,53 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, 33 desa dan 322 dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 km<sup>2</sup> dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 km<sup>2</sup>.

Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik.

Secara administratif Kabupaten Lombok Utara memiliki 5 wilayah kecamatan, menyimpan berbagai objek wisata yang cukup potensial untuk program jangka panjang. Objek wisata di Kabupaten Lombok Utara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: wisata alam, dan wisata budaya.

Wisata alam diantaranya meliputi: Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Sire, Malimbu, Pantai Nipah, Pantai Medana, Montong Pal, Hutan Pusuk (*Monkey Forest*), Air Terjun Gangga, Air Terjun Senaru, Air Terjun Tiu Teja dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedangkan wisata budaya diantaranya meliputi: Masjid Bayan Beleg, Rumah Adat Segenter, Rumah Adat Karang Bajo, Peresean, dan Gendang Beleg dan lain-lain.

Lombok Utara merupakan salah satu di antara surgawisata yang cukup mencengangkan dunia, yaitu daerah yang memiliki keindahan pantai yang cukup mempesona. Pesona

Lombok Utara yang sudah tidak terpuhngkir keindahan alamnya menjadi impian dunia dan menjadi "magnet" bagi setiap pengunjung yang

pernah hadir dansinggahdikabupatenini untukdapatkembali lagi menikmati keindahan pantai yang tidak adaduanya di belahan lain manapun di dunia. Hal itu diantaranya terlihat di Kompleks pariwisata “Gili” yang menawarkan modernisasi bernuansa seni yang berbalut kemajemukan budaya lokal. Pantai Sire, Malimbu, Pantai Nipah, Pantai Medana, Montong Pal, Hutan Pusuk (*Monkey Forest*), Air Terjun Gangga, Air Terjun Senaru, Air Terjun Tiu Teja dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedangkan wisata budayanya meliputi: Masjid Bayan Beleg, Rumah Adat Segenter, Rumah Adat Karang Bajo, Peresean, dan Gendang Beleg dan masih banyak lagi destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Dibalik sejumlah keindahan yang dimiliki, Kabupaten Lombok Utara juga diuntungkan oleh posisi strategis daerah tujuan pariwisata, yaitu berbatasan dengan

Pulau Bali dan akses ke Laut Banda yang mudah. Posisi strategis ini menjadikan Lombok Utara melejit menjadi daerah destinasi wisata papan atas di Indonesia. Namun seiring dengan tuntutan kemajuan, dengan hanya mengandalkan wisata sebagai satu-satunya komoditas andalan mendukung ekonomi lokal adalah sulit dipertahankan untuk menjadikan Kabupaten Lombok Utara berdayasaing. Oleh

karena nyaberbagai potensi sumber daya alam digali, diteliti dan dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi produktif. Jika melihat posisi strategis dari aspek perdagangan,

jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok adalah jalur laut yang semakin ramai dilalui,

dari arah timur tengah menjadi jalur lintas distribusi bahan bakar minyak dan dari Australia merupakan jalur distribusi mineral logam menuju Asia Pasifik, tentu memungkinkandigalisehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan grafik kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara diperkirakan akan mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dalam menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai industri produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembangunan dan perbaikan sarana pelabuhan, sarana transportasi jalan, pengangkutan, serta membangun program kebersihan dan kesehatan, sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat memberikan keuntungan dan kenyamanan masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara diharapkan akan menjadialah satu industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor produktivitas lainnya. Disisi lain juga dapat mendorong kreativitas seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata yang merupakan

gabungan dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintahan, tuan rumah, serta masyarakat dalam proses menarik dan melayani wisatawan.

Tabel 11.  
Objek Wisata di Lombok Utara

No.	Kecamatan	Nama	Jenis Objek Wisata
1.	Pemenang	GiliTramena (Trawangan,MenodanAir. GoaJepang Gili Trawangan	Alam pantai
2.	Tanjung	Pantai Sire, ArungJeramTengah Pekatan	Alam pantai dan minat khusus
3.	Gangga	Pantai Kerakas,Selelos, AirTerjun KertaRaharja, AirTerjunTiuPupus, Pantai Lempenge	Alam pantai, budaya, alam pegunungan
4.	Kayangan	AirTerjunTeja, Masjid Kunosesait	Alam pegunungan, budaya
5.	Bayan	AirTerjun SindangGila, AirTerjun Kelep, AirTerjunTorean, Masjid KunoBayan Beleq, Desa Tradisional Senaru, Desa Tradisional Segenter,T.N.Gunung Rinjani, PantaiTanjungMenangis, PadangGolf, DamKeru	Alam pegunungan, budaya, alam pantai

Sumber : data diolah, 2018

Pengembangan dan pengelolaan wisata di Kabupaten Lombok Utara diarahkan pada penataan daya tarik wisata (destinasi), pembinaan sadar wisata, peningkatan promosi wisata daerah dengan cara menjalin kemitraan, mengembangkan event-event lokal, tradisional, internasional serta memanfaatkan teknologi informasi. Dengan dicanangkannya Kabupaten Lombok Utara sebagai "Destinasi Wisata Dunia", pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara terus berupaya mengembangkan destinasi-destinasi yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 12. Nama dan Jenis beberapa Objek Wisata  
di Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Objek Wisata
1.	Pemenang	1. Hutan Wisata Pusuk 2. Pantai Klui 3. Pantai Malimbu 4. Pantai Nipah 5. Pantai Pandanan 6. Pantai Kecinan 7. Pantai Mentigi

		8. Pantai Setangi 9. Pantai Teluk Nara 10. Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air 11. Pantai Bangsal 12. Pantai Muara Putat 13. Air Terjun Tiu Roton
2.	Tanjung	14. Makam Amak Dana 15. Air Terjun Sokwah 16. Pantai Sira 17. Pantai Tebobor 18. Pantai Medana 19. Pantai Jambanon 20. Pantai Sorong Jukun 21. Pantai Penyambuan 22. Arung Jeram Dusun Tengah Pekatan
3.	Gangga	23. Dusun Wisata Buani dan Centra Kerajinan 24. Air Terjun Tiu Pupus 25. Air Terjun Kerta Gangga (Kerta Raharja ) 26. Air Terjun Tiu Pituk 27. Mata Air Kakong 28. Pantai Tebing 29. Pantai Kerakas 30. Pantai Montong Pal 31. Pantai Teluk Sedayu
4.	Kayangan	32. Masjid Kuno Sesait 33. Desa Wisata Gumantar 34. Air Terjun Tiu Sekeper 35. Air Terjun Tiu Teja 36. Air Terjun Purit 37. Air Terjun Ngumbaq 38. Pantai Beraringan 39. Pantai Selengen
5.	Bayan	40. Air Terjun Sindang Gila 41. Air Terjun Tiu Kelep 42. Air Terjun Batara Lenjang 43. Air Terjun Torean 44. Air Terjun Sampur Rarum 45. Air Terjun Landean 46. Desa Tradisional Senaru 47. Masjid Kuno Bayan Beleq 48. Dusun Tradisional Segenter 49. Dusun Tradisional Embar-Embar 50. Dusun Tradisional Sembagek 51. Taman Nasional Gunung Rinjani 52. Pantai Labuhan Carik

	53. Kampung Adat Desa Anyar
--	-----------------------------

Sumber: data diolah, 2018

Bidang seni jugadilestaikan di Kabupaten Lombok Utara, terbukti dengan banyaknya jumlah atraksi dan sanggar kesenian yang ada di masing-masing kecamatan.

Tabel 13. Inventarisasi Beberapa Atraksi dan Sanggar Kesenian Kabupaten Lombok Utara

No.	Jenis Kesenian	Lokasi/Kecamatan	Jumlah
1.	Gamelan	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	2
2.	Zikir Zaman	Kayangan	2
3.	Kelentang	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	6
4.	Pepaosan	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	1
5.	Ale-ale	Pemenang, Tanjung, Gangga dan Bayan	8
6.	Wayang Kulit	Tanjung	3
7.	Kecimol	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	3
8.	Cupak	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	9
9.	Rudat	Pemenang, Gangga, Kayang dan Bayan	1
1	Gendang Beleg	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	3
1	Tawak-tawak	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	1
1	Rebana	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	1
1	Cilokaq	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	1
1	Gegeruk	Gangga dan Bayan	2
1	Komedi Tari Ru	Pemenang, Bayan, Kayang dan Gangga	4
1	Gamelan Reban	Tanjung dan Gangga	2
1	Joget Gandrung	Tanjung dan Kayangan	2
1	Bale Ganjur	Tanjung, Gangga, Kayang dan Bayan	4
1	Tari Sireh	Pemenang, Tanjung, Gangga	4
2	Gong Dua	Gangga dan Bayan	9
2	Gong Gebyar	Kayang dan Tanjung	3
2	Sandra Tari	Tanjung	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Kabupaten Lombok Utara, 2018

Tabel 14. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing	Jumlah
1.	2011	31.511	306.135	337.646
2.	2012	43.165	383.804	426.969
3.	2013	52.663	433.207	485.870
4.	2014	55.544	447.797	503.341
5.	2015	66.838	468.687	535.524

Sumber: Dinas Pariwisata KLU, 2018

Prinsip Pembangunan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara meliputi:

1. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.
3. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan tata kelola yang baik
4. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
5. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan mendorong mitra sektor publik dan privat.

Berdasarkan hasil analisis keempat pilar pembangunan pariwisata, maka konsep pengembangan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Lombok Utara diarahkan pada konsep pengembangan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kabupaten Lombok Utara sebagai destinasi pariwisata terpadu yang unik, kompetitif dan ramah lingkungan.
2. Mengembangkan produk wisata yang kompetitif sekaligus komplementer (dalam jenis, skala dan prioritas) dengan produk wisata yang dikembangkan pusat-pusat pariwisata regional Bali, NTB, NTT.
3. Pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Utara pada kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata.

## **B. Propinsi Aceh**

### **a. Sejarah Aceh Darussalam**

Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura. Dari penemuan batu-batuan di Kampung Pande salah satu dari batuan tersebut dapat batuan Sultan Firman Syah ucu dari Sultan Johan Syah, maka terungkaplah keterangan bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Pura dengan ibukotanya Bandar Lamuri.

Kota Lamuri adalah Lamurik sekarang terletak di Aceh Besar. Menurut Dr. N.A. Baloch dan Dr. Lance Castley yang dimaksud dengan Lamuri adalah Lamreh di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang). Sedangkan Istana yang dibangun di tepi Kuala Naga (kemudian menjadi Krueng Aceh) di Kampung Pandes sekarang

inidengan namaKandang Aceh, dan pada masa pemerintahancunyaSultanAlaidinMahmud Syah,dibangunistana barudiseberang KualaNaga(Krueng Aceh)dengannamaKutaDalamDarud Dunia (dalam kawasan Meligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang) dan beliau juga mendirikanMesjid Djami Baiturrahman padatahun 691 H.Banda AcehDarussalamsebagaiibukota KerajaanAcehDarussalamdan sekarang ini merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah

berusia808tahun(tahun2013M)merupakansalahsatuKotaIslamTertua di AsiaTenggara.Seiring dengan perkembangan zamanKerajaan AcehDarussalam

dalamperjalanansejarahnyatelahmengalamizamangemilang danpernahpula mengalami masa-masasuramyangmengggentirkan.

AdapunMasagemilang KerajaanAcehDarussalamyaitupadamasapemerintahanSultanAlaidinAliMughayatSyah,SultanAlaidinAbdulQahhar (AlQahhar), SultanAlaidinIskandar Muda MeukutaAlamdan SultanahTajul Alam Safiatuddin. Sedangkanmasapercobaanberat,padamasapemerintahanRatuyaitu ketika golonganoposisiKaumWujudiyahmenjadikalapkarena berusaha merebut kekuasaanmenjadigagal,maka merekabertindakliardenganmembakarKuta Dalam Darud Dunia, Mesjid Djami Baiturrahman dan bangunan-bangunan lainnyadalam wilayah kota.

KemudianBandaAceh Darussalammenderita penghancuran padawaktu pecah Perang Saudara antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya, peristiwainidilukiskan olehTeungkuDirukamdalamkaryasastranya,Hikayat Pocut Muhammad. Masayang amatgetirdalamsejarahBandaAcehDarussalampadasaat terjadi PerangDijalanAllah selama 70tahunyangdilakukanoleh Sultan dan

RakyatAcehsebagaijawabanatasultimatumKerajaanBelandayangbertan ggal

26Maret1837.DanyanglebihlukulagisetelahBandaAcehDarussalammen jadi puing dan diatas puing Kota Islam yang tertua di Nusantara ini BelandamendirikanKutarajasebagaiangkahawalBelanda dariusaha penghapusan dan penghancuran kegemilanganKerajaanAcehDarussalamdan ibukotanyaBanda Aceh Darussalam.

Sejak ituibukota BandaAcehDarussalamdigantinamanya olehGubernur Van SwietenketikapenyeranganAgresike-2Belanda pada KerajaanAceh Darussalam tanggal 24 Januari 1874 setelah berhasilmendudukiIstana/Keraton yang telahmenjadipuing-puing dengansebuahproklamasinyayang berbunyi: Bahwa KerajaanBelanda danBanda Acehdinamanya denganKutaraja,yang kemudiandisahkanolehGubernur JenderaldiBatavia denganbeslityang bertanggal16Maret1874,semenjaksaatituressmilah BandaAcehDarussalam

dikebumikandandiataspusaranyaditegaskanKutaraja sebagai lambang dari Kolonialisme.

Pergantian nama ini banyak terjadi pertentangan dikalangan paratentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas dan merekaberanggapan bahwa Van Swieten hanya mencarimukapada Kerajaan Belanda karena telah berhasil menaklukkan para pejuang Aceh dan merekameragukannya.

Setelah 89 tahun nama Banda Aceh Darussalam telah dikuburkan Kutaraja dihidupkan, maka pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut resmiah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja hingga saat ini.

Sejarah dukakota Banda Aceh yang masih segar dalam ingatan adalah terjadinya bencana gempa dan tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh. Ratusan ribu jiwa penduduk menjadi korban bersama dengan harta bendanya menambak getiran warga Kota Banda Aceh. Bencana gempa dan tsunami ini dengan kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua abad terakhir ini.

## **b. Gambaran Umum Kota Banda Aceh**

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dan beradadi belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas: Utara: Selat Malaka Selatan: Kabupaten Aceh Besar Barat: Samudera Hindia Timur: Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh beradadi ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata beradadi ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.

## **c. Demografi**

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa (sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh). Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129.333 jiwa (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

## **d. Struktur Gampong dan Kecamatan**

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa) Kecamatan :



- a. Baiturrahman : Luas wilayah 455 Km<sup>2</sup>
- b. Kuta Alam : Luas Wilayah 1.005 Km<sup>2</sup>
- c. Meuraxa : Luas Wilayah 726 Km<sup>2</sup>
- d. Syiah Kuala : Luas Wilayah 1.424 Km<sup>2</sup>
- e. Lueng Bata : Luas Wilayah 534 Km<sup>2</sup>
- f. Kuta Raja : Luas Wilayah 521 Km<sup>2</sup>
- g. Banda Raya : Luas Wilayah 479 Km<sup>2</sup>
- h. Jaya Baru : Luas Wilayah 378 Km<sup>2</sup>
- i. Ulee Kareng : Luas wilayah 615 Km<sup>2</sup>

**Jumlah Gampong :**

1. Baiturrahman, Ateuk Jawo, Ateuk Deah Tanoh, Ateuk Pahlawan, Ateuk Munjeng, Neusu Aceh, Seutui, Sukaramai, Neusu Jaya, Peuniti, Kampung Baru.
2. Kuta Alam, Peunayong, Laksana, Keuramat Kuta Alam, Beurawe, Kota Baru, Bandar baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin, Lambaro Skep.
3. Meuraxa Surien, Aso Nanggroe, Gampong Blang, Lamjabat, Gampong Baro, Punge Jurong, Lampaseh Aceh, Punge Ujong, Cot Lamkeuweuh, Gampong Pie, Ulee Lheue, Deah Glumpang, Lambung, Blang Oi, Alue Deah Teungoh, Deah Baro.
4. Syiah Kuala, Maseng Kaye Adang, Gampong Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah raya, Aleu Naga, Peurada.
5. Lueng Bata, Lamdom, Cot Masjid, Bathoh, Lueng Bata, Blang Cut, Lampaloh, Suka Damai, Panteriek, Lamseupeung.
6. Kuta Raja, Lampaseh Kota, Merduati, Keudah, Peulanggahan, Gampong Jawa, Gampong Pande.
7. Banda Raya, Lam Ara, Lampeuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong raya, Peunyerat, Lamlagang, Geuceu Komplek, Geuceu Inem, Geuceu Kayee Jato.
8. Jaya Baru, Ulee Pata, Lamjamee, Lampoh Daya, Emperom, Geuceu Meunara, Lamteumen Barat, Lamteumen Timur, Bitai, Punge Blang Cut.
9. Ulee Kareng, Pango Raya, Pango Deah, Ilie, Lamteh, Lamglumpang, Ceurih, Ie Masen Ulee Kareng, Doi, Lambhuk (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

**e. Agama**

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kotaini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budhadan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

**Jenis Agama :**

1. Islam : 222.582 Jiwa

2. Protestan : 717 Jiwa
  3. Katolik : 538 Jiwa
  4. Hindu : 39 Jiwa
  5. Budha : 2755 Jiwa
- Jumlah Fasilitas ibadah :
- a. Masjid : 104 Unit
  - b. Meunasah : 91 Unit
  - c. Mushalla : 90 Unit

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh telah mengangkat wisata syariahs sebagai unggulan pariwisata. Selama ini ada kesan wisata syariahs sebagai wisata religi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Promosi Dinas Pariwisata kota Banda Aceh, Pak Said Fauzan mengatakan "Padahal bukan sekedar wisata religi, tetapi perilakunya. Seperti fasilitasnya sesuai syariat Islam dan ramah pada wisatawan muslim dan non muslim. Konsep wisata syariah ini menjadi unggulan pariwisata di Kota Banda Aceh ini".

Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan, Kota Banda Aceh telah menunjukkan proses dalam memajukan wisata syariahnya. Misalnya, pemerintah Kota Banda Aceh berbenah untuk melakukan sertifikasi halal untuk hotel, restoran dan tempat spa di Kota Banda Aceh. Dari hasil wawancara langsung peneliti bersama dengan Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, Bapak Abdul Wahab mengatakan "dari pihak MPU provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh bekerja sama dalam melakukan peninjauan langsung guna memastikan makanan dan yang lainnya itu harus menggunakan produk yang halal". Nah saya juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi makanan, restoran, hotel dan spa yang sudah di sertifikasi halal oleh MPU Aceh.

### **Destinasi Wisata di Kota Banda Aceh**

Keindahan Kota Banda Aceh saat ini sudah tersebar hingga ke mancanegara. Serambi Mekkah ini memiliki beragam destinasi wisata menarik. Tidak hanya alamnya yang indah, tapi Banda Aceh belakangan ini populer melalui program pariwisata syariahnya. Dengan mayoritas penduduknya yang beragama dan dikenal juga sangat kuat memegang teguh ajaran agamanya, sehingga kehidupan masyarakatnya dikenal sangat agamis. Berbagai obyek yang menggambarkan kebesaran Islam, dan wajib dikunjungi diantaranya Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim di Ulee Lheue, Makam-makam lama, dan lain-lain.

Walikota Banda Aceh mengatakan, dengan wisata halal yang lagi dipromosikan ini, Kota Banda Aceh akan menjadi istimewa

dibanding daerah-daerah lain. Karena Banda Aceh memiliki sisi unik yang khas dengan variannya dan Banda Aceh akan menonjolkan keistimewaan yang dimiliki dengan latar belakang kehidupan masyarakat Banda Aceh. Banda Aceh pun dikenal dengan bentang alamnya yang indah menggoda mata. Kini, obyek wisata yang berhubungan dengan Tsunami menjadi salah satu unggulannya. Wisatawan yang datang ke Banda Aceh dapat mengetahui peristiwa yang terjadi langsung pada tahun 2004 silam dengan mengunjungi antara lain museum tsunami Aceh, kapal peltdapung, kapal nelayan terdampar di atas rumah, kuburan massal korban tsunami dan lainnya.

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnu, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh akan terus melakukan berbagai upaya pembenahan, pembangunan dan pemeliharaan, serta juga terus meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Pasca terjadinya bencana Tsunami, kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh hingga saat ini cukup menggembirakan. Pada tahun 2017 wisnum mencapai 272.079 orang dan wisman 16.274 orang. Berikut beberapa tempat wisata di kota Banda Aceh :

#### **a. Mesjid Raya Baiturrahman**

Pada awalnya mesjid raya ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang pernah menjadi benteng pertahanan dalam melawan penjajah Belanda. Sejak masa Sultan Iskandar Muda, mesjid ini sudah berfungsi sebagai tempat ibadah, pengajian, acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan 1 Muharram, dan Musabaqah Tilawatil Quran. Banyak kejadian yang telah dialami oleh mesjid rayabaiturrahman ini, seperti tahun 2004 mesjid ini menjadi saksi sejarah dan tempat berlindung warga Aceh ketika bencana gempa dan tsunami 13 tahun silam. Kini mesjid yang berdiri di jantung kota Banda Aceh telah berbenah. Mesjid Raya Baiturrahman sekarang telah tampil lebih indah menyerupai Mesjid Nabawi dengan mereplikasikan payung-payung yang ada di sana.

Mesjid Raya Baiturrahman menjadi destinasi wisata Islami yang menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Bangunan mesjid yang kokoh dengan arsitektur indah, dengan adanya payung-payung besar seperti Mesjid Nabawi di Madinah membuat semakin nyaman dikunjungi dan enak dipandang dan membuat tenang hati. Banyak sekali fasilitas yang menghiasi mesjid rayaini seperti parkir, bawah tanah, toilet, dan tempat wudhu bawah tanah yang langsung tembus ke gamesid, serta lampu-lampu yang indah

### **b. Pasar Aceh**

Pasar Tradisional utama dankawasanperdagangan ditengah kota Banda Aceh. Pasar ini menjual beranekaragam keperluan dan kebutuhan masyarakat kota Banda Aceh. Tidak lupa juga untuk para wisatawan jika mengunjungi Pasar Aceh ini, baik kebutuhan berwisata maupun souvenir bisa didapatkan di Pasar Aceh ini. Pasar Aceh menjual berbagai keperluan dengan harga yang murah, barangnya bagus, penjualnya ramah.

### **c. Blang Padang**

Lapangan monumental yang menjadilah satulandmark kota Banda Aceh. Di Lapangan Blang Padang ini terdapat Monumen Thanks to the World, Monumen Pesawat Seulawah dan juga Food Bazaar yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat maupun para wisatawan. Di salah satu pedagang disekitar Lapangan Blang Padang tersebut yang sayawawancara, disini yang puncak ramainya itu ketika ada acara yang dibuat di lapangan blang padang, akhir pekan dan juga pada musim liburan.

Lapangan Blang Padang, tepatnya di area berjualannya jika malam hari maka akan semakin indah, karena lampu-lampu kecil akan dinyalakan. Maka rasa nyaman duduk menikmati makanan dan minuman pun semakin bertambah. Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan, lapangan Blang Padang ini sangat nyaman jika dinikmati pagi dan sore hari karena banyak aktifitas yang biasa dilakukan seperti di pagi hari melakukan jogging dan sore hari menikmati makan yang dijual di area food court lapangan Blang Padang. Dan juga saya selama berada di kota Banda Aceh terhitung ada 6 kali melakukan jogging, terkadang sendirian kadang bersamatemansaya di Banda Aceh. Saya menyukai lapangan ini karena letaknya di tengah kota Banda Aceh.

### **d. Museum Aceh (Rumoh Aceh)**

Museum Aceh adalah obyek wisata yang patut dikunjungi karena menyimpan kebudayaan "Tanah Rencong" pada masa lalu. Museum ini berbentuk sebuah rumah tradisional Aceh (Rumoh Aceh) dan memiliki halaman yang hijau yang luas. Terletak di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah. Di dalam museum ini terdapat barang-barang kuno seperti keramik, persenjataan serta benda-benda budaya lainnya seperti pakaian adat, perhiasan, kaligrafi, alat rumah tangga dan masih banyak lagi. Lebih lagi juga terdapat sebuah lonceng besar yang diberi nama "Lonceng Cakra Donya", sebuah lonceng hadiah dari Maharaja China untuk Kerajaan Pasai yang diantar oleh

Laksamana Cheng Ho pada tahun 1414. Lunceng ini juga menjadi salah satu bukti kejayaan Kerajaan Aceh pada masa lalu. Adasatugedung lagi di Museum ini yang menceritakan Sejarah Aceh dan Kebudayaan kota Banda Aceh maupun keseluruhan Aceh.

Pada saat memasuki Rumoh Aceh, disambut dengan suasana yang sangat identik dengan motif atau corak Acehnya menu rut saya. Ada ruang tamu yang dimana jika tamu datang maka aparatamutersebut duduk di atas tikar, dan memasuki keruang yang lebih dalam kita akan melihat kamar tidur. Dan di sisi belakang ujung ada dapur dan segala peralatannya. Museum Rumoh Aceh ini terawat dan keasliannya masih terjaga.

#### **e. Taman Putroe Phang**

Taman Putroe Phang salah satu situs terbungkus yang memiliki nilai sejarah peradaban masa lalu yang amat unik dan artistik. Taman putroe phang adalah taman Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) untuk permaisurinya Putroe Phang yang berasal dari Kerajaan Pahang. Taman ini dibangun karena sultan sangat mencintai Putri Pahang dan agar sang permaisuri tidak kesepian bila di tinggal sultan menjalankan pemerintahan. Di dalam taman ini terdapat Pintu Khop yaitu gerbang kecil berbentuk kubah yang merupakan pintu yang menghubungkan taman dengan istana. Pintu Khop ini merupakan tempat beristirahat Putri Phang, setelah lelah berenang, letaknya tidak jauh dari Gunongan, di sana lah dayang-dayang membasuh rambut sang permaisuri. Di sana juga terdapat kolam untuk sang permaisuri keramas dan mandi bunga.

#### **f. Gunongan**

Taman Sari Gunong digunakan sebagai tempat untuk menghibur diri agar kerinduan kerinduan sang permaisuri pada suasana pengunungan di tempat asalnya terpenuhi. Gunongan ini dikenal sebagai gunung dari kata Melayu gunung dengan menambahkan akhiran „an“ yang melahirkan arti “bangunan seperti gunung” atau “simbol gunung”. Jadi gunong adalah simbol gunung yang merupakan bagian dari taman-taman istana Kesultanan Aceh.

Pada saat berada di gunongan tersebut, akan terpacu dengan bangunan yang sekarang menjadi peninggalan sejarah ini karena gunongan ini berdiri dengan tinggi 9,5 meter dan berwarna putih bersih. Saya merasa takjub dengan apa yang sudah dibuat Sultan untuk menyenangkan Permaisurinya. Bangunan ini sangat menarik dan juga terdapat Kandang Bagindang yang merupakan lokasi pemakaman

keluarga  
Aceh

sultan Kerajaan

### **g. Kerkhof (Peucut)**

Kuburan Massal tentara kolonial Belanda, sebelumnya adalah makam putera Sultan Iskandar Muda, Poteu Cut. Kerkhoff adalah sebuah kompleks kuburan serdadu Belanda yang gugur dalam peperangan melawan rakyat Aceh. Komplek makam yang cukup luas ini berlokasi di Jalan Teuku Umar, disamping Blang Padang, Banda Aceh. Kerkhoff dibangun pada tahun 1880 dan dalam komplek ini terdapat kurang lebih 2.200 kuburan serdadu Belanda yang dimakamkan Jenderal JHR Kohler yang gugur ditembak oleh pasukan Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman. Selain itu pengunjung juga bisa mengetahui kisah-kisah tentang prajurit semasa hidupnya yang diceritakan sekilas pada batunisan. Kuburan-kuburan ini seolah bercerita kepada pengunjung tentang bagaimana "penghuninya" semasa hidup.

### **h. Museum Tsunami**

Museum Tsunami Aceh ini dibangun sebagai monumen untuk mengenang tragedi Tsunami 26 Desember 2004 silam. Museum ini terletak di Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Museum ini masih menyimpan banyak kenangan yang tidak pernah luput dari masyarakat Aceh. Puing-puing kenangan yang tersimpan dalam foto, rekaman suara, hingga struktur bangunan yang dirancang M. Ridwan Kamil (sekarang Walikota Bandung) menyibak kesedihan dalam setiap langkah di museum ini. Memiliki empat lantai yang masing-masing berisi ruangan pameran dan instalasi. Pertama pengunjung akan diberikan suasana dramatis dengan percikan air di lorong gelap. Suasana itu akan terasa mengerikan mengingat tragedi tsunami di Aceh silam menuju pintu masuk museum. Di dalam museum akan dihidangkan podium-podium yang menampilkan rangkaian foto Banda Aceh sesaat setelah tragedi tsunami. Rangkaian foto pun akan bergerak otomatis mengganti sejumlah gambar suasana sesaat setelah tsunami. Dari ruangan itu terdapat jalan sempit menuju sebuah ruangan bercahaya redup dengan atap berhiaskan kaca patri berlafal "Allah". Suasana dramatis semakin terasa karena di sekeliling dindingnya ditempelkan nama-nama korban akibat tsunami. Khusus untuk lantai 4 diperuntukkan sebagai tempat evakuasi bencana alam bagi para warga. Selama berkunjung pengunjung bisa menikmati semua fasilitas secara gratis.

### **i. Taman Sari**

Taman sari ini bagian dari Taman Bustanussalatin (Taman Para Raja). Tempat wisata dan bermain, kegiatan seni, pameran, pertunjukan, kegiatan sosial dan galeri. Berdasarkan pengalaman peneliti, menurut saya taman ini sangat bagus dan indah. Terlihat dari bangunan depan yang ada Tulisan Bustanussalatin tepat beradadi atasnya, sehingga dari jauh pun terlihat bacaannya. Ketika sudah masuk ke dalam bagian bangunan maka kita akan langsung beradadi atas sehingga bisa melihat jelas ke arah Mesjid Raya Baiturrahman. Begitu kita turun, kita akan melewati tugu atau monumen yang menarik, dan juga di ujung taman ada bangunan yang dijadikan untuk melakukan pertunjukan jika ada sebuah acara. Gedung ini didesain menunjukkan ciri khas dari kebudayaan Aceh. Saya menikmati pemandangan dan aktifitas dari orang-orang yang juga mengunjungi taman Bustanussalatin ini. Di area taman ini juga ada banyak komunitas yang diikuti anak-anak muda, seperti sepatu rodan sepeda.

#### **j. Makam Syiah Kuala**

Makam Syiah Kuala terletak di desa Meunasah Deyah Kuala, Banda Aceh. Syiah Kuala bernama asli Syech Abdurraufas Singkili ini adalah seorang Hakimpada jamansultanan aceh. Makam ini juga sudah dijadikan objek wisata religio oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Setiap hari ratusan pengunjung selalu memadati area makam ini. Baik sekadar melihat, maupun hendak berziarah sembari membacakan zikir dan berdoa di makam ini.

#### **k. PLTD Apung**

PLTD Apung merupakan kapal berbobot 2.600 ton. Saat kejadian tsunami 26 Desember 2004 silam, kapal ini sedang beradadi Pantai Ulee Lhee, Banda Aceh. Akibat diterjang tsunami, kapal terseret dan terdampar 5 km ke perkampungan Gampong Punge, Blangcut, Banda Aceh. Wisatawan bisa berkunjung ke tempat ini untuk membuktikan kedahsyatan tsunami Aceh. Kapal PLTD Apung kini menjadi monumen tidak sengaja dari bencana besar itu. Sejak April 2012, disekeliling area dipagar besi setinggi 1,5 meter. Beragam fasilitas ditambah, mulai dari jembatan, prasasti hingga ruang dokumentasi. Pasca-tsunami melanda Aceh, kapal itu menjadi perhatian, tidak hanya dari masyarakat Aceh, tetapi juga hingga mancanegara. PLTD Apung adalah situasi tsunami yang alami, artinya bukan dibangun oleh manusia, tapi tercipta oleh alam, dan itu yang menjadi alasan bagi pengunjung untuk melihat langsung keajaiban alam tersebut. Berwisata di Kota Banda Aceh memang terasa kurang bila belum berkunjung ke situs PLTD Apung. Kapal PLTD Apung ini sebelumnya digunakan untuk mengatasi kekurangan arus listrik di Banda Aceh. Namun, dipengujung tahun 2004 tsunami menerjang

Aceh. Gelombang raksasa mendermamparkan kapal pembangkit arus listrik ini ke daratan.

Wisatawan sangat antusias karena melihat kapal besar yang terbuat dari besi ini bisa terdampar sejauh kurang lebih 5 km dari pelabuhan Ulee Lheu karena peristiwa Tsunami 2004 silam. Banyak yang berfoto dan juga melihat-lihat sisi dari kapal PLTD Apung ini. Jika kapal PLTD Apung seperti ini Museum yang menceritakan bagaimana kejadian Tsunami dengan cara menampilkan video dan juga foto-foto yang dipajang disekitar dinding-dinding kapal yang besar tersebut. Berdasarkan observasi banyak spot foto yang bisa diabadikan. Contohnya monumen ombak buatan dan juga tentunya foto yang backgroundnya Kapal PLTD Apung ini. Tempat ini merupakan destinasi wisata yang menarik setelah pascatsunami 2006 lalu.

### **I. Kuburan Massal Ulee Lheu**

Kuburan Massal Ulee Lheu merupakan salah satu kuburan massal korban tsunami Aceh pada tahun 2006 yang silam. Kuburan massal ini terletak tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh menuju pelabuhan Ulee Lheu, tepatnya di Jalan Pocut Baren Nomor 30. Pada tempat ini terdapat lahan rumput yang cukup luas, dimana didalamnyaterdapat ribuan jasad korban tsunami Aceh. Korban-korban tersebut dikuburkan tanpa pusara atau nisannya di atasnya, karena memang sulit untuk mengenali satu persatu korban tsunami pada saat itu. Hanya terdapat penanda semacam tiang bertuliskan lokasi kuburan anak-anak atau kuburan dewasa saja.

Tidak jauh dari makam tersebut kurang lebih sekitar 50 meter, masih di dalam kompleks kuburan massal, terdapat bekas gedung RSUD Meuraxa. Bekas gedung ini biasa digunakan oleh para peziarah untuk berdoa. Saat ini RSUD Meuraxa telah dipindahkan ke kawasan Mibo, Jalan Soekarno Hatta-

Banda Aceh. Dipintu gerbang kuburan massal ini terdapat tulisan yang di ambildari salah satu surat dalam Al-Quran, yakni: "Tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan" (Al-Anbiya, 35). Selain kuburan massal Ulee Lheu, terdapat pula beberapa kuburan massal

lainnya, diantaranya adalah kuburan massal Lhoknga (Aceh Besar) dan kuburan massal Sironyang terdapat di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kuburan-kuburan massal ini biasanya dipadati oleh peziarah pada saat-saat menjelang perayaan Idul Fitri setiap tahunnya.



### **m. Kapal Tsunami Lampulo**

Bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu membawa kapalseberat 20 ton ini tersangkut di atas rumah penduduk di kawasan gampong Lampulo, tepatnya di atas rumah keluarga Misbah dan Abassiah. Kapal dengan panjang 25 meter dan lebar 5,5 meter ini terbuat dari kayu. Bagian bawah kapal dicat warna hitam, sedangkan badan kapal tampak telah dicat kembali dengan cat minyak berwarna perak. Beberapa bagian di dinding kapal terlihat mulai lapuk dimakan usia. Bagi para pengunjung keberadaan kapal ini tentu saja akan mengingatkan pada kekuasaan Sang Pencipta. Untuk memudahkan pengunjung melihat bagian atas kapal, dibangun tanggadatar setinggi lima meter. Seluruh bangunan ini berwarna abu-abu. Dari atas sini dapat dengan leluasa melihat bagian dalam kapal dan juga rumah-rumah penduduk disekitarnya. Di bawah kita akan menemukan sebuah plakat dalam tiga bahasa; Aceh, Indonesia dan Inggris. Plakat ini dirancang oleh tim Bustanussalatin dan bantuan *recovery* Aceh-Nias Trust Fund BRR. Di atas plakat ada tulisan "Kapal ini dihempas oleh gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 hingga tersangkut di rumah ini. Kapal ini menjadi bukti penting betapa dahsyatnya musibah tsunami tersebut. Berkat kapal ini 59 orang terselamatkan pada kejadian itu".

### **n. Pantai Ulee Lheu**

Tempat wisata yang satu ini hanya berjarak 3 km dari pusat kota Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Meuraxa. Kegiatan yang paling populer di pantai ini adalah memancing. Apabila pengunjung tidak membawa alat pancing, terdapat pedagang yang menjualnya di sekitar pantai. Selain memancing, bisa juga menyewaperahu nelayan untuk berlayar di laut atau duduk santai ditepi pantai menikmati jagung bakar. Dari pantai bisa melihat barisan pegunungan di seberang yang menambah keindahan Pantai Ulee Lheu.

Berdasarkan pengalaman penulis, pantai ini sangat indah dinikmati ketika sore hari tiba. Pada sore hari angin begitu segar dan juga membuat pikiran sedikit tenang jika dinikmati memandang laut yang luas pula. Ketika kita bersantai dipinggir pantai juga sambil menikmati jagung bakar dan eskelapa muda. Harga untuk menikmati itu semua berkisar 10 ribu sampai 20 ribu saja jika seorang diri.

### **o. Taman Pusat Kuliner REX**

Rex peunayong merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang wajib dikunjungi bagi andayang senang berwisata kuliner. Tempat yang menyediakan berbagai menu

masakan, makanan, dan minuman khas aceh dan umum. Berdasarkan hasil observasi, disini banyak sekali makanan yang dapat kita nikmati. Misalnya, mie ayam jamur, nasi goreng, mie goreng, bakso, nasi goreng, mie tiaw, mpek-mpek, dan juga aneka minuman seperti jus, teh hijau, dan yang lainnya. Di pusat kuliner ini juga setiap hari ada selaluran makanan, selalu saja ada pengunjung untuk menikmati kuliner di kota Banda Aceh ini. Ini dikarenakan di sekitar sini banyak hotel dan juga ada banyak pusat oleh-oleh. Jadi setelah para pengunjung makan, mereka yang berwisata juga pasti akan mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang.

### **Amenitas (Prasarana pendukung pengembangan wisata syariah: jumlah hotel, resto/kuliner)**

Jumlah hotel dan jasa akomodasi di Kota Banda Aceh terus bertambah seiring banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh. Hingga akhir tahun 2017, di Kota Banda Aceh tercatat 69 usaha akomodasi yang terdiri dari 10 hotel bintang, 30 hotel melati, dan 16 jasa akomodasi lainnya. Dari sepuluh hotel bintang, satu diantaranya merupakan hotel bintang empat, empat diantaranya merupakan hotel bintang tiga, dan lima lainnya merupakan hotel bintang dua. Namun, sebagian besar hotel di Aceh belum memiliki label/sertifikasi sebagai hotel syariah, meskipun dalam pelayanannya sudah menerapkan prinsip syariah. Misalnya jika ada dua orang dengan jenis kelamin berbeda akan diminta surat/buku nikah bila akan menginap, tersedia petunjuk arah kiblat di setiap kamar, sajadah, dan lain-lain. Sebagai Daerah yang memberlakukan syariat Islam sudah selayaknya Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh juga melakukan sertifikasi produk yang Halal di wilayahnya.

Sejak bulan Oktober 2014 di launching program sertifikasi Halal oleh Kantor Lembaga Pemeriksa & Pengawas Obat & Makanan, Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh dan memberikan promosi pembiayaan gratis bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal diantaranya permohonan sertifikasi halal restoran dan catering. Sosialisasi juga terus ditingkatkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan mengajak para pedagang untuk menjual makanan yang halal, baik dan bersih atau halal dan thayyib.

Beberapa Restoran yang terkenal di Banda Aceh yang sudah terdaftar dalam web TripAdvisor, diantaranya: Solong

Coffee, Warung Kopi Solong, La Piazza, Canai Mamak, Mie Razali, Sate Matang D" Wan, Joel"s Bungalows and Restaurant, Rumah Makan Spesifik Aceh, Banda Seafood, Imperial Kitchen Country Steak House, Warung Makan Hasan 3 (Cabang Kreung Cut), Pizza Hut, Tanabata Coffee, Thousand Hills Ketambe, Soup Sumsum Kutaraja, Restoran Kartika, Menara Bambu Cafe, Kentucky Fried Cafe, Rumah Makan Asia, Nasi Gurih Fakinah, Restoran Aceh Barat, Rumah Makan Aceh Rasa Utama, Oasis Lobby Lounge, Caswells Coffee, Mie Ramen Akira, Tropicana, Texas Chicken, PP Cafe & Restaurant, Rendesuou Restaurant, Tanabata, Ramayana Baksi Batoh, Kopi Beurawe, RM Kurnia Dewi, Pizza Corner, Rumah Makan Garuda, RM Narita, RM Edy Putra, RMCindy Baru, Joglo Cafe, RMAceh Setia.

Berdasarkan data terbaru dari MPU Aceh, ada 143 restoran, cafe dan makananyang sudah disertifikasi halal dan masa aktifnya berlangsung sampai 5 tahun kedepan. Dalam mendukung pengembangan wisata syariah, jika dilihat dari sarana ibadah yang tersedia di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebanyak 290 buah terdiri dari 104 Mesjid, 87 Meunasah/Masjid kecil dan 99 Musholla. (sumber: (BPSProv Aceh, 2017).

### **Aksesibilitas (Transportasi, Penerbangan, Informasi)**

Akses menuju Aceh dapat ditempuh dengan transportasi darat, laut maupun udara. Melalui Provinsi Sumatera Utara terdapat banyak sekali bus umum dengan frekuensi keberangkatan dan *Class of Service* yang bervariasi mulai dari Economic Class sampai dengan Super VIP kondisi jalan sepanjang Provinsi Aceh sangat baik dan nyaman dilalui. Berikut penjelasannya:

d. Kondisi Jalan

Kondisi jalan menjadi faktor pendukung pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Berdasarkan data BPSProvinsi Aceh (2013) panjang jalan di Banda Aceh sebesar 27,41 KM, dimana menurut kondisi jalan 25,38 KM dalam kondisi baik, 2,03 KM dalam kondisi sedang, dan tidak ada jalan dalam kondisi rusak.

Pada saat penelitian dilakukan sebagian besar jalan raya di Kota Banda Aceh masih tetap dalam kondisi fisik yang cukup baik dengan penerangan lampu dan rambu lalu lintas yang cukup jelas.

#### **b. Transportasi darat**

Di Bandara Sultan Iskandar Muda telah tersedia Taksi dengan tarif resmi. Yang disebut taksi di Aceh bukanlah taksi seperti Bluebird atau Express melainkan kendaraan SUV seperti Avanza, APV dan merk SUV lainnya. Ta

rif Taxiberbeda-beda sesuaitempattujuan(lihatgambar).*Labi-labi*  
atauangkotdi Acehhanya  
beroperasisampaijam6sore,selanjutnyabisanaikbecakmotor,  
sesuaitarifperdaRp.3.000,-  
/km.KotaBandaAcehsebagaiibukotaprovinsi  
Acehsaatinijugamemilikikarakteristikpermasalahan transportasi  
perkotaan  
yangsemakin kompleks.Pertumbuhanpopulasikendaraanpribadiyang  
tinggi telah menimbulkan persoalan bagi kelestarian/keasrian  
lingkungan kota.

Angkutanpublikberupaangkutanperkotaanyang  
pernahmenjadiandalan masyarakat kian hari semakin  
ditinggalkan.Halini disebabkanpelayananyang  
tidakdisesuaikandenganperkembangan  
kondisiekonomidanteknologisaatini.Kondisidanpersoalantransporta  
sidi Kota Banda Acehharussesegera mungkindiatasi.Apabila  
tidak,kondisiiniakan  
menjadipermasalahanbesardanrumitdansemakinsulit dipecahkan.  
PertimbanganutamadalampereencanaantransportasiperkotaanKotaB  
anda Aceh adalah mengefektifkan fungsi dari angkutan umum agar  
pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.  
Perencanaan koridor dilakukan dengan dengan meminimumkan  
jarak dan waktu tempuh perjalanan, penyediaan  
prasaranahalte dansarana  
busyangmemberirasaamandannyamanbagi pengguna.

Perencanaankoridor untukangkutanmassalKotaBanda  
Acehdan sekitarnya  
dilakukandenganmempertimbangkanjugaruasjalaneksistingyang  
dapatdilaluiuntukmengaksesarea CBD (*CentralBusinessDistrict*)  
dengan mengintegrasikanpelabuhanandanbandarudara serta pusat-  
pusataktivitaslainnya mengacu  
padaRencanaTataRuangWilayah.Berdasarkanhasilstudiliteratur,  
diperoleh informasibahwapengembangankoridor angkutan  
massalkotaBanda Acehdansekitaryaterbagiatas4(empat) koridor  
utamaantara lainkoridor1: PelabuhanUleeLheue-  
TerminalAPKKeudah-Bandara SIM,Koridor2: TerminalAPKKeudah-  
Darussalam,Koridor3:TerminalAPKKeudah-Mata le, Koridor 4:  
Terminal APK Keudah-Lhoknga(Dishubkomintel, 2015).  
Pertumbuhan transportasi diKotaBandaAceh masih tergolongkecil.

Faktor penyebab tumbuhnyatransportasiinidiantaranya  
bertambahnyamahasiswabarunya. Sehingga Dinas  
PerhubunganKomunikasidan InformasiKotaBanda Acehpada tahun  
2015mengadakanBusTransKoetaraja yang  
diperuntukkanbagipelajar/mahasiswa  
dengantarifmurahdanmembangun haltegunamenunjangbustersebut.  
Belumtersediafasilitastransportasidarat yang  
khususdiperuntukkanbagiwisatawandengantarifmurahataugratissemis

al shuttle bus pariwisata yang menghubungkan antar atraksi wisata di Aceh, sehingga memudahkan aksesibilitas wisata wandalammenjangkausetiapdestinasi yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Namun, keterhubungan antar moda di Banda Aceh telah tersedia pelayanan Angkutan Pemandu Moda/ bandara pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, dimana operator pelaksana nya adalah Perum Damri. Jenis angkutan ini merupakan salah satu akses yang mudah untuk keluar dan masuk bandar dari titik-titik simpul di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

### c. Transportasi Udara

Transportasi melalui udara didukung oleh Bandara Internasional yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda. Tidak kurang dari 6 perusahaan Penerbangan yaitu Garuda Indonesia Airlines, Lion Air, NBA, FireFly Airlines, Susi Air dan Air Asia Airlines. Bandara Sultan Iskandar Muda adalah bandara terbesar di Provinsi Aceh. Bandara ini melayani rute dalam dan luar negeri. Apabila melihat tabel disamping maka terlihat bahwa dari jumlah pesawat, penumpang, dan barang yang diangkut lebih besar dibanding bandara lainnya.

Jumlah penerbangan pada tahun 2016 mencapai 8.956 penerbangan, terdiri dari 7.371 penerbangan domestik atau sebesar 82,30 persen dan 1.585 penerbangan diantaranya merupakan penerbangan internasional atau sebesar 17,70 persen. Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Mei 2016 yang mencapai 98.075 orang. Sebanyak 83.499 orang diantaranya merupakan penumpang penerbangan domestik dan 98.075 orang merupakan penumpang penerbangan internasional. Jumlah penumpang penerbangan domestik terendah terdapat pada bulan Maret 2016 sebanyak 49.426 orang, pada penerbangan internasional paling rendah terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 9.415 orang. (sumber: (Statistik Transportasi Udara dan Laut Provinsi Aceh, 2016)).

### Dampak Pariwisata di Kota Banda Aceh

Naiknya angka kunjungan ke Banda Aceh, telah meningkatkan perekonomian warga dan menghidupkan industri kreatif masyarakat. Disbudpar Banda Aceh terus membenahi sektor pariwisata untuk menggenjot kunjungan lebih banyak lagi. Bahkan gencar melakukan promosi potensi wisata lewat

berbagaievendandmedia.AndalanpariwisataBanda  
Acehadalahsitustsunami, sejarah, budaya, bahari, dan kuliner.

Sektor pariwisata merupakansektoryangpotensialuntukdikembangkan sebagaisalahsatusumberpendapatandaerah.Usahamemperbesarpen-  
dapatan aslidaerah,maka  
programpengembangandanpendayagunaansumber dayadan  
potensipariwisata daerah diharapkan dapatmemberikan sumbangan  
bagi  
pembangunanekonomi.Perkembanganpariwisatajugamendorong  
dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata  
menciptakan permintaan,baikkonsumsimaupuninvestasiyang  
padagilirannyaakan menimbulkankegiatanproduksibarang  
danjasa.Selamaberwisata,wisatawan akan melakukan belanjanya,  
sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism  
Final Demand*)pasarbarangdan jasa. Selanjutnya final demand  
wisatawansecara  
tidaklangsungmenimbulkanpermintaanakanbarang modal dan  
bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk berproduksi  
memenuhipermintaanwisatawanakanbarang dan  
jasatersebut.Dalamusaha  
memenuhipermintaanwisatawandiperlukaninvestasidibidang  
transportasidan komunikasi,perhotelan dan akomodasi lain,  
industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa,  
rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20).

Dampakpositifsosialbudayapengembanganpariwisatadapatdili-  
hatdariadanya pelestarianbudaya-  
budayamasyarakatlokalsepertikegiatankeagamaan,  
adatistiadat,dantradisi,danditerimanyapengembanganobjekwisata  
dan kedatanganwisatawanoleh masyarakatlokal.  
Sedangkandampaknegatifsosial budayapengembanganpariwisata  
dilihat dari respon masyarakatlokalterhadap keberadaan pariwisata  
seperti adanya perselisihanataukonflikkepentingandi  
antaraparastakeholders,kebenciandanpenolakan  
terhadappengembangan pariwisata,danmunculnyamasalah-masalah  
sosial seperti praktek perjudian, prostitusidan penyalahgunaan  
seks(*sexualabuse*).

Apabilamelihatdampaknegatif  
daripariwisatasebagaimayang telah diuraikan diatas,maka wajar  
bila sebagian masyarakatdiAceh agakkeberatan  
terhadappengembanganpariwisata.Sebagaimuslimyang  
taatdalammenjalankan  
syariatIslam,masyarakatAcehakan selalumenjaga daerahnya  
darikegiatan- kegiatanyangbertentangan dengan syariatIslam.

Dalam pandanganbeberapakelompok masyarakat,kegiatan  
pariwisata kebanyakanbertentangdengansyariatIslam.Walaupun  
tidakseluruhnyabenar,  
namunpandangantersebutpadaakhirnyamembawa

dampak bagi pengembangan pariwisata di Aceh. Adanya sikap sebagian masyarakat yang menganggap pengembangan pariwisata bertentangan dengan syariat Islam pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua terutama para pembuat kebijakan pariwisata di Aceh. Untuk mengantisipasi yang diperlukan adanya perubahan strategi dalam pengembangan pariwisata di Aceh.

Salah satunya adalah menempatkan masyarakat bukan sebagai objek wisata yang selama ini terjadi, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek pariwisata. Dengan demikian masyarakat dalam menjalankan kegiatan pariwisata, tidak hanya berkewajiban melayani wisatawan – sebagaimana yang selama ini didengungkan oleh slogan sapa pesona, bahwa masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan – melainkan juga mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan mengenai hal-hal apa yang menjadi bagian budayanya yang dapat dikonsumsi wisatawan, dan juga masyarakat dapat berperan aktif menjadi kontrol aktivitas pariwisata yang terjadi, termasuk menciptakan program-program paket wisata beserta sarana pendukungnya.

### **Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Pariwisata**

Dinas Pariwisata Provinsi Aceh sekarang melakukan promosi ke berbagai negara-negara di luar Indonesia dengan cara membuka booth di acara-acara tertentu untuk menjual Wisata yang ada di Aceh. Pemerintah provinsi mulai dari *Branding*, *Advertising* dan *Selling*. Ada empat pilar pembangunan kepariwisataan yang harus diperhatikan dalam rangka memajukan kepariwisataan di Aceh, yaitu destinasi atau daerah tujuan, pemasaran, industri dan kelembagaan. Dipilar destinasi, melakukan perencanaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Dipilar pemasaran melakukan *promoting*, *image branding*, dan *selling* pariwisata. Di pilar industri melakukan bagaimana mendorong dan membangun segala ragam usaha kuliner, souvenir, restoran, hotel, travel, pemandu wisata dan sebagainya. Pemerintah Aceh akan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga dan kemitraan.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan kepariwisataan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal di seluruh tanah air. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk

memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui kepariwisataan. Untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Selanjutnya peraturan tersebut dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Huruf c konsideran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Rumusan arah kepariwisataan yang lebih operasional tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menerangkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya,
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, dan
- d. Kelangsungan usaha wisata.

Pada pasal selanjutnya dikemukakan bahwa lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a) Industri Pariwisata,
- b) destinasi Pariwisata,
- c) Pemasaran dan
- d) Kelembagaan Kepariwisata.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan,
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan



lokal,

c)

Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas,

d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup

e) Memberdayakan masyarakat setempat,

f) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan,

g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dan iudankesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan

h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar kondisi yang

mendukung penyelenggaraan kepariwisataan dapat

terlaksana, maka pembangunan kepariwisataan di daerah

dilakukan berdasarkan Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang

diatur dengan Peraturan Daerah. Dari sini dapat diketahui

bersama bahwa

daerah memiliki kewenangan pula dalam menyelenggarakan

kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk

pembangunan Kepariwisata Daerah. Demikian pula halnya dengan

Provinsi Aceh, serta Kota Banda Aceh, sebagai daerah yang memiliki

beberapa keistimewaan, maka kebijakan kepariwisataan dimaksud

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi

keistimewaan Provinsi Aceh yang diberikan berdasarkan Undang-

undang Nomor 44 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Undan

g-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengakui ada 4

(empat) keistimewaan Provinsi Aceh:

a) Penyelenggaraan kehidupan beragama,

b) Penyelenggaraan kehidupan adat,

c) Penyelenggaraan kehidupan pendidikan, dan

d) Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama di Provinsi Aceh diwujudkan dalam

bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara pada

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.

Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah yang

memiliki otonomi khusus, setelah adanya Undang-undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kekhususan dan pengaturannya yang berbeda dalam pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 membuka kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh disesuaikan dengan sistem adat dan budayanya. Maka lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lebih lanjut sesuai dengan perkembangan politik lokal, maka UU No. 18 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 165 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 memberi kewenangan kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mengelola wisata dan pengelolaan kepariwisataan, dimana menurut undang-undang tersebut selanjutnya akan diatur dengan Qanun, istilah peraturan perundangan bagi wilayah Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi ruang atau wadah bagi keistimewaan Aceh untuk dapat diaktualisasi kembali. Karenanya, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan di provinsi Aceh harus dilihat dalam kerangka wilayah kekhususannya. Sehingga kebijakan-kebijakan kepariwisataan dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan satu sama lain (antar kebijakan pusat dan daerah).

Otonominya dapat diwujudkan melalui desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya (pemerintah pusat) kepada daerah (pemerintah daerah) menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi tidak lain bertujuan untuk memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri.

Rencana induk pengembangan kepariwisataan secara nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah harus menyiapkan rencana induk penyelenggaraan kepariwisataan di daerahnya, tidak hanya peraturan daerah yang mengatur tentang distribusi, izin usaha pariwisata, dan retribusi tempat rekreasi.

Konsep penyelenggaraan pariwisata yang baru harus melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (baik pusat dan daerah), serta harus melaksanakan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing. Arahan tujuan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Undang-undang

No10Tahun2009

mengalamiorientasiyangberbedatajamapabiladibandingkanUndang-Undang No9 Tahun 1990. Penyelenggaraan kepariwisataanbukan lagi memperkenalkan, mendayagunakan,melestarikandan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapuskemiskinan, mengatasi pengangguran. Pembangunan kepariwisataan selain melestarikan alam, lingkungan,dansumberdaya,jugamemajukankebudayaan,mengangka tcitrabangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuanbangsa,danmempereratpersahabatanantarbangsa.

Dengandemikian,penyelenggaraandan pengeloan usaha pariwisataatau tidakmauharusdiurisdandikelolasecara profesional.Halinimemerlukan peraturan-peraturandaerahyang memuatdanmengaturpengurusandan pengelolaankepariwisataanmengarahpada usaha kepariwisataanyangbermutu dansesuai denganstandaryangsudah ditetapkan.peraturan-peraturandaerah dibuatdalamusahauntukmeningkatkanpertumbuhanekonomi ataumenghapus kemiskinan, denganmemberikanperspektifbagipengembanganduniausaha pariwisata, tidak hanyamengejarrestribusisemata.

### **PeraturanKepariwisataandi Banda Aceh**

AcehadalahdaerahProvinsiayang merupakankesatuanmasyarakathukum yang bersifatistimewadandiberikewenangankhususuntukmengaturdan mengurussendiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakat setempat sesuaidengan peraturanperundang-undangandalamsistemdanprinsipNegara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945,yangdipimpin oleh seoranggubernur.

Dalamrangka pelaksanaanNotaKesepahaman antara PemerintahRepublik IndonesiadanGerakanAcehMerdeka(*Memorandumof Understanding Between TheGovernmentofRepublicofIndonesia andTheFreeAcehMovement*,Helsinki15

Agustus2005),Pemerintah RepublikIndonesiadanGerakanAcehMerdeka menegaskankomitmenmereka untukmenyelesaikankonflikAcehsecara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untukmenciptakankondisisehinggaPemerintahanRakyatAcehdapatdi iwujudkan melaluisuatuprosesyangdemokratisdanadildalamNegaraKesatuanRe publik Indonesia.Kekayaan potensi alam, budaya, sejarah, dan kekhususan yang dimiliki AcehmerupakananugerahAllahyang mempunyai.fungsidanperananpenting bagi kehidupan masyarakat dan wilayah Aceh.

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi: mensyukuri nikmat Allah SWT, meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani, menambah pengetahuan dan pengalaman, dan membangun jiwa kewirausahaan.

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan: iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat, budaya dan kearifan lokal. Penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya.

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan : melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islamise sebagai daya tarik wisata, memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Usaha pariwisata digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) usaha jasa pariwisata, (b) perusahaan objek dan daya tarik wisata, dan (c) usaha sarana pariwisata. Selain itu, Pemerintah Aceh berwenang menetapkan usaha pariwisata lainnya.

#### Pengembangan Usaha

Pariwisata Aceh ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Jasa Pariwisata meliputi: jasa wisata syariat, jasa biro perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, jasa makanan dan minuman, jasa penyediaan komoditas, jasa spa, dan jasa wisata kesehatan.

Objek dan daya tarik wisata di Aceh digolongkan berdasarkan jenis dan pemanfaatannya. Objek dan

dayatarikwisataciptaanAllahyang berwujud alam, flora, danfauna.Objek

dandayatarikwisatahasilkaryamanusiasepertimuseum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro,wisata tirta,wisataburu,wisatapetualanganalam,tamanrekreasidantempatbiuran danselainobjekdandayatarik wisatatersebut,PemerintahAcehdapatpula menetapkan objek dan dayatarik wisatalainnya.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, adat-istiadat, sertakearifan lokal, kehidupan ekonomi dan sosial budaya,kelestarian budayadan mutu lingkungan hidup, dan kelangsungan usahapariwisata.

Pengelola hotel berbintangberkewajiban:

- 1)Memberi kenyamanan kepadatamuhotel.
- 2)Memberilaporansingkattentangpenghuniankamarsecaraberkalase tiap 3(tiga) bulankepadagubernurmelaluiinstansiyang menanganibidang kepariwisataan Aceh.
- 3)Memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaanapabiladibutuhkan.
- 4)Menjagadanmencegahpenggunaanhotelberbintangdarikegiatan yangdapat mengganggu keamanan dan ketertiban umumsertamelanggar syariat Islam.
- 5)Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkanstandarisidansertifikasikompetensi.

6)Memeliharahigienis dansanitasi dalam hotel dan lingkungan pekarangannya.

7)Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan padatempatyangmudah dilihat dan dibacaoleh tamu hotel.

8) Melampirkan perubahan persetujuan prinsip dan izin usaha pada setiap perubahannamaataupemindahtangananpemilikhotelberbintang.

9)Masyarakat,tokohadat,danulamamemilikikesempatan yangsamadan seluas- luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh. Peransertamasyarakattersebut berupapemberiansaran,pertimbangan, pendapat,tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperanaktifdalampengelolaanobjekwisataserta pengawasan penyelenggaraankepariwisataanAceh.

Masyarakatdapatmembentukkelompok-kelompokmasyarakatpariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.Kelompok masyarakat wisata dibina oleh Instansi yang menangani bidangkepariwisataan.Kelompokmasyarakatpariwisatayang dibentuksecararesmi, dapatmelaksanakansegalakegiatanpariwisatadidaerahnyasesuaiden

gansyariat

Islam. Kelompok masyarakat pariwisata berperan sert dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan

pengembangan pariwisata Aceh. Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan masyarakat berupa:

- 1) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi.
- 3) Menerbitkan lisensi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata.
- 4)

Melaksanakan pengembangan dan pemantapan kelembagaan pariwisata.

Tugas pembinaan tenaga kerja

pada sektor pariwisata termasuk pendataan,

dan pengembangan SDM bidang pariwisata. Perlindungan tenaga kerja sesuai dengan standar dan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Aceh berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di bidang pariwisata termasuk melaksanakan pendidikan, pelatihan serta menghimbau usaha pariwisata untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Pemerintah Aceh berkewajiban mendidik, memberdayakan dan mengeluarkan lisensi pramuwisata serta memantau keberadaannya dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah Aceh berkewajiban membina asosiasi dan lembaga pariwisata di Aceh. Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan masyarakat berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Aceh serta pengembangan lembaga pariwisata Aceh.

### **Larangan di Tempat-Tempat Wisata**

Sesuai dengan qanun Aceh, di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya.
- b. Melakukan perbuatan asusila.
- c. Berjudi/maisir, dan/atau
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Ketentuan lainnya bagi wisatawan yang datang ke Aceh terkait dengan syariat Islam antara

lain: bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam, pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk

melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi, setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

### **Ketentuan Pidana**

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usahar wisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Fatwa terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata di Aceh**

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melaksanakan Kegiatan Sidang Paripurna keIV pada bulan Mei 2014, dibuka oleh Ketua MPU Aceh Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam dan diikuti oleh 44 orang peserta, terdiri dari Pimpinan dan Anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan provinsi dan utusan Kabupaten/Kota se-Aceh. Agenda Sidang Paripurna adalah mengenai "Pariwisata dalam Pandangan Islam". Dalam rumusan Keputusan Sidang/Fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh, disampaikan poin-poin keputusan tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam, yaitu:

#### **Pertama: Fatwa**

- Satu : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- Dua : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan hukumnya haram.
- Tiga : Pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemashlahatan hukumnya mubah (boleh).

#### **Kedua : Taushiyah**

- Satu : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pembangunan pariwisata di Aceh.
- Dua : Pemerintah Aceh diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam bersama lembaga dan instansi terkait.
- Tiga : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.
- 

Empat : Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.

- Lima: Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan SDM pemandu wisata profesional yang memahami syariat kearifan local.
- Enam: Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah dan negara-negara muslim.
- Tujuh: Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.
- Delapan : Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
- Sembilan: Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai syariat islam yang telah tertulis di undang-undang MPU Aceh

### **Strategi Pengembangan Wisata Syariah**

Dari hasil FGD dan wawancara selama penelitian, penggunaan istilah “wisata syariah” masih belum ada jelas batasannya. Ini dapat mempersulit Banda Aceh untuk melakukan promosi karena target pasarnya nantinya jatuh ke wisatawan muslim saja. Sebaiknya konsep wisata membuat wisatawan merasa “wel come” di destinasi wisata. Fokus syariah di dalam masyarakat Aceh sendiri sulit diterima, karena hal tersebut berarti hukum syariah yang berlaku dan diterapkan sehingga masih ada ketakutan sendiri di masyarakat apalagi wisatawan. Label syariah bukan hanya sekedar kata tetapi maknanya sangat dalam.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara, pemakaian kata “halal” menjadi pilihan utama pada branding pariwisata Banda Aceh. Tetapi pada pemerintahan sekarang, dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sendiri sudah tidak takut untuk menggunakan kata “syariah” karena sudah adanya kemajuan mengenai pariwisata syariah melalui sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat maupun stakeholder yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi untuk “wisata syariah” itu sendiri dari tempat Daya Tarik Wisata sudah ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan pembenahan untuk menjadi layak dan sesuai dengan syariat islam. Dan syariah ini dimulai dari kehalalan produk makanan hingga sarana/fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Banda Aceh sudah memiliki kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti :

1. Daya tarik wisata
2. Hotel
3. Restoran dan Cafe
4. Biro Perjalanan Wisata
5. Pramuwisata



## 6.Spa

Dari indikator tersebut, dalam FGD menyimpulkan bahwa Banda Aceh mempunyai potensi yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah karena mempunyai daya tarik wisata yang cukup beragam, baik dari *Nature Based* (Pantai Ulee Lheu, Pantai Ujung Batee, Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga), *Culture Based* (Rumah Cut Nyak Dhien, Mesjid Raya Baiturrahman, Makam Sultan Iskandar Muda, Mesjid Baiturrahman Ulee Lheu, Taman Putro Phang, Gunongan, Kawasan Kuliner Peunayong) maupun *Man Made Based* (Kuburan Massal, Replika pesawat selawah di Blang Padang, Tamansari Bustanussalatin, Museum Rumoh Aceh, Museum Tsunami Aceh, Kapal Apung Lampulo, Kapal PLTD Apung).

Potensi besar dari daya tarik wisata ini telah didukung dengan ketersediaan amenitas muslim *friendly* seperti tempat ibadah di masing-masing daya tarik wisata. Wisatawan muslim tidak terlalu sulit untuk menemukan tempat ibadah (sholat) selama melakukan aktivitas wisata di Banda Aceh. Tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dalam menerapkan konsep syariah dalam pariwisata Banda Aceh, di antaranya sarana prasarana wisata yang mendukung syariah tidak jelas. Misalnya di tepi pantai masih menyediakan kursi yang berduasaja, padahal jika memakaikan konsep syaria' ada aturan yang melarang orang yang tidak muhri matau lain jenis kelamin untuk berdua-duaan.

Dari aspek kesiapan masyarakat dan fasilitas pendukung masih menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Banda Aceh. Sangat berbeda dengan kondisi pariwisata di Bali, di sana mereka melihat wisatawan asing menggunakan pakaian minim seperti bikini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Berbanding jauh dengan di Banda Aceh, itu menjadi "tontonan" dan membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Di Banda Aceh masih ada dari tokoh masyarakat yang menolak konsep pariwisata, karena menurut mereka kata "wisata" identik dengan maksiat sehingga mereka lebih memilih kata "liburan" atau "rekreasi" yang identik dengan mengisi waktu luang dengan keluarga.

Berdasarkan hasil diskusi, sejauh ini aksesibilitas di Aceh baru tersedia dua direct flight penerbangan internasional dari Malaysia yaitu Air Asia dan Firefly. Jadwal penerbangan 4 kali dalam seminggu dari Kuala Lumpur dengan Air Asia, dan 3 kali dalam seminggu dari Pulau Penang dengan menggunakan Firefly. Demikian pula kondisi ketersediaan infrastruktur dan jalan juga sudah cukup baik. Kendala aksesibilitas masih ditemui di

dayatarikwisataalam.Penerbangan domestikdenganGaruda Airlineshanya memilikijadwalpenerbangandua kali dalam sehari.

Aksesibilitas dari segiketersediaan informasidapatdiperoleh melaluimedia internet yang disediakan baik oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha wisata.Pemerintahdaerahmenyediakan websitayang memberikaninformasi tempat-tempat wisata seperti: bandaacehkota.go.id, bandaacehtourism.com. Sementara itudapat ditemuijuga darisitussitusinternetlainnyaseperti acehexplorer.com,inbandaaceh.com, danjugadariakun-akuninstagramseperti@bandaacehtoursim,@infobandaaceh,@kotabandaaceh.Darisitubisa mengetahui informasi mengenai BandaAceh dan jugapariwisatanya.

Pada umumnya ketersediaanakomodasipada sebagian besar hotelndan tempat menginap lainnyadi Aceh sudahmenerapkan konsep syariah baik dari segi produk,pelayanan,danpengelolaannya.Darisegiproduk,misalnya toilethotel sudahtersedia penyekatanantar bilikdanmenyediakanairmengalirselaissue; padasetiapkamardihampirsebagianbesarhotelsudahmenyediakanhajadah, arahkiblat,tidaktersedia aksespornografi,tidaktersediaaminumanberalkoholdi minibarsetiapkamar,dll.Darisegipelayanandiantaranya melakukanseleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, tidak ada fasilitas hiburan yang mengarahkepadapornografi/asusila,dll.Darisegipengelolaan,diantar anyaseluruhkaryawan dan karyawatimemakaiseraagayang sopan,karyawatipada umumnya menggunakan jilbab, dll. Namun, Sebagaimana tercantum dalam PermenParekrafNo.2 tahun2014 tentangPedomanPenyelenggaraan Usaha HotelSyariah,seluruhhotelyangadadiAcehbelummemperolehsertifikatHilal1maupunHilal2. Sehingga,dalamakomodasiyang mendukung wisatasyariah masih memerlukan standardisasi yang jelas dan sosialisasi kebijakan dalam Permentersebut.Kendala dalampenyediaanakomodasiyaknialitasdan pelayanan(*hospitality*)yangmasih belum maksimal.

Untukusaha spa,darihasilFGD,menyatakanbahwapraktikspadi BandaAcehsecara khusus sudahadadimembuka usaha spa,adayangmenyatu denganhoteldanadajugadengansalon.Kondisisalonyang adadiAcehpada umumnyaamemang sudahkhususdiperuntukkanhanyauntukmuslimah,sekarangjugasudahbanyaktempatrelaxxy untukpriadanwanita.Contohnya seperti Vivi Spadan jugaBellezaRelaxxy.

Secara umum, restoran dan penyedia jasa makanan minuman di Aceh dalampengolahanpenyajiannyasudah menerapkanprinsiphalal.Namun, berdasarkan hasil diskusi perlu dikaji kembali mengenai pemotongan hewan

ternak seperti ayam yang masih belum sepenuhnya menggunakan konteks islami/halal. Menurut peserta FGD mengenai standardisasi label halal pada produk makanan dan minuman dinyatakan belum siap. Perlu dibuat suatu standard yang menjadi pedoman bagi restoran dan penyedia jasa makanan/minuman di Aceh. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan sosialisasi dari hulu ke hilir mengenai produk makanan yang terjamin halal.

Kondisi pramuwisata yang sudah tersertifikasi sudah ada sekitar 100 orang dan sebagian besar adalah muslim. Di Aceh, secara umum belum terdapat BPW (*tours and travel*) yang mengkhususkan penyediaan paket wisata syariah. Karena menurut HPI, daya tarik wisata yang ada di Aceh sudah mencerminkan konsep islami. Bahkan daftar akomodasi dan restoran sudah ada yang sesuai kriteria syariah. Untuk pramuwisata juga belum terdapat pramuwisata (*tour guide*) yang khusus untuk melayani tamu atau wisatawan muslim. Sayangnya masih ditemukan pramuwisata/*driver* yang tidak mencerminkan sikap islami, contohnya pada waktu sholat mereka tidak ikut sholat. Sehingga, masih banyak yang perlu dibenahi lagi pada BPW dan pramuwisata yang ada di Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, BPW yang ada di Banda Aceh masih jarang yang menjual pariwisata di Banda Aceh, BPW di sana banyak menjual umroh atau haji ke tanah suci. Nah, saya meneliti di Aceh Great Wall tour dan travel. BPW ini menjual pariwisata di Aceh. Pemilik dari BPW ini turun langsung mendampingi para wisatawan ke tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh. Kebanyakan wisatawan mancanegara yang mengikuti paket travel yang dijual seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Aceh Great Wall juga mendukung penuh untuk memajukan wisata syariah di Banda Aceh dengan memesan hotel dan membawakan restoran yang sudah bersertifikasi halal.

Pemberlakuan Aceh menetapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan sejak tahun 2000. Pemberlakuan syariat Islam hanya khusus diberlakukan untuk warga muslim. Pasca penetapan syariat Islam banyak pantai yang ditutup untuk wisata karena dikhawatirkan dapat merusak akidah, sebagai contoh kawasan pantai di Aceh Barat.

Dalam konteks pariwisata, belum ada PERDA khusus yang mengatur wisata syariah di Aceh, akan tetapi program dan aktivitas wisata syariah sudah dikembangkan seperti paket wisata kurban Idul Adha, paket wisata Ramadhan, ziarah ke masjid dan makam, dll. Demikian pula kebijakan khusus "halal" dalam pariwisata, karena selama

ini di Aceh masih dalam konteks produk makanan dan obat saja. Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini untuk pariwisata ingin memajukan Wisata Syariah yang gemilang. Konteks halal maupun syariah sudah ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Namun label "halal" dapat menjadi hal yang sensitif di kalangan pelaku usaha atau masyarakat, karena dalam persepsi mereka halal maupun syaria sudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka akan mengukur SDM yang melakukan penilaian halal. Sertifikasi halal di Aceh diperoleh melalui Majelis Permusyawaratan Umat (MPU). Dalam proses sertifikasi hotel, restoran dan penyedia jasa makanan minuman masih terkendala aspek kesehatan. Masih ditemukan kurangnya kontrol pada proses penjagaan hewan yang tidak menggunakan cara islami. Selama ini MPU lebih banyak memberikan label halal hanya pada produk kemasan seperti kopidan dendeng sapi buatan Aceh. Pembiayaan sertifikasi halal pada tahun ini gratis. Dan MPU Aceh lebih tegas lagi agar seluruh pemilik usaha makanan dan minuman ikut agar disertifikasi.

Untuk sekarang, jika ingin melakukan sertifikasi halal baik untuk hotel, restoran, cafe dan juga makanan itu dipermudah karena pihak MPU Aceh tidak memungut biaya. Jadi untuk seluruh pelaku usaha wisata di Banda Aceh, diharapkan untuk mengikuti sertifikasi halal yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya di Banda Aceh.

### C. Propinsi Lampung

Propinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II, yaitu nama baru dari Branti, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - Barat berada antara : 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur Utara - Selatan berada antara : 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan

Etnis Lampung yang biasa disebut (Ulun Lampung, Orang Lampung) secara tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh provinsi

Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komeriing Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komeriing Ilir, Merpas di sebelah selatan Bengkulu serta Cikoneng di pantai barat Banten. Pengantin dari suku Lampung. Kedua Mempelai merupakan Pengantin dari Suku Lampung Marga Sungkai Bungamayang. Siger adalah Mahkota Wanita Pengantin Suku Lampung yang sangat umum digunakan.

Asal-usul ulun Lampung (orang Lampung) erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Pada abad ke VII orang di negeri Cina sudah membicarakan suatu wilayah di daerah Selatan (Namphang) dimana terdapat kerajaan yang disebut Tolang Pohwang, To berarti orang dan Lang Pohwang adalah Lampung. nama Tolang, Po'hwang berarti "orang Lampung" atau "utusan dari Lampung" yang datang dari negeri Cina sampai abad ke 7. Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga abad ke-11. Dalam kronik Tai-ping-huan-yu-chi dari abad kelima Masehi, disebutkan nama-nama negeri di kawasan Nan-hai (Laut Selatan), antara lain dua buah negeri yang disebutkan berurutan: To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebut satu kali, tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri ini mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466. Gabriel Ferrand (1918) berpendapat bahwa kedua nama itu mungkin hanya satu nama: To-lang-po-hwang, lalu negeri itu dilokasikan Ferrand di daerah Tulangbawang, Lampung. Purbatjaraka (1952) menyetujui kemungkinan adanya kerajaan Tulangbawang, meskipun diingatkannya bahwa anggapan itu semata-mata karena menyatukan dua toponimi dalam kronik Cina.

### **Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, masing masing terdiri dari:

- a) Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
- b) Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
- c) Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
- d) Melinting Tiyyuh Pitu (Lampung Timur)
- e) Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
- f) Pitu Kepuhyangan Komeriing (Provinsi Sumatera Selatan)
- g) Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)
- h) Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
- i) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

### **Masyarakat adat Lampung Pepadun**

- a. Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari: Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b. Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
- d. WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
- e. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

Falsafah Hidup Ulun Lampung termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu:

- a. Piil-Pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri)
- b. Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya)
- c. Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu)
- d. Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis)
- e. Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya)

Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan 'lima kembang penghias sigor' pada lambang Provinsi Lampung. Sifat-sifat orang Lampung tersebut juga diungkapkan dalam adi-adi (pantun):

Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri

Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi

Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi

Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi.

Dalam pengelolaan pariwisata secara umum perlu dipahami masalah aksesibilitas dan amenitas. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada

kemudahan bagi penderita cacat untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik ke atas angkutan umum. Dalam Kamus Bahasa Inggris Wojoyasito (1991:2) mengatakan bahwa *accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. Bambang Sutantono (2004:1) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.”

Sedangkan amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. Sebagai salah satu elemen pendukung dalam *destination mix*, amenitas menjadi penting karena berperan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan yang tidak disediakan oleh akomodasi selama berwisata, seperti kebutuhan makan, hiburan, ibadah, kesehatan, dan lain-lain, ketika menikmati daya tarik wisata (atraksi) dan aktivitas dengan memanfaatkan aksesibilitas yang ada. Adapun objek wisata di Propinsi Lampung dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **a. Lampung Utara**

##### **1. Air terjun curup paten**

Air terjun ini berada di Desa Suka Menanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Di lokasi ini wisatawan dapat menikmati keindahan air terjun yang meluncur dari ketinggian sekitar 4 meter. Curup Paten memiliki tiga tingkatan air terjun. Di kawasan wisata tirta yang satu ini wisatawan dapat bersantai dan bermain air. Udara sejuk yang berasal dari pepohonan sekitar air terjun dijamin mampu membuat wisatawan berlama-lama di sini. Air Terjun Curup Paten biasanya ramai dikunjungi pada hari libur dan hari Minggu. Untuk menambah kenyamanan pengunjung, pengelola mulai membangun beberapa fasilitas, seperti tempat mandi untuk membasahi tubuh setelah bermain di air terjun.

Untuk menuju Air Terjun Curup Paten dapat ditempuh dari Kota Bumi sekitar 40 kilometer. Perjalanan ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau carteran. Wisatawan akan disambut dengan gemuruh air terjun yang diiringi dengan suara dedaunan yang tertiuang angin. Lokasinya terletak di Desa Suka Menanti, Kecamatan Bukit Kemuning dengan jarak tempuh dari Kota Bumi kurang lebih sekitar 40 km. Biaya yang dikenakan juga cukup murah yaitu berkisar Rp 3000 untuk setiap orangnya.

##### **2. Air Terjun Wai Rarem**

Bendungan Way Rarem di Kecamatan Abung pekuran yang merupakan bendungan pertama di Lampung, akan menjadi andalan bagi Kabupaten Lampung Utara guna menarik wisatawan lokal maupun

mancanegara karena bendungan yang lebih dari 20 tahun itu, saat ini tengah di promosikan sebagai Taman Wisata dan tempat Budidaya Ikan Tawar. Pemerintah Lampung Utara dalam memperkenalkan atau mempromosikan wisata tersebut, dilakukan baik dengan cara pameran wisata maupun dari bidang lainnya yaitu olah raga. Sebagai langkah awal pemerintah setempat dalam mengkobinsasikan wisata dan olahraga, dengan menggelar pelantikan kepengurusan KONI setempat di lokasi wisata Bendungan Way Rarem. Dengan adanya hal semacam ini, diharapkan sehingga masyarakat setempat dapat menikmati imbas dari adanya kegiatan itu. Selain menguntungkan masyarakat setempat karena dapat menciptakan penghasilan baru juga dapat menciptakan silaturahmi dan kegiatan semacam itu dapat berimbas positif terhadap kemajuan suatu daerah.

## **b Lampung Barat**

### **1. Terpadu Lumbok Ranau**

Sepanjang perjalanan menuju Kawasan **Wisata Terpadu** Seminung Lumbok Resort Anda akan menjumpai hamparan kebun sayur-mayur khas pegunungan, seperti tomat, kol, wortel. Juga melewati perkebunan kopi rakyat dan areal persawahan. Di tepi danau saat ini telah dibangun *shelter* untuk bersantai, dermaga bagi wisatawan yang ingin menyewa perahu untuk berkeliling danau dan mandi air panas (hot spring) yang letaknya tidak jauh dari lokasi resort. Bagi pengunjung yang membawa anak-anak, telah dipersiapkan arena bermain anak seperti komidi putar, bianglala, dll.

**Seminung Lumbok Resort** berada di Pekon Lumbok, Kecamatan Sukau, sekitar 27 Km dari Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Resort ini menawarkan panorama alam danau, Bukit Barisan, dan Gunung Seminung yang mempesona. Di pagi hari, kita bisa menikmati keindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung masih berbalut kabut. Dari balik jendela kamar hotel Seminung, kita dapat menyaksikan *jukung*, perahu tradisional unik khas Lampung Barat yang hilir mudik memberi makan ikan di keramba. Saat mentari mulai meninggi, kita dapat mengelilingi kompleks Seminung Lumbok Resort menggunakan sepeda atau sepeda motor. Menyaksikan hamparan sawah menghijau di tepian danau sambil menghirup udara sangat alami dan bebas polusi. Kita juga dapat menyaksikan aktivitas masyarakat *Pekon* (desa) Lumbok, seperti bercocok tanam, gotong royong, dan keunikan khas budaya Lampung Barat. Bahkan bagi wisatawan yang gemar jogging sambil menghirup udara bersih pegunungan, tersedia jungle track hingga ke air terjun terdekat.

Bagi wisatawan penggemar olah raga dirgantara, ada fasilitas paralayang. Titik terbang (*take off*) berada di ketinggian 1000 m dpl, bisa ditempuh sekitar 15 menit. Dari ketinggian itu kita dapat menyaksikan panorama bawah dengan latar ketenangan Danau Ranau. Sedangkan jika anda yang menggemari air, wisatawan dapat berenang, menyelam di danau dan memanah ikan. Atau sewa perahu motor untuk berkeliling. Bila hobi mancing, bisa memancing ikan nila dan ikan mas yang



terkenal *tabokh* (gurih). Ikan hasil tangkapan bisa diserahkan pada koki hotel untuk dimasak dengan bumbu tradisional. Kalau tidak mendapat ikan, bisa membeli ikan petani keramba di sepanjang tepian danau.

Menjelang senja adalah kesempatan untuk memotret sunset dan panorama Gunung Seminung berwarna kuning keemasan tertimpa cahaya senja sang mentari. Keindahan senja itu oleh para penyair dalam gubahan terkenal *Seminung ti kala dibi* (Seminung di kala senja). Malamnya anda bisa menikmati segelas kopi asli Lampung atau bandrek untuk menghangatkan badan di kafe. Kafe-kafe ini sederhana dengan sajian kerlip lampu nelayan menebar jala di tengah danau. Sayup-sayup terdengar alunan *Sekhedam* (seruling tradisional khas Lampung Barat) mengalunkan lagu sendu. Kita akan terbuai dengan suasana syahdu hingga terlelap di keheningan malam. Seminung Lumbok Resort memiliki fasilitas cukup lengkap, juga melengkapi fasilitas yang diperuntukkan bagi perusahaan yang akan mengadakan kegiatan rapat, seminar, meeting atau "*Team Building*" bagi karyawannya, pihak pengelola telah mempersiapkan fasilitas outbond lengkap dengan instruktur yang berpengalaman. Kelengkapan fasilitas kamar hotel pun tak luput dari perhatian pihak pengelola. Saat ini seluruh kamar telah dilengkapi dengan sarana standar hotel berbintang seperti tv, ac, dan kulkas. Selain hotel, terdapat dua buah cottage, hotel bersih dan asri ini dilengkapi dengan *convention hall* berkapasitas 400 orang, yang bisa divariasikan dengan gaya gedung pertunjukan (*theatre style*), model ruang kelas, gaya konferensi, gaya koktail, gaya pesta makan (*banquet*).

## 2. Danau Suoh

**Danau Suoh** terletak di kawasan wisata Suoh, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Lokasi wisata ini dapat ditempuh melalui Sukabumi-Suoh (Kecamatan Batu Brak), dengan jarak tempuh lima jam perjalanan dari ibukota Liwa atau melalui Sekincau. Akses menuju lokasi memang agak susah karena wilayah Kecamatan Suoh terisolir sehingga tidak ada pilihan transportasi selain kendaraan roda dua. Kondisi jalan menuju wisata alam ini berlumpur, licin serta pada beberapa titik jalan tampak rusak parah akibat erosi. Di Kawasan Wisata Suoh terdapat tiga buah danau yang terbentuk akibat musibah gempa Liwa 1994 yaitu Danau Lebar Suoh, Danau Minyak dan Danau Asam. diberi nama Danau Asam karena air di danau ini terasa asam. Sedangkan Danau Minyak disebut demikian karena pada permukaan air danau tampak seperti terdapat minyak yang mengambang. Namun karena paling luas diantara kedua danau lainnya, maka Danau Suoh lah yang banyak dipilih wisatawan untuk berlibur.

Bagi pecinta wisata alam, danau ini adalah pilihan tujuan wisata yang sangat tepat. Disini anda tidak saja disuguhkan pemandangan sejuk danau namun juga bisa mencoba serunya *offroad* serta melihat sumber panas bumi (geothermal). Selain sebagai tempat rekreasi, danau Suoh juga digunakan para nelayan untuk mencari ikan karena di dalam danau terdapat banyak jenis ikan air tawar diantaranya ikan jenis gabus, nila, betok, Udang, dan kepor (sejenis ikan tawas). Di area Danau Suoh

terdapat suatu tempat yang dinamakan Letusan, di lokasi ini pengunjung harus berhati-hati sebab apabila terlihat tanah tidak ditumbuhi oleh ilalang artinya panas bumi hampir mencapai permukaan tanah, dan kita dapat terperosok karena tanah menjadi lembut oleh panas bumi. Danau Suoh ramai dikunjungi wisatawan hanya pada hari-hari dan moment tertentu saja seperti Tahun Baru, dan hari-hari besar nasional. Mungkin disebabkan lokasinya masih susah diakses, namun perjuangan luar biasa untuk mencapainya akan terbayar saat kita sampai di daerah berketinggian 1.200 dpl (dari permukaan laut) dengan pesona keindahan alam yang luar biasa.

### **c. Lampung Timur**

#### **1. Taman Nasional Way Kambas**

Way Kambas adalah tempat pusat latihan gajah-gajah Sumatera dan merupakan pusat latihan gajah pertama di Indonesia. Di tempat ini gajah-gajah liar Sumatera dilatih dan dimanfaatkan untuk pertunjukan seperti permainan sepak bola, berenang, dan lain sebagainya. Pengunjung dapat menunggang gajah dengan didampingi.

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terletak di sebelah utara Lampung ini identik dengan gajah, walaupun sebetulnya taman nasional itu juga tempat hidup satwa langka seperti badak, harimau sumatera serta hewan langka lainnya. Taman Nasional yang sudah ditetapkan sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan dengan SK No. 670/Kpts-II/1999 itu merupakan taman nasional yang sudah terkenal ke mancanegara. Taman Nasional Way Kambas mempunyai luas 125.621,3 hektar dan secara administratif pemerintahan terletak di Kab. Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Temperatur udara 28° - 37° C. Curah hujan 2.500 - 3.000 mm/tahun. Ketinggian tempat 0 - 60 m. dpl. Letak geografis 4°37' - 5°15' LS, 106°32' - 106°52' B T. Taman Nasional Way Kambas merupakan perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan rawa air tawar, padang alang-alang/semak belukar, dan hutan pantai di Sumatera. Di Taman Nasional Way Kambas, kita bisa menikmati hal berikut ini yaitu atraksi gajah yang sudah terlatih. Atraksi yang bisa kita dilihat adalah atraksi gajah menari, sampai atraksi gajah dengan iringan musik, misalnya sepak bola gajah yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal, mengalungkan bunga, berjabat tangan, dan berenang. Jika mau, kita bisa menunggang gajah-gajah ini dengan membayar sejumlah uang tentunya. Gajah-gajah di taman nasional itu tidak berada dalam kehidupan liar yang sebenarnya karena mereka semua berada dalam program pelatihan gajah. Gajah-gajah yang masih liar dijinakkan dan dilatih di Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas. Pusat pelatihan ini didirikan untuk mengatasi masalah gajah liar yang kehidupannya terdesak karena habitatnya digunakan untuk ladang pertanian.

Selain pusat latihan gajah, taman nasional way kambas memiliki Suaka Rhino Sumatera (SRS) yang merupakan satu-satunya tempat pengembangbiakan satwa liar badak Sumatera di Indonesia. Bahkan SRS merupakan satu-satunya lokasi tempat pengembang biakan badak

Sumatera secara semi alami di Asia atau mungkin dunia. Namun kunjungan wisata alam di SRS sangat dibatasi karena untuk kepentingan penelitian dan pengembangan badak sumatera. Lokasi ini juga merupakan Proyek Penelitian Pembangunan Populasi Badak Sumatera di habitat aslinya serta penelitian Populasi Harimau Sumatera. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Tracking di hutan Rimba atau berperahu motor kehulu atau hilir sungai untuk mengamati Flora dan Fauna dengan dipandu petugas. Selain itu, jika berminat kita bisa mengelilingi Taman Nasional dengan menunggang gajah, tenang saja karena gajah – gajah tersebut sudah terlatih. Jika beruntung, kita bisa juga menjumpai berbagai satwa liar penghuni taman nasional way kambas. Namun, waktu terbaik untuk bisa melihat satwa – satwa liar itu adalah di pagi atau sore hari. Sedangkan jika di malam hari tentu sensasi dan pemandangan yang bisa dinikmati berbeda. Ketika malam hari, bisa melihat hewan yang aktif di malam hari, seperti babi hutan. Di Taman Nasional way kambas juga tersedia kios makanan yang menjual berbagai makanan dan minuman serta tentunya souvenir sebagai pertanda petualangan di Way Kambas. Fasilitas yang tersedia yaitu : musholla, parkir, pesanggrahan, arena atraksi, kios makanan dan cinderamata serta fasilitas umum lainnya.

#### **d. Lampung Tengah**

##### **1. Air Terjun Curup Tujuh**

**Curup Tujuh** merupakan **Air terjun dengan tujuh tingkatan**, dengan total ketinggian dari Curup satu hingga tujuh, mencapai 75m, menampilkan panorama alam yang cukup indah. Lokasi air terjun ini berada pada garis kawasan hutan lindung yang berada di desa Margajaya. Untuk mencapai lokasi ini dapat menggunakan kendaraan roda empat dan selanjutnya dengan motor Trail sewaan menuju batas hutan lindung dimana air terjun berada. Fasilitas yang ada hanya lokasi perkemahan dan kegiatan Pecinta Alam. Kunjungan yang disarankan ialah bagi pecinta alam dengan bantuan Kepala Desa setempat untuk perkemahan dan lain-lain.

**Lokasi Air Terjun** Curup Tujuh ini berjarak sekitar 135 km atau sejauh 2 jam perjalanan menggunakan mobil, dari Bandara Radin Intan. dengan menggunakan mobil pribadi dan selanjutnya dengan motor trail sewaan menuju batas hutan lindung register 39. Lokasi air terjun cocok buat pecinta wisata alam, yang jenuh dengan suasana kota. Air terjun curup tujuh ini relatif belum dikenal luas dan objek wisata Air Terjun Curup Tujuh terletak di Desa Margajaya Kec. Padang Ratu Lampung Tengah.

Butuh perjuangan ekstra tenaga agar bisa secara langsung bertatapan dengan Curup Tujuh. Kira-kira diperlukan waktu setengah jam perjalanan menggunakan roda dua dari kampung terakhir (Pekandangan dan Marga Jaya). Setelah itu, dilanjutkan dengan perjalanan kaki setapak demi setapak menaiki bukit di kawasan hutan lindung Register 39 dimana air terjun tersebut berada. Curup Satu merupakan aliran air terjun pertama dari total tujuh aliran yang berada di hulu Sungai Way Seputih, Lampung Tengah. Biasanya, tempat ini dijadikan persinggahan pertama bagi para pengunjung, menghimpun tenaga untuk track selanjutnya menuju

Curup tujuh. Perjalanan selanjutnya melintasi jalur hutan, itulah mengapa air terjun curup tidak terlihat mata secara langsung dari bawah atau dari perkampungan terakhir. Setelah menempuh perjalanan 'jungle track' selama kira-kira 15 menit dari Curup Satu, sampailah kita ke Curup Tujuh. Terjunan air setinggi kira-kira 30 meter, terlihat di depan mata, menggoda dengan percikan airnya. Jika sinar matahari yang memancar cukup, dari butir2 air terjun akan muncul lukisan pelangi, akan menambah keindahan suasana.

## **2. Danau Tirta Gangga**

Danau Tirta Gangga berada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Lampung atau sekitar 60 kilometer dari Kota Gunung Sugih dengan jalan hotmix. Di lokasi Objek wisata Danau Tirta Gangga Terdapat sebuah patung Bima yang sedang bertarung dengan Naga Nemburnawa (lakon Dewa Ruci dalam pe-wayangan).

Dikisahkan sang Bima diperintahkan oleh Guru Dorna untuk mencari Tirta Prawita Adi. Diakhir kisah, setelah mengalahkan sang naga, Bima malah bertemu dengan Dewa Ruci dan mengetahui bahwa Tirta Prawita Adi sebenarnya tidak ada dan perintah Dorna tersebut hanya merupakan siasat licik untuk menyingkirkan Bima. Potensi pengembangan untuk lokasi pariwisata ini adalah; pembuatan sarana hiburan, rumah makan dan agen perjalanan.

### **e. Way Kanan**

#### **1. Air Terjun Putri Malu**

Gemuruh air beririsan menetes dari ketinggian sekitar 100 meter di atas bukit. Air itu pun terhempas di antara bebatuan dan percikannya beterbangan membasahi lempang dan pepohonan di sekitarnya. Air terjun itu dalam bahasa Lampung (Sumatera) disebut Curup. Kesejukan alam Curup Putri Malu itu membuat semua terlihat damai.

Air Terjun Putri malu memiliki ketinggian  $\pm 80$  m. Air terjun ini jatuh ke bawah melengkung lembayung menyerupai punggung manusia yang sedang mandi, hal inilah yang mendasari curup ini dinamakan "Putri Malu". Air Terjun Putri Malu, itu kini menjadi salah satu objek wisata di wilayah Waykanan Provinsi Lampung. Udara yang sejuk menjadikan tempat itu cocok untuk petualangan alam, panjat tebing, kemah, atau sekadar menikmati keindahan alam bersama keluarga dan kerabat. Objek wisata ini berada di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kalau kebetulan Anda berada di jalur Lintas Sumatera, kendaraan dapat di arahkan ke persimpangan menuju SMUN 1 Baradatu. Air Terjun Putri Malu terletak di kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit yang berjarak sekitar 46 km dari Ibukota Kabupaten Blambangan Umpu. Air terjun itu terletak di ketinggian sekitar 100 m di atas permukaan laut.

Fasilitas seperti minuman juga disediakan di sejumlah warung ada yang menjual makanan ringan, seperti empek-empek (makanan khas Sumatra Selatan) dan jajanan lainnya. Empek-empek, makanan khas Palembang itu adalah makanan berbahan dasar sagu, kini juga populer di daerah Sumatera, termasuk Pulau Jawa. Biasanya, menyantap empek-empek dipadukan dengan kuah khusus, yang disebut cuka berwarna hitam kecoklatan, rasanya

pedas, manis dan asam. Air Terjun Putri Malu bisa menjadi obyek wisata alternatif berlibur bersama keluarga, bila Anda bosan mengunjungi tempat wisata kota misalnya. Pertimbangan memilih lokasi wisata ini, antara lain karena tempatnya tidak terlalu jauh dari perkampungan penduduk. Saat ini jalur menuju objek wisata Curup Putri Malu memang masih berupa jalan setapak. Namun kini prospek wisata Way Kanan ini mulai di kelola oleh dinas Pariwisata Way Kanan, Lampung.

## **2. Air Terjun Curup Gangsa**

Air terjun Curup Gangsa terletak di Dusun Tanjung Raja Desa Kota Way Kecamatan Kasui. Air terjun berasal dari patahan sungai Way Tangkas yang mengalir dari Bukit Punggur menuju Desa Tanjung Kurung dan Desa Lebak Peniangan.

Obyek Wisata ini dapat di capai dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan jarak tempuh 10 km dari Kecamatan Kasui atau 40 Km dari Blambangan Umpu, Ibukota Kabupaten Way Kanan. Air terjun ini bersumber dari patahan sungai Way Tangkas yang mengalir dari relung-relung punggung bukit punggur meliuk-liuk melalui dusun Tanjung Kurung Lebak Paniangan, dengan ketinggian mencapai 50 meter, sering di selimuti kabut dan belaian desir angin semilir berterbangan membawa embun yang sejuk menambah suasana semakin alami. Pada saat tengah malam dalam suasana sepi sering terdengar suara gemerincing bagaikan suara seluring Gangsa, konon dari suara inilah nama Curup gangsa oleh masyarakat sekitar menjadi nama objek wisata.

### **f. Pesawaran**

#### **1. Air Terjun Wiyono**

Bagi yang berjiwa petualang, Air Terjun Wiyono bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Wisata Air Terjun Wiyono terletak di Desa Wiyono, Gedong-tataan, Kabupaten Pesawaran, lokasinya sekitar 30 kilometer dari Bandarlampung. Air terjun ini kerap dikunjungi warga, khususnya pelajar yang melakukan perkemahan di sekitar air terjun itu.

Tempat ini adalah lokasi yang tidak terlalu jauh dari Bandar Lampung dan bisa menjadi tujuan wisata petualangan yang menarik untuk sekeluarga. Pemerintah Daerah, berencana mengembangkan potensi Wisata Alam Air Terjun Wiyono, berbasis komunitas agar dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dan melibatkan berbagai pihak di daerah tersebut. Berbasis komunitas, dimana semua pihak yang terkait harus memiliki kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan pengembangan objek wisata alam ini. Bagi para pecinta alam yang hobi berkemah, tempat ini sangat cocok dijadikan kawasan untuk berkemah. Sebab, keadaan alamnya masih sangat alami. Sejak dulu air terjun Wiyono sering dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah di Lampung. Umumnya, para pelajar yang sering mengunjungi air terjun ini dan sering mendirikan perkemahan di sekitar air terjun tersebut. Masyarakat berharap Pemkab Pesawaran dapat mem-percepat pengembangan Potensi wisata alam tersebut sebagai tujuan wisata domestik.

## 2. Taman Hutan Raya

Tahura Wan Abdul Rahman (luas: 22.249, 31 ha) adalah salah satu dari 14 Taman Hutan Raya di Indonesia. Dite-tapkan sebagai Tahura Wan Abdul Rahman berdasarkan SK Menhut No. 408/ Kpts-II/93 dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai UU No. 22 tahun 1999, PP No. 25 Th. 2000, Keputusan Menhut No. 107/Kpts-II/2003 serta Keputusan Gubernur Lampung No. 03 tahun 2003. Secara administratif Tahura Wan Abdul Rahman berada di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kedodong, Gedong Tataan dan Padang Cermin Kota Madya Bandar Lampung. Di dalam kawasan terdapat 4 (empat) buah gunung, yaitu: G. Rantai (1.671 m), G. Pesawar (661 m), G. Betung (1.240 m), dan G. Tangkit Ulu Padang Ratu (1.600 m). Memiliki ketinggian 1600 dpl dengan topografi yang bergelombang dan berbukit, sementara dipuncaknya adalah gunung betung, gunung pesawaran, gunung ratai dan gunung tangkit padang ratu, sementara sungai-sungai banyak bermuara disana, seperti sungai Way Semak, Way Padang Ratu dan Way Rati dan wilayah ini terdiri atas vegetasi hutan alam (37,06 %), belukar (25,90 %) alang-alang (3,5 %) dan kebun/ladang (32,76 %), dibagi menjadi dua blok pengelolaan yaitu blok perlindungan dengan luas 11.150 ha dan blok pemanfaatan seluas 11.099 ha. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung register 19 Gunung Betung dengan luas 22.249,31 Hektar, tetapi sesuai dengan potensi alam yang dimiliki, maka kawasan tersebut dikembangkan dengan fungsi antara lain sebagai tempat koleksi flora dan fauna alami, jenis asli maupun bukan asli, sebagai tempat untuk penelitian, pariwisata dan rekreasi, berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Vegetasi hutan di Tahura Wan Abdul Rahman memiliki tipe vegetasi hutan hujan tropis yang didominasi oleh Medang (*Litsea firmahoa*), Rasamala (*Altingia excelsa*), Merawan (*Hopea mengawan*) dan berbagai jenis anggrek, pakis dan rotan. Potensi fauna antara lain: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), Tapir (*Tapirus indicus*), Kambing hutan (*Nemorchaedus sumatrensis*), Rusa (*Cervus timorensis*) dan Beruang madu (*Helarector melayanus*). Potensi alam lainnya yang dapat menarik wisatawan adalah beberapa air terjun alami seperti Air terjun Sinar Tiga yang memiliki ketinggian 70 m dengan lebar 6 – 10 m, air terjun Gunung Minggu yang digunakan oleh pengunjung sebagai shower alam, air terjun Talang Rabun memiliki tinggi 30 m, air terjun Tanah Longsor 35 m, air terjun Penyairan 35 m, air terjun Bidadari 20 m dan air terjun Talang Mulya 30 m. Masih banyak air terjun di tahura WAR ini seperti air terjun Gunung Tanjung, Batu Lapis Mata Dewa, Pelangi, Batu Perahu, Kupu Jambu, Tawon, Way Awi, Way Ngeluh dan air terjun Sungai Langka. Sekitar 80 % luas hutan Tahura berada di Kabupaten Pesawaran, 15 km dari kota Bandarlampung. Terdapat 47 titik pemukiman di Tahura WAR. Sensus 2002 menunjukkan 23.489 KK tinggal di dalam hutan. Dinas Kehutanan telah membuat Master Plan pengembangan Tahura WAR, tinggal menunggu persetujuan dari Departemen Kehutanan. Obyek wisata alam yang memiliki daya tarik wisatawan adalah 5 (lima) buah air terjun.

## **g. Tanggamus**

### **1. Bendungan Batu Tegi**

Di Tanggamus, Lampung, terdapat Bendungan Batuteги dengan panorama yang sangat indah. Namun di balik keindahannya, bendungan ini menyimpan kisah pahit dalam pembangunannya yang menelan 13 korban jiwa. Bendungan Batuteги yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus ini, mulai dilirik oleh turis lokal dan mancanegara. Bendungan ini menarik perhatian karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Bandar Lampung. Selain bisa menikmati alamnya, kita juga bisa menyewa perahu yang tersedia di dermaga sekitar Bendungan Batuteги tersebut. Kita juga bisa memancing dan kalau beruntung traveler bisa membawa pulang berbagai jenis ikan yang hidup di bendungan ini, seperti ikan baung, gabus atau patin. Sementara kalau tidak mendapatkan hasil pancingan, traveler bisa membeli ikan di sekitar bendungan. Banyak penduduk sekitar bendungan yang menjual ikan. Yang menariknya lagi, di Bendungan Batuteги berdiri Monumen 13. Monumen ini dibuat untuk mengenang 13 korban jiwa saat pembangunan bendungan tersebut. Di monumen tersebut, juga dicantumkan 13 nama korban jiwa tersebut. Bendungan yang dibangun dengan dana APBN dan bantuan Japan Bank For International Cooperation (JBIC) itu, punya banyak fungsi untuk Provinsi Lampung. Selain berfungsi sebagai pembangkit listrik, bendungan ini juga menjadi penyedia bahan baku air minum untuk Kota Bandar Lampung, Metro, dan daerah Beranti di Kabupaten Lampung Selatan.

### **2. Teluk Kiluan**

Wisata alam pulau/Teluk Kiluan terletak di pekon (desa) Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Topografinya yang berbukit dan berlembah menarik untuk dijelajahi. Teluk Kiluan dijadikan getaway destination. Di sekitar pulau merupakan tempat ideal bagi aktivitas wisata air, seperti snorkeling, memancing, dan berperahu. Pulau Kiluan tidaklah luas namun memiliki pemandangan biorama sekitar yang eksotis. Jernihnya air laut yang hijau kebiruan sangatlah indah.

Di Pulau ini dapat melihat kumpulan lumba-lumba yang jumlahnya ratusan ekor. Setidaknya ada dua jenis lumba-lumba di perairan ini, spesies pertama adalah lumba-lumba hidung botol (*tursiops truncatus*) dengan badan yang lebih besar dan pemalu. Spesies yang kedua adalah lumba-lumba paruh panjang (*stenella longirostris*) yang bertubuh lebih kecil dan senang melompat.

Kumpulan lumba-lumba di Teluk Kiluan adalah yang terbesar di Asia. Wisatawan yang berminat menyaksikan dari dekat lumba-lumba di habitat aslinya bisa menyewa Perahu Katir. Jika beruntung, Wisatawan juga bisa menyaksikan penyu hijau, yang di waktu-waktu naik ke permukaan laut. Berkeliling pulau dengan Perahu Katir dapat menikmati pemandangan yang indah. Sore hari, bisa dilihat primata berbulu hitam dan bersuara nyaring saling bersahutan, yaitu siamang (*symphalangus syndactylus*) dan simpai

(*presbythis melalops*) serta kukang (*nycticebus coucang*) Jika beruntung, Wisatawan juga bisa menyaksikan penyu hijau (*chelonina mydas*) dan Penyu Sisik (*eretmochelys imbricate*), yang di waktu-waktu tertentu menepi ke pantai. Sebagian besar pantai di kawasan Lampung berpasir putih bersi).

Aksesibilitas obyek wisata Kiluan ini merupakan sebuah Teluk yang terletak kurang lebih 80 km dari kota Lampung atau sekitar 3-4 jam perjalanan menggunakan mobil. Jika dilihat dari jaraknya yang tidak terlalu jauh, sebenarnya waktu yang diperlukan tidak selama itu, namun berhubung beberapa kondisi jalan yang dilalui masih rusak dan berlubang-lubang, maka perjalananpun menjadi lebih lama. Pengunjung harus berhati-hati dalam berkendara karena jalan akses menuju desa kiluan banyak berlubang, terjal, dan anda harus melewati sungai kecil karena adanya jembatan yang sedang diperbaiki di Desa Kiluan. Pemandangan yang dilalui indah. Di sepanjang jalan dapat melihat hamparan sawah yang luas dengan pemandangan pohon-pohon kelapa yang berbaris rapi di tepi pantai yang dilalui. Pengunjung disarankan untuk tidak pergi atau pulang malam dari dan menuju Kiluan karena tidak adanya penerangan disepanjang jalan serta tikungan dan turunan tajam dengan kondisi badan jalan yang berlubang karena akan sangat membahayakan perjalanan pengunjung.

Amenitas kawasan wisata ini menawarkan berbagai daya tarik wisata laut, terutama wisata dolphin atau melihat kawanan ikan lumba-lumba hidung botol di habitatnya di laut lepas saat pagi hari. Namun keindahan objek wisata ini kurang didukung dengan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi kenyamanan pengunjung terutama jalan yang merupakan akses transportasi utama menuju tempat tersebut yang dinilai tidak memadai. Sejumlah wisatawan sangat menyayangkan masih minim fasilitas pendukung bagi mereka, saat mengunjungi objek wisata yang terkenal sebagai habitat alami lumba-lumba dan lokasi memancing Teluk Kiluan di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Sejak dibangun dan mulai dikunjungi wisatawan pada tahun 2007 lalu, sampai sekarang tempat tersebut belum menambah fasilitas pendukung terutama penginapan. Hotel di Teluk Kiluan sangat sedikit jumlahnya, homestay yang disewakan oleh penduduk setempat namun jumlahnya sangatlah terbatas, Harga sewa penginapan di Teluk kiluan berkisar Rp.200.000 / malam. dan kamar yang disewakan pun hanya berjumlah 4 kamar yang dapat dihuni oleh 5 sampai 7 orang. Ketersediaan toilet umum serta ketersediaan air tawar yang terbatas membuat para pengunjung yang usai melakukan snorkling, menyelam (diving) atau sekadar mandi di laut setempat, tidak dapat membas tubuh dengan air tawar sehingga menjadi tidak nyaman bagi tubuh mereka.

Selain itu, listrik yang digunakan adalah generator sederhana yang menerangi sangat terbatas, sinyal telepon genggam juga masih sulit didapatkan di tempat ini. Sejumlah wisatawan sangat menyayangkan masih minim fasilitas pendukung bagi mereka, saat mengunjungi objek wisata yang terkenal sebagai habitat alami lumba-lumba dan lokasi memancing Teluk Kiluan di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

#### **h. Tulang Bawang**



## 1. Bujuk Tenung

Kawasan rawa Bujuk Tenung di kota Menggala merupakan daerah rawa pasang surut yang menjadi tampungan air di musim hujan secara alami, sehingga musim hujan terlihat seperti danau yang sangat luas dan tentu saja pemandangannya sangat indah. Pada musim kemarau kawasan ini menjadi padang luas yang dilalui oleh berbagai jenis burung spesies langka di dunia dan dapat dijadikan untuk menggembala ternak masyarakat. Objek wisata ini berlokasi di jalan Lintas Timur Sumatera dan sebagian berada di trans Asean. Rawa ini juga dapat dijadikan sebagai objek wisata petualangan, berperahu, berkemah di pinggir sungai, memancing juga kegiatan wisata lainnya. Di atas sungai masyarakat juga memasang keramba ikan sebagai mata pencaharian. Untuk pengembangan di masa yang akan datang, Way Tulang Bawang dapat dijadikan sebagai arena olahraga rutin tahunan misalnya lomba perahu hias, lomba dayung, dan lomba memancing, disamping itu juga dapat dibangun rumah makan terapung dan pusat penjualan makanan khas serta souvenir Tulang Bawang.

## 2. Bawang Lambu

Bawang Lambu terletak di Kecamatan Pagar Dewa sekitar satu jam dari Kota Menggala adalah sebuah danau yang selain memiliki pemandangan indah (flora), juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian nelayan untuk mencari ikan, di danau ini pula terdapat 2 (dua) makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar, yaitu makam Menak Makdum dan Menak Melako yang konon menurut sejarah adalah kakak beradik dan merupakan keturunan Menak Indah (Tuan Rio Sanak) dari Panaragan. Selain itu pula terdapat beraneka ragam satwa burung dan ada seekor buaya yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar danau yang dipelihara oleh seorang warga setempat. Di Bawang Lambu ini aktivitas wisata yang dapat dilakukan adalah memancing, berperahu, berkemah, wisata petualangan, outbond, mencari jejak, menikmati pemandangan indah, dan beraneka jenis burung langka.

### i. Lampung Selatan

Penulis memiliki 5 (lima) destinasi pariwisata yang telah di observasi, dan melihat secara langsung bagaimana keadaan destinasi tersebut Serta sudah berjalan sempurna sesuai tujuan UU RI No 10 Tahun 2009 atau belum. Pada kesempatan kali ini penulis mengambil daerah Lampung selatan untuk di observasi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya yaitu karena waktu yang di miliki tidak begitu banyak dan kami memiliki jam perkuliahan setiap hari dan untuk mempermudah observasi kami mengambil kota kalianda, selain itu dikarenakan dikota ini terdapat banyak destinasi wisata alam yang unik tetapi banyak wisatawan yang belum tau.

## 1. Way Belerang Simpung

Belerang Simpung atau masyarakat sering menyebutnya pemandian way beleghang simpogh terletak di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Akses perjalanannya ini tidak begitu jauh dari jalan raya jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan baik itu

roda dua ataupun roda empat, namun jika ditempuh dengan jalan kaki cukup melelahkan karena jarak way belerang simpur dari jalan raya kurang lebih 8 km. Disini kita melalui 4 desa dari jalan raya, setelah didesa yang ke empat akan memasuki daerah perkebunan yang sangat banyak dikelilingi dengan perkebunan coklat. Akses perjalanannya sudah bagus, sudah dicor sehingga tidak begitu sulit untuk menuju kesana dan tidak begitu jauh. Setelah sampai disana dan membayar uang masuk barulah ini kita dituntut untuk sengat berhati-hati dan fokus terhadap apa yang kita lewati, mengapa demikian? Karena jalanan memang sudah di cor dan bagus, namun jalanan yang sangat kecil yaitu lebarnya kira-kira hanya 1 meter ditambah lagi turunan dan tanjakan serta tikungan. Itulah mengapa kita harus hati-hati, jika kita tidak begitu yakin penulis sarankan untuk memarkirkan motornya diatas saja dan selanjutnya berjalan kaki.

Walaupun jalanan yang suram dan menegangkan, hal itu tidak membuat jera wisatawan yang sudah mengetahui khasiat dan keunggulan destinasi pariwisata satu ini. Karena selain kita bisa menikmati keindahan alam, kita juga bisa relaksasi atau banyak orang menyebutnya SPA. Khasiat air belerang ini dapat menghilangkan berbagai penyakit kulit diantaranya kudis, kutu air, kaligata atau alergi, panu, kadas, kurap, dan penyakit kulit lainnya. Inilah keunggulan destinasi pariwisata alam satu ini, banyak orang yang tidak cocok dengan obat-obat medis dan herbal mereka berendam di blerang simpur ini menjadi sembuh. Itulah mengapa way belerang simpur jarang sekali sepi apalagi saat musim libur tiba, tidak hanya wisatawan didalam kota yang berkunjung merasakan khasiat belerang simpur tetapi juga wisatawan dari luar kota seperti dari jakarta, jawa, pernah berkunjung kesana.

Setelah penulis mengamati way belerang simpur ini, tidak begitu banyak memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan belum adanya kemajuan destinasi tersebut dan masyarakat juga belum terfikirkan untuk membuat inovasi hal-hal yang mampu menghasilkan uang dengan adanya destinasi ini. Namun ada jugawarga yang mengambil peluang kerja dengan adanya destinasi wisata ini seperti Ibu siti, beliau mengaku sudah puluhan tahun tinggal bersama suami dan satu orang anaknya. Walaupun lumayan jauh dari keramaian, mereka mengaku sudah terbiasa akan hal itu sehingga tidak begitu takut. Saat ditemui dikediamannya beliau menceritakan bahwa disinilah tambahan lahan rezeki mereka, karena dengan tinggal disini beliau mendapatkan lahan pekerjaan seperti menjual macam-macam blerang dari berkisar Rp 5000 sampai Rp 50.000 dan menyewakan gayung. Jika sedang ramai ibu siti dapat mengantongi hingga ratusan ribu rupiah, sedangkan jika sepi beliau tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini ditekuni ibu siti dengan harapan bisa membantu pemasukan dari suaminya yang kesehariannya hanya bekerja dibengkel, Ibu siti tidak sendiri ada juga seorang warga yang tinggal didekat rumahnya. Namun saat kami disana beliau sedang pergi jadi kami tidak sempat berbincang dengan beliau.

Selain ibu siti yang tinggal dan berdagang didaerah way belerang simpur salah satu warga didesa itu juga memiliki pekerjaan tambahan sebagai penjaga pintu masuk dan menjaga parkir di way belerang simpur. Roni (30), warga Desa Kecapi, adalah pekerja yang dipilih oleh bapak

lurah sebagai pekerja untuk menunggu pintu masuk way belerang simpur. Pengunjung yang menggunakan sepeda motor diminta biaya masuk Rp15.000. Sedangkan pengunjung yang menggunakan mobil diminta membayar Rp35.000.

Pemerintah sudah cukup berperan disini, sejak tahun 2010 akses perjalanan di way belerang simpur ini sudah dibenahi dan di cor selain itu disediakan juga musolah, tempat beristirahat, dan 2 kamar mandi. Hal ini disediakan pemerintah tidak lain untuk memikat wisatawan datang kesini dan memberikan efek nyaman, sehingga mereka selalu ingin datang-datang ke way belerang simpur. Selain itu pemerintah juga sudah melebelkan bahwa way belerang simpur adalah destinasi wisata alam yang berada dikalianda, itu terlihat jelas karena sudah ada plang yang bertuliskan wisata alam way belerang simpur.

Di daerah sekitar kawah juga sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, walaupun masih amat tergolong sederhana. Disana sudah tersedia lahan parkir, 2 kamar mandi, musolah, dan tempat istirahat. Selain itu tersedia juga aliran sungai sebagai tempat berendam wisatawan dan mandi, biasanya wisata lebih suka berendam dialiran sungai tersebut dibandingkan dikawahnya. Hal yang demikian dikarenakan air yang mengalir sudah tercampur dengan aliran air dari gunung yang dingin, sehingga air aliran sungai sudah terasa hangat dan lebih nikmat untuk berendam.

Masalah atau kendala yang dihadapi disini publikasi yang masih sangat minim, padahal potensi alam ini sangat bagus dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pemerintah jika mampu mengembangkannya secara optimal. Namun, kepedulian hal itu pun sepertinya sangat minim, seperti yang dikemukakan oleh Roni (30), warga Desa Kecapi, mengatakan objek wisata alam Way Belerang Simpung sudah lama ada. Namun, hingga kini belum dibangun Pemkab Lampung Selatan. Sebab, tempat pemandian itu masih alami karena hanya berupa kolam-kolam kecil yang dibuat oleh masyarakat.

## **2. Pantai Batu Kapal (Pantai Batu Guci)**

Pantai Batu Guci atau batu kapal terletak di Desa Maja, kecamatan Kalianda, Lampung selatan, Lampung. Pantai ini terletak dekat dengan pantai-pantai lainnya seperti pantai wartawan, pantai canti, pantai banding resort, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai pantai ini tidaklah susah, yaitu dengan menyusuri pesisir Kalianda, akses perjalanannya pun cukup baik dari pusat kalianda menuju pantai tersebut dan ditambah lagi disepanjang perjalanan akan naik turun gunung dengan pemandangan pohon kopi disekitarnya, kemudian terdapat plang berwarna cokelat di pintu masuk pantai.

Keunikan pantai yang berjarak sekitar lima kilometer dari pusat kota Kailanda ini terletak pada batu-batu karang besar serta legenda yang menjadi latar belakangnya. Pengelola Pantai Batu Guci, SH Rachman (54), mengatakan, zaman dahulu, pantai tersebut adalah dermaga yang menghubungkan antara Sumatera dan Jawa. "Pantai ini sebenarnya adalah pelabuhan, batu-batu karang yang berukuran panjang itu adalah dermaganya. Dan pesisir pantainya adalah sebuah desa tua," jelas Rachman. Asal mula Pantai Batu

Guci, sambung Rachman, konon karena ditemukan sebuah guci peninggalan pedagang di atas karang yang paling besar. "Tapi sekarang gucinya sudah tidak ada. Itu kata orang-orang zaman dahulu," imbuhnya. Versi lain, di Pantai Batu Guci, yakni si Pahit Lidah yang mengutuk kapal-kapal bangsa asing menjadi batu karang di tengah laut. "Legendanya, batu-batu karang yang ada di tengah laut itu dulunya adalah kapal-kapal bangsa asing pada zaman Majapahit. Si Pahit Lidah tidak menyukai itu lalu mengutuk mereka menjadi batu," katanya. Si Pahit Lidah adalah tokoh legenda di Sumatera yang memiliki kesaktian mampu mengubah apa pun yang dikutuknya menjadi batu. Menurut cerita, dia bernama asli Serunting, seorang pemuda asal jazirah Arab yang berkelana ke Sumatera dan masuk melalui Aceh.

Keistimewaan pantai ini juga, ada dua spot bermain yang bisa dipilih, yaitu spot pertama, seperti pantai-pantai lainnya, deburan ombak yang berkejaran. Sedangkan spot kedua yakni kolam renang alami yang berada di antara bebatuan karang dengan airnya yang jernih. Batu-batu karang tersebut seakan menjadi ceruk yang memerangkap air laut dan membentuk kolam berair jernih yang menampilkan pemandangan indah dasar pantai yang penuh dengan karang. Bila air surut, karang-karang itu seakan menjadi akuarium alami berisi ikan-ikan kecil yang terperangkap di dalamnya.

Tidak begitu banyak membawa dampak wisata alam ini karena masyarakatnya masih bekerja sesuai mata pencaharian mereka masing-masing seperti berkebun, nelayan, dan lain-lain.

Peran serta pemerintah sudah terlihat disini karena pemerintah memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh destinasi ini seperti akses perjalanan yang sudah bagus, toilet, musolah dll. Disini sudah tersedia fasilitas layaknya pantai-pantaitempat destinasi wisata seperti banana bod, gubuk-gubuk tempat istirahat, kantin, musolah, toilet, dan perahu-perahu kecil untuk menyebrang. Selain itu ada juga jasa parkir dengan tarif yang dikenakan juga cukup murah yaitu Rp 10.000. Disinilah kelemahannya, jalan dari plang menuju pantai adalah tanah yang dicampur dengan bebatuan dan ditambah lagi jika sehabis diguyur hujan makin licin dan sulit untuk melaluinya, selain itu fasilitas yang minim juga menjadi kelemahannya.

### **3. Air Terjun Way Kalam**

Air terjun Way Kalam tempat wisata yang terletak di Desa Way Kalam, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dari jalan raya kita akan berjalan terus memasuki sekitar 5 permukiman warga dan setelah didesa kelima barulah kita memasukin perkebunan warga, disitu kita melalui berbagai perkebunan diantaranya perkebunan coklat, kopi, lada dll. Disana jalanan yang menanjak dan berbelok-belok ditambah lagi bebatuan yang besar-besar menuntut kita untuk selalu waspada dan berhati-hati, jika tidak berhati-hati maka akan membahayakan keselamatan diri sendiri. Setelah mengendarai motor, kita dituntut untuk berjalan kaki yang akses perjalanannya cukup menantang seperti yang terlihat dibawah ini.

Pengalaman ini cukup menantang bagi pengunjung, karena jalan dilalui cukup sempit dan licin, sehingga perlu berhati-hati dalam perjalanan. Kami beruntung, saat kesana cuaca sedang tidak hujan. Karena jika hujan maka akan jauh lebih licin lagi. Perjalanan yang menempuh waktu 20 menit

ini cukup melelahkan kami, namun semua terbayar setelah kami melihat keindahan air terjun way kalam dengan ketinggian sekitar 30-50 meter, curahan Air Terjun Way Kalam yang deras menghujamkan tekanan yg kuat. Di dasar air terjun terdapat kolam bentukan alam dengan kedalaman setengah meter dan lebar kurang-lebih 5×5 meter. Ketika sampai di air terjun, Pemandangan Indah nan eksotis tersaji di depan mata. Curahan air terjun juga menantang untuk disiramkan ke badan dengan menahan hembasnya. Keunikan way kalam ini adalah panorama yang asri yang membuat kita penasaran untuk datang kesini, perjalanannya yang menantang dan semuanya terbayarkan setelah melihat air terjun way kalam, karena setelah sampai disambut gemuruh air terjun dan aroma alam yang khas serta dingin yang luar biasa.

Mungkin jika pariwisata alam air terjun way kalam ini hanya sedikit sekali masyarakat yang memanfaatkan kesempatan emas ini sebagai penunjang ekonomi keluarga, karena masyarakat belum mengerti bagaimana cara untuk menciptakan sebuah lapangan kerja dari adanya destinasi wisata disekitar mereka. Adapun setelah diteliti ada beberapa masyarakat yang mendapat lahan pekerjaan dengan adanya air terjun way kalam ini yaitu jasa parkir yang biasanya dipungut biaya Rp 20.000 per motor, selain itu ada juga masyarakat yang berjualan seperti rokok, makanan ringan, es, permen dan sebagainya.

Pemerintah belum begitu berperan di destinasi wisata alam yang satu ini karena terlihat tidak ada sumbangsih apa-apa yang ada di sana masih sangat alami. Sangat disayangkan, padahal potensi air terjun ini jika dikembangkan sangat bagus. Namun kepedulian pemerintah disini terlihat dari pengklaiman dan pelebelan nama wisata alam air terjun way kalam, yang terlihat di plang sebelum menuju air terjun way kalam. Fasilitas disini tidak begitu banyak, karena tadi penulis telah menyinggung bahwa kurangnya kepedulian pemerintah. Jadi penulis menyimpulkan hanya ada jasa parkir dan pemandu wisata alam. Kendalanya disini kurangnya kepedulian pemerintah terhadap destinasi wisatanya, sayang sekali jika memiliki potensi alam yang indah tetapi tidak bisa cara memanfaatkannya sehingga dibiarkan saja seperti itu.

#### **4. Gunung Rajabasa**

Gunung Rajabasa adalah gunung berapi dengan kerucut vulkanik yang terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatera, terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Akses perjalanannya dari kota kalianda menuju lokasi sudah bagus, karena sudah diaspal. Sedangkan saat mau naik keatas untuk menuju puncak gunung rajabasa yang ketinggiannya mencapai 1294 mdpl, pendaki membutuhkan waktu 7-8 jam melewati 4 pos peristirahatan. Daya tarik wisata di Gunung Rajabasa ini adalah:

- a. Adanya makam leluhur orang lampung selatan yaitu makam syeh mansyur yang dikeramatkan
- b. Terdapat hutan larangan yang pemandangannya indah nan eksotis
- c. Adanya batu cukup di puncak gunung bibir danau, selain itu ada juga batu yang membentuk seperti alqur'an terbuka dan batu nisan.

Dapat dikatakan tidak ada pengaruh bagi masyarakat terhadap wisata alam yang satu ini, karena saat ditemui dikediamannya, ibu siti yang bertempat tinggal didepan gunung rajabasa bahwa gunung rajabasa ini memang sudah disahkan sebagai wisata alam oleh pemerintah, tetapi sudah di sah kan didiamkan begitu saja bahkan sekarang akan dibangun pabrik ekplorasi panas bumi.

Pemerintah belum begitu berperan di destinasi wisata alam yang satu ini karena terlihat tidak ada sumbangsih apa-apa yang ada di sana masih sangat alami. Sangat disayangkan, padahal keunikan gunung rajabasa ini jika dikembangkan sangat bagus. Namun kepedulian pemerintah disini terlihat dari pengklaيمان dan pelebelan nama wisata alam gunung rajabasa, yang terlihat di plang sebelum menuju gunung rajabasa. Fasilitas disini tidak begitu banyak, karena tadi penulis telah menyinggung bahwa kurangnya kepedulian pemerintah. Jadi penulis menyimpulkan hanya ada jasa pemandu untuk menaiki gunung rajabasa.

Kendala nya disini kurangnya kepedulian pemerintah terhadap destinasi wisatanya, sayang sekali padahal gunung rajabasa ini memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata alam lainnya tetapi tidak bisa cara memanfaatkannya sehingga dibiarkan saja seperti itu.

## **5. Pantai Banding Resort**

Pantai Banding resort terletak di desa banding kecamatan rajabasa, perjalanan menuju banding resort dari pusat kota kalianda membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Disepanjang perjalanan menuju pantai banding resort mata pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan tepi pantai. Pantai-pantai yang dilewati diantaranya ada pantai canti, pantai munca indah, dan pantai batu kapal serta banyak tepi pantai lainnya yang terlihat namun tidak semua dijadikan objek wisata. Disepanjang perjalanan tepi pantai banyak nelayan-nelayan yang terlihat sedang mengumpulkan hasil laut sekaligus menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang tinggal disekitar tepi pantai. Sehingga tercium oleh indra aroma laut yang khas disepanjang perjalanan menuju kesana serta terdengar deburan ombak yang menghantam karang-karang serta dinding pembatas di tepi pantai.

Keunikan di pantai ini adalah ombak yang tidak terlalu besar sehingga bebas dan puas bermain disini tanpa harus memikirkan bahaya terbawa arus ombak, selain itu dari pantai banding resort dapat menikmati keindahan anak gunung krakatau. Aktivitas warga disini diantaranya sebagai jasa parkir yang dipungut berkisar Rp.15.000/orang dan selain itu masih banyak lagi masyarakat yang bekerja seperti sebagai pelayan kafe, restoran, dll.

Pemerintah sudah berperan di destinasi wisata alam yang satu ini karena terlihat dari sumbangsih yang diberikan yaitu fasilitas toilet, musolah, pondok-pondok tempat beristirahat dan paping-paping dipinggir pantai sebagai tempat agar tidak membuat jalanan longsor atau tanahnya semakin jatuh kepantai.

Fasilitas yang ada di pantai banding resort sudah mencukupi meskipun belum sepenuhnya terpenuhi, disana sudah tersedia cafe-cafe

tempat pengunjung menikmati kuliner, dan villa-villa yang biasa ditempati pengunjung dari luar daerah. Mungkin kendala dari destinasi wisata yang satu ini adalah kepedulian kebersihan, karena sangat disayangkan pantai yang cantik ini dipenuhi dengan sampah-sampah wisatawan, kepedulian wisatawan ini sangat menjadi masalah dalam wisata ini. Karena selain membuat pantai ini menjadi kumuh, pantai ini juga dapat menjadi rusak.

## **BAB V PEMBAHASAN**

### **A. Pola Umum Kebijakan Wisata di Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa industri pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu daerah. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi di saat ini.

Pariwisata yang mencakup nilai-nilai luhur dipertahankan menjadi suatu cita dalam suatu daerah. Perkembangan industri pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Di Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung, pariwisata telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi. Kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di bidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan daerah bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik, kebudayaan bangsa makin memperoleh apresiasi. Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung merupakan bangunan keanekaragaman budaya dan anugrah alam yang kayadan mempesona. Kekuatan lintas wilayah, suku, adat istiadat, ornamen kultural, tradisionalitas, rangkaian sejarah serta paduan eksotika alam yang elok harusnya menjadikan Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung sebagai destinasi wisata.

Selain sebagai potensi nasional, sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses

pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupukrasa citra tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan transaksi, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain.

Sebagai salah satu destinasi wisata, potensi untuk Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga *stakeholder* kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (*guide*), *tour operator*, akomodasi, restoran, *artshop*, *money changer*, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan berbagai jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga berbagai wisata minat khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk



menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan pilihan yaitu mengenai pariwisata. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

1. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi.
2. Urusan pemerintahan pilihan kabupaten/kota bidang pariwisata meliputi:

Tabel 17.

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Kepariwisata.

No	Sub Urusan	Kabupaten/Kota
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi inskreatif di Daerah kabupaten/kota a.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Sumber: data diolah, 2018

Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan pula pengertian kepariwisataan

adalah: “Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jatidiri dan kesatuan bangsa; dan memperlerat persahabatan antar bangsa”

Kebijakan pariwisata di Indonesia didasari secara filosofis didasari bahwa Pancasila adalah sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila memberi sebuah keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup hanya akan tercapai jika hidup itu sendiri didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakat dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan Tuhannya. Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena itu Pancasila pada dasarnya adalah ‘kepribadiannasional’. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia hidup dalam arti aktif, dinamis, kreatif. Karena itu Pancasila disebut sebagai landasan idiil bangsa Indonesia ke masa depan sesuai tuntutan zaman. Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak dapat disangkal, karena Pancasila adalah obyektifitas dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai suatu landasan idiil bagi kehidupan bangsa, karena itu Pancasila pada dasarnya adalah pusat nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati.

Pancasila juga menjadi ukuran baik buruk, indah-tidak indah, benar-salah terhadap kegiatan kenegaraan. Dalam pemahamannya yang demikian maka Pancasila sesungguhnya menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang secara utuh ke arah pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya ditujukan ke arah pembangunan material/materi atau lahiriah semata seperti peningkatan produksi pangan, perumahan, kesehatan, atau berbagai infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kemudahan hidup manusia sehari-hari. Demikian juga tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan batiniah yang mengutamakan pentingnya pendidikan, rasa aman, kebebasan berpendapat, keadilan dan sebagainya, melainkan dituntut adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Pada saat keberadaan Indonesia dijalur strategis lintasan arus deras kebudayaan dengan faktor-faktor positifnya seperti kemajuan-kemajuan; rasionalitas; disiplin profesionalitas; atau pun sisi-sisi negatifnya yaitu pengasingan jatidiri karena globalisasi yang melulu ekonomis dan hitungan harga manusia hanya diukur dari fungsi, sebagai alat atau alat dari ukuran kegunaan dan uang; maka di sanatantangan

untuk mencapai tata hidup bersama yang lebih merata dalam ketimpangan yang kaya semakin kayanya yang mempunyai kuasa ekonomi, politik dunia semakin meminggirkan yang tidak berdaya. Itulah prinsip keadilan dalam ekonomi; kebudayaan dalam hak-haknya dan kewajiban menjadi penentu sosialitas yang dibangun.

Inilah prinsip keadilan sosial baik untuk relasi antarkeberagaman dalam negara maupun relasi antar negara dalam menciptakan perdamaian dunia yang manusiawi karena saling menghormati dan harkat kemanusiaannya. Dengan kata lain: prinsip-prinsip dasar atau sila-sila Pancasila merupakan acuan, dasar dan sumber mata air pengembangan proses-proses kebudayaan bangsa Indonesia untuk dicari bahasa-bahasa hukumnya untuk ranah "tangible" kebudayaan dan bahasa dialog-dialog peradabannya untuk ranah-ranah yang tidak bisa dibahasakan hukum karena merupakan wilayah "ruh" atau "intangible" dari kebudayaan. Filosofi Pariwisata Indonesia didasarkan pada salah satu nilai-nilai agama, yang disebut "keseimbangan hidup" (disebut: tiga prinsip kebahagiaan) terdiri dari:

a) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan Tuhan,

b)

Hubungan *Balanced* antara manusia itu sendiri (individu dengan individu, individu dengan masyarakat, orang-orang dengan orang-orang),

c) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan filosofi ini, beberapa prinsip dasar pariwisata Indonesia yang disusun sebagai berikut:

a) Manusia (*people*) adalah pusat atau menjadi subyek pariwisata, bukan objek

b)

Semuanya orang (*tangible dan intangible*) dan hubungan antar orang-orang urusan kebudayaan. Pada dasarnya perkembangan mereka kreasi yang merangsang gerakan (perjalanan) dari orang-orang wisata budaya.

c) Orang (masyarakat) adalah kekuatan (*competitive advantage*) dari wisata budaya.

d) Pariwisata harus berbasis masyarakat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) *community-based tourism*.

e)

Mengambil manfaat (eksploitasi) dari budaya dan alam harus diimbangi dengan pelestarian dan konservasi budaya dan alam itu sendiri. Dengan kata lain; harus ada rasa kontrol diri atau tidak menjadi serakah (hanya mengeksploitasi) prinsip pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk mengenal kebudayaan dan polah hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu sarana untuk memulihkan

kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang. Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisata mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutulingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi 3, yaitu:

#### 1. Potensi Alam

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikannya yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

#### 2. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karya manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

#### 3. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tari/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

#### Kegiatan

pembangunan kepariwisataan, sebagai mana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan perandariseluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak

yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap perannya dan fungsinya masing-masing. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Gambar 1. dibawah ini menunjukkan keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dan kegiatan pembangunan kepariwisataan.

**Gambar 1.** keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan



Jabaran peranan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (*regulator*) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.
- 2) Kalangan Swasta (pelaku usaha/industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peranan fungsinya sebagai pengembang dan/atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;
- 3) Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuannya yang dimilikinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu dalam kerangka kegiatan pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus

memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai: “Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”. Definisi tersebut menegaskan posisi penting masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan; dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan, mengandung arti, bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.

**Sadar Wisata** dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

- a) Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
- b) Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

**Sapta Pesona**, sebagaimana disinggung di atas adalah: “7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan

untuk berkunjung". Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud adalah:

- 1) Aman
- 2) Tertib
- 3) Bersih
- 4) Sejuk
- 5) Indah
- 6) Ramah
- 7) Kenangan

Terwujudnya ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan di daerah akan bermuara pada:

- a. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi
- b. Tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat

Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.

Kegiatan bisnis pariwisata merupakan kegiatan multi-aspek, oleh karena itu pembahasan untuk dasar hukum kepariwisataan tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang hukum terkait. Kegiatan ini merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan serta eksistensi manusia itu sendiri. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak

asasi manusia *The Universal Declaration of Human Rights* memuat pernyataan sebagai berikut:

1) Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal didalam wilayah setiap negara (*everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state*) (Pasal 13 ayat 1)

2) Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk didalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu libur dengan tetap digaji

(*everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay*) (Pasal 24).

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatu hak yang sangat mendasar

atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat dan berlibur, sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM seperti yang dikemukakan dalam Pasal 2 *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: "*everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, with no distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*"

Komitmen negara Indonesia mengakui hak berwisata sebagai hak asasi manusia dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya UU Kepariwisata menegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b UU Kepariwisata) dan hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata merupakan hak setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) UU Kepariwisata. Refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada level konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah, refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Dasar bahwa Negara Indonesia 1945 tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambil-alihan secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara spasial, sektoral maupun struktural. Pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usah nasional beserta lembaga perencanaan dan dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelegaan kepariwisataan oleh daerah tersebut, tentu diperlukan



adanya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian manajemen pemerintah daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah dalam kaitan pemberian izin usaha oleh daerah diperlukan adanya suatu pedoman umum perizinan usaha pariwisata.

Izin merupakan sarana yuridis administratif yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh pihak yang memperoleh izin. Izin sebagai sarana yuridis dari pemerintah daerah pada hakikatnya ditetapkan untuk mengkonkritisasikan wewenang dengan beberapa tujuan (motif) tertentu yaitu:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
3. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
4. Hendak membagi-bagi bendaya sedikit; dan
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Penyelenggaraan kegiatan

usaha pariwisata dilakukan berdasarkan izin. Izin

usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. Sementara fungsi izin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu:

1. Bagi dunia usaha:
  - a. Sebagai dasar/bukti keabsahan menjalankan usaha;
  - b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
  - c. Meningkatkan citra produk wisata; dan
  - d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.
2. Bagi pemerintah daerah:
  - a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;
  - b.
    - Pengaturan lokasi usaha (tataruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya;
  - c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata; dan

d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/konsumen.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu stakeholder pembangunan pariwisata dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan di dalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Terkait dengan masuknya prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan kepariwisataan yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Karakteristik

transparansi atau keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serbaterbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana dan publik sampai pada tahap evaluasi, termasuk sektor pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengembangan pariwisata diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata nasional.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkan kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jatidiri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antar bangsa. Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isyu yang harus menjadi perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah "mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata".

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

nasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ketika kemudian telah ditetapkan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dari masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata, maka masalah berikutnya yang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalah penyelenggaraannya. aktivitas yang harus diatur di dalam penyelenggaraan Pariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifan lokal di destinasi pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2009. Jika prinsip ini diabaikan, maka penduduk lokal akan melihat wisatawan sebagai "pengganggu" yang harus diusir dari destinasi pariwisata.
2. Penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk membantu perwujudan motivasi berwisata. Wisatawan tidak boleh dilihat sebagai "mangsa" yang akan dikuras habis sumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaan wisatawan tidak dibangun melalui hubungan "jual beli" tetapi melalui perasaan "diterima" di destinasi pariwisata. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak sebagai konsumen, seperti: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya. Sementara itu, Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 menetapkan hak-hak sebagai seorang wisatawan, yaitu memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Disamping itu, Pasal 21 memberikan hak kepada wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk memperoleh fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
3. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) harus sepenuhnya dilindungi dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena kehadiran perusahaan besar dan/atau multinasional. Namun demikian, istilah "dilindungi" tidak boleh diartikan sebagai upaya menghindarkan UMKM dari persaingan, melainkan meningkatkan kapasitasnya sehingga suatu saat mampu bersaing dengan perusahaan besar dan/atau multinasional sekalipun. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Disamping itu, Pasal 16 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi UMKM dalam bidang

produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi.

Sementara itu, Pasal 17 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pencadangan UMKM dan memfasilitasi mitra dengan usaha skala besar.

4. Pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata dan penataannya. Penataan destinasi pariwisata yang tidak memperhatikan aspek artistik dapat mengurangi kualitas daya tarik destinasi dimaksud. Hal ini merupakan salah satu keunggulan destinasi pariwisata di negara maju dibandingkan dengan yang ada di negara sedang berkembang. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa tantangan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan kesejahteraan dengan perlindungan warisan budaya.
5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal seperti tingkat kejernihan air laut dan kebersihannya, nilai-nilai budaya yang luhur, jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam suatu waktu tertentu, dan sebagainya.
6. Perlindungan keamanan, stabilitas politik dan penyedia skema fasilitas pendanaan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
7. Jaminan mengenai kelangsungan usaha, tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor penerbangan. Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup sektor pariwisata sangat bergantung kepada sektor-sektor usaha lainnya. Disamping itu, jika suatu Negara memiliki maskapai penerbangan yang mampu bersaing di tingkat internasional, maka secara otomatis maskapai yang bersangkutan akan mempromosikan destinasi pariwisata di negaranya.
8. Persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil-hasil karya/kerajinan yang menjadi sektor pendukung kepariwisataan, termasuk yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Khusus berkaitan dengan PT dan EBT, persoalan dapat muncul ketika tidak adanya perlindungan hukum terhadap kedua jenis warisan budaya tersebut, yang kemudian dapat menyebabkan penduduk lokal tidak bersedia menunjukkan hasil-hasil karya mereka karena khawatir akan ditiru/dibajak.

10. Standarisasi diberbagai bidang. Standarisasi menjadisangat penting apalagi dalam kaitannya dengan pariwisata internasional, karena berfungsi sebagai “jembatan” antar persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata dan barang dan jasa yang dikonsumsi, dengan destinasi pariwisata sebagai produsennya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasi tidak dapat dilakukan dalam segala hal, karena pariwisata mengandung hal-hal yang bersifat unik (tidak ada di tempat lain). Untuk hal-hal demikian, standarisasi hanya dapat dilakukan terhadap aspek-aspek umum yang relevan, misalnya berkaitan dengan standar kesehatan atau keselamatan.
11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutan hukum.

## **B. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Dalam upaya mendukung pariwisata syariah, pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat membuat Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Maksud pengaturan wisata halal dalam Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata. Dengan pengaturan pariwisata halal sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan wisata halal kepada wisatawan. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah:

- a. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Wisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;
- b. untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata sesuai dengan konsep usaha pariwisata halal yang merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah perlu diatur suatu kebijakan pengelolaannya;

Dalam kebijakan tersebut dipahami bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dimana daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Satu hal penting dalam kebijakan tersebut, bahwa ditetapkan apa yang dimaksud dengan wisata halal, yaitu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.

Akomodasi termasuk segala bentuk penginapan/hotel atau losmen, dimana digolongkan antara Hotel Syariah Hilal-1 (penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim), dan Hotel Syariah Hilal-2 (penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim).

Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Sedangkan sertifikat halal sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI (DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah) pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

Para pelaku wisata halal harus menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal. Demikian juga dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

#### a) Ruang Lingkup Wisata Halal

Ruang lingkup pengaturan Wisata Halal dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

##### 1. Destinasi

Destinasi wisata halal, meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Dalam destinasi wisata halal meliputi kegiatan usaha: akomodasi, penyedia makanan dan minuman, spa, sauna dan griya pijat; dan d. biro perjalanan wisata. Dalam destinasi wisata halal disediakan :

- a) fasilitas ibadah yang layak dan suci;
- b) makanan dan minuman halal;
- c) pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan
- d) dengan kriteria umum pariwisata syariah; dan
- e) kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap destinasi wajib menyediakan fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan informasi tentang lokasi Masjid terdekat.

Fasilitas penunjang yang dimaksud meliputi:

- a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);
- b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- d. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- e. penyediaan fasilitas yang menunjang dapat dilakukan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.

Dalam wisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah. Standar syariah sebagaimana dimaksud setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI. Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

- a. produk;
- b. pelayanan; dan c. pengelolaan.

Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:

- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
- b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
- c. tersedia makanan dan minuman halal;
- d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis;
- e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

#### Penyedia Makanan dan Minuman

Penyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran, kafe dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman pada wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari MUI. Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Makanan dan minuman halal tersebut sesuai standar yang ditetapkan oleh MUI.

#### Spa, Sauna dan Griya Pijat

Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. ruangan bagi pasangan (*couple room/suite room*) khusus digunakan bagi suami istri;
- c. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi;
- d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan

e. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat wajib menggunakan produk berlogo halal resmi. Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. bahan rempah;
- b. lulur;
- c. masker;
- d. aroma terapi; dan
- e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku;

#### Biro Perjalanan Wisata

Setiap Biro Perjalanan Wisata halal wajib:

- a. memahami destinasi wisata halal;
- b. menyediakan informasi paket wisata halal dan destinasi Islami; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal.

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami;
- d. memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata
- e. Selain memenuhi syarat pramuwisata harus memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai wisata halal.

Ada upaya pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan/reward. Dimana setiap pelaku wisata halal dapat diberikan insentif berupa:

- a. penghargaan; dan/atau
- b. kemudahan dalam promosi;

#### Peranserta masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata halal. Masyarakat dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas penunjang;
- b. mengawasi pelaksanaan wisata halal; dan
- c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.

#### Pembinaan dan pengawasan.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan wisata halal. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:



- a. sosialisasi;
- b. advokasi; dan
- c. bimbingan.

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

### **C. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Aceh**

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aceh juga memiliki kekayaan potensi alam, budaya, sejarah, dan kekhususan yang dimiliki Aceh merupakan anugerah Allah yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan wilayah Aceh, Dimana penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya.

Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Aceh. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yang terkait yang terdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Industri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan keutuhan bangsa. Oleh karena itu,

pembangunan objek dan daya tarik wisata tetap harus dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Aceh, senantiasa memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat Aceh yang Islami, sehingga unsur-unsur syariat Islam yang berlaku tetap di hormati. Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:

- a. iman dan Islam;
- b. kenyamanan;
- c. keadilan;
- d. kerakyatan;
- e. kebersamaan;
- f. kelestarian;
- g. keterbukaan; dan
- h. adat, budaya dan kearifan lokal.

Pengembangan Usaha Pariwisata Aceh ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh. Untuk mencapai tujuan pengembangan usaha Pariwisata Aceh, Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Jasa Pariwisata

Usaha Jasa Pariwisata meliputi:

- a. jasa wisata syariat;
- b. jasa biro perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- f. jasa konsultan pariwisata;
- g. jasa informasi pariwisata;
- h. jasa makanan dan minuman;

- i. jasa penyediaan akomodasi;
- j. jasa spa; dan
- k. jasa wisata kesehatan.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai Islam;
- b. adat-istiadat, serta kearifan lokal;
- c. kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- e. kelangsungan usaha pariwisata. Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.

Partisipasi masyarakat berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh. Masyarakat turut mengawasi yang dilarang di tempat-tempat wisata, misalnya:

- a. meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. melakukan perbuatan asusila;
- c. berjudi/maisir; dan/atau merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.
- d. bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata;
- e. bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- f. pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- g. bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- h. bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi;
- i. setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

#### **D. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Lampung**

Berdasarkan beberapa kebijakan wisata syariah di atas, maka untuk kebijakan di Propinsi Lampung diperlukan beberapa pertimbangan:

Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang berusaha bukan hanya dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tetapi juga peluang dalam bidang kerajinan kecil seperti handicrafts. Namun akhir-akhir ini terjadi paradigma baru dalam bidang

kepariwisataan yang kita agung-agungkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja di semua lini ternyata terbukti dapat menyebabkan malapetaka terhadap kehidupan sosial, budaya dan lingkungan.

Kesejahteraan yang kita nikmati secara ekonomi ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kehidupan sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Masalah-masalah sosial banyak kita temui di masyarakat setelah kita mengembangkan kepariwisataan. Demikian juga mengenai masalah budaya dan lingkungan. Tragedi budaya dan lingkungan sering dilihat melalui berita-berita di Koran-koran dan televisi lokal. Pembangunan sektor pariwisata diberbagai belahan dunia ini telah berdampak pada berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosial ekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi tersebut bukan hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif.

Perlu juga mendapat perhatian bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata di samping dampak positif bagi masyarakat sekitar objek juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya pengembangan objek wisata perlu diperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan demi kelestarian objek wisata tersebut maupun kelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi dalam pengembangan pariwisata, dimana disamping pengembangan pariwisata itu sendiri menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar objek wisata, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata itu sangat mempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang utama yang perlu mendapatkan jawaban tuntas adalah bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti berorientasi pada upaya pelestarian objek wisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar.

Pengembangan pariwisata harus mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Pasal 12:

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
- b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
- c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh (fragile), dan tak terpisahkan (Inseparability). Bersifat rapuh karena lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan yang jika dirusak belum tentu akan tumbuh atau kembali seperti sediakala. Bersifat tidak terpisahkan karena manusia harus mendatangi lingkungan alam untuk dapat menikmatinya. Lingkungan fisik adalah daya tarik utama kegiatan wisata. Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam (flora dan fauna, bentangan alam, dan gejala alam) dan lingkungan buatan (situs kebudayaan, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, dan peninggalan sejarah).

Secara teori, hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harus mutual dan bermanfaat. Wisatawan menikmati keindahan alam dan pendapatan yang dibayarkan wisatawan digunakan untuk melindungi dan memelihara alam guna keberlangsungan pariwisata. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya simbiosis yang mendukung dan menguntungkan sehingga upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan, tetapi kenyataan yang ada hubungan keduanya justru memunculkan konflik. Pariwisata lebih sering mengeksploitasi lingkungan alam.

Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik merupakan dampak yang mudah diidentifikasi karena nyata. Pariwisata memberikan keuntungan dan kerugian, sebagai berikut :

#### 1. Air

Air mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair (detergen pencucian linen hotel) dan limbah padat (sisa makanan tamu). Limbah-limbah itu mencemari laut, danau dan sungai. Air juga mendapatkan polusi dari buangan bahan bakar minyak alat transportasi air seperti dari kapal pesiar. Akibat dari pembuangan limbah, maka lingkungan terkontaminasi, kesehatan masyarakat terganggu, perubahan dan kerusakan vegetasi air, nilai estetika perairan berkurang (seperti warna laut berubah dari warnabiru menjadi warna hitam) dan badan air beracun sehingga makanan laut (seafood) menjadi berbahaya. Wisatawan menjadi tidak dapat mandi dan berenang karena air di laut, danau dan sungai tercemar. Masyarakat

dan wisatawan saling menjaga kebersihan perairan. Untuk mengurangi polusi air, alat transportasi air yang digunakan, yakni angkutan yang ramah lingkungan, seperti : perahu dayung, kayak, dan kano.

## 2. Atmosfir

Perjalanan menggunakan alat transportasi udara sangat nyaman dan cepat. Namun, angkutan udara berpotensi merusak atmosfer bumi. Hasil buangan emisinya dilepas di udara yang menyebabkan atmosfer tercemar dan gemuruh mesin pesawat menyebabkan polusi suara. Selain itu, udara tercemar kibat emisi kendaraan darat (mobil, bus) dan bunyi deru mesin kendaraan menyebabkan kebisingan. Akibat polusi udara dan polusi suara, maka nilai wisata berkurang, pengalaman menjadi tidak menyenangkan dan memberikan dampak negatif bagi vegetasi dan hewan. Inovasi kendaraan ramah lingkungan dan angkutan udara berpenumpang massal (seperti pesawat Airbus 380 dengan kapasitas 500 penumpang) dilakukan guna menekan polusi udara dan suara. Anjuran untuk mengurangi kendaraan bermotor juga dilakukan dan kampanye berwisata sepeda ditingkatkan.

## 3. Pantai dan pulau

Pantai dan pulau menjadi pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Namun, pantai dan pulau sering menjadi tempat yang mendapatkan dampak negatif dari pariwisata. Pembangunan fasilitas wisata di pantai dan pulau, pendirian prasarana (jalan, listrik, air), pembangunan infrastruktur (bandara, pelabuhan) mempengaruhi kapasitas pantai dan pulau. Lingkungan tepian pantai rusak (contoh pembabatan hutan bakau untuk pendirian akomodasi tepi pantai), kerusakan karang laut, hilangnya peruntukan lahan pantai tradisional dan erosi pantai menjadi beberapa akibat pembangunan pariwisata. Konservasi dan konservasi pantai dan laut menjadi pilihan untuk memperpanjang usia pantai dan laut. Pencanangan taman laut dan kawasan konservasi menjadi pilihan. Wisatawan juga ditawarkan kegiatan ekowisata yang bersifat ramah lingkungan. Beberapa pengelola pulau (contoh pengelola Taman Nasional Kepulauan Seribu) menawarkan paket perjalanan yang ramah lingkungan yang menawarkan aktivitas menanam lamun dan menanam bakau di laut.

## 4. Pegunungan dan area liar

Wisatawan asal daerah bermusim panas memilih berwisata ke pegunungan untuk berganti suasana. Aktivitas di pegunungan berpotensi merusak gunung dan area liarnya. Pembukaan jalur pendakian, pendirian hotel di kaki bukit, pembangunan gondola (cable car), dan pembangunan fasilitas lainnya merupakan beberapa contoh pembangunan yang berpotensi merusak gunung dan area liar. Akibatnya terjadi tanah longsor, erosi tanah, menipisnya vegetasi pegunungan (yang bisa menjadi paru-paru masyarakat), potensi polusi visual dan banjir yang berlebihan karena gunung tidak mampu menyerap air hujan. Reboisasi (penanaman kembali

pepohonan di pegunungan) dan peremajaan pegunungan dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan pegunungan dan area liar.

#### 5. Vegetasi

Pembalakan liar, pembabatan pepohonan, bahaya kebakaran hutan (akibat api unggun di perkemahan), koleksi bunga, tumbuhan dan jamur untuk kebutuhan wisatawan merupakan beberapa kegiatan yang merusak vegetasi. Akibatnya, terjadi degradasi hutan (berpotensi erosi lahan), perubahan struktur tanaman (misalnya pohon yang seharusnya berbuah setiap tiga bulan berubah menjadi setiap enam bulan, bahkan menjadi tidak berbuah), hilangnya spesies tanaman langka dan kerusakan habitat tumbuhan. Ekosistem vegetasi menjadi terganggu dan tidak seimbang.

#### 6. Kehidupan satwa liar

Kehidupan satwa liar menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Wisatawan terpesona dengan pola hidup hewan. Namun, kegiatan wisata mengganggu kehidupan satwa-satwa tersebut. Komposisi fauna berubah akibat: pemburuan hewan sebagai cinderamata, pelecehan satwa liar untuk fotografi, eksploitasi hewan untuk pertunjukan, gangguan reproduksi hewan (berkembang biak), perubahan insting hewan (contoh hewan komodo yang dahulunya hewan ganas menjadi hewan jinak yang dilindungi), migrasi hewan (ketempat yang lebih baik). Jumlah hewan liar berkurang, akibatnya ketika wisatawan mengunjungi daerah wisata, ia tidak lagi mudah menemukan satwa-satwa tersebut.

#### 7. Situs sejarah, budaya, dan keagamaan

Penggunaan yang berlebihan untuk kunjungan wisata menyebabkan situs sejarah, budaya dan keagamaan mudah rusak. Kepadatan di daerah wisata, alterasi fungsi awal situs, komersialisasi daerah wisata menjadi beberapa contoh dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan fisik. Situs keagamaan didatangi oleh banyak wisatawan sehingga mengganggu fungsi utama sebagai tempat ibadah yang suci. Situs budaya digunakan secara komersial sehingga dieksploitasi secara berlebihan (contoh Candi menampung jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas). Kapasitas daya tampung situs sejarah, budaya dan keagamaan dapat diperkirakan dan dikendalikan melalui manajemen pengunjung sebagai upaya mengurangi kerusakan pada situs sejarah, budaya dan keagamaan. Upaya konservasi dan preservasi serta renovasi dapat dilakukan untuk memperpanjang usia situs-situs tersebut.

#### 8. Wilayah perkotaan dan pedesaan

Pendirian hotel, restoran, fasilitas wisata, toko cinderamata dan bangunan lain dibutuhkan di daerah tujuan wisata. Seiring dengan pembangunan itu, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas jadi meningkat. Hal ini bukan hanya menyebabkan tekanan terhadap lahan, melainkan juga perubahan fungsi lahan tempat tinggal menjadi lahan

komersil, kemacetan lalu lintas, polusi udara dan polusi estetika (terutama ketika bangunan didirikan tanpa aturan penataan yang benar). Dampak buruk itu dapat diatasi dengan melakukan manajemen pengunjung dan penataan wilayah kota atau desa serta membedakan masyarakat untuk mengambil andil yang besar dalam pembangunan.

Lombok, Banda Aceh dan Lampung merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan, misalnya kepariwisataan, pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alami.

Oleh karena itu dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, perlu ada kebijakan strategis yang berhubungan dengan pariwisata. Dimana kebijakan strategis tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.
2. Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun



sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdiri atas:

1. Pengaturan tentang ketentuan umum yang memuat batasan istilah dari materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Pengaturan tentang Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata
3. Pengaturan tentang kewenangan pemerintah daerah.
4. Pengaturan tentang Pembangunan Kepariwisata dan Kawasan Strategis.
5. Membahas tentang Usaha Pariwisata.
  - a. Bagian Kesatu membahas tentang Penggolongan Usaha Pariwisata.
  - b. Bagian Kedua membahas tentang Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari:
  - c. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
  - d. Pengusahaan Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari: Pengusahaan Daya Tarik Wisata Alam. dan Pengusahaan Daya Tarik Wisata Budaya.
- d. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari: Usaha Penyediaan Akomodasi. Dan : Usaha Penyediaan Makan Minum, : Usaha Penyediaan Angkutan Wisata.  
Usaha Sarana Wisata Tirta, Usaha Kawasan Pariwisata, dan Usaha SPA  
Pengaturan tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang terdiri dari 2 (Dua) Bagian
6. Membahas tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, yang terdiri dari 3 (Tiga) Bagian yaitu: : Hak, Bagian Kedua, Kewajiban. Larangan.
7. Membahas tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (Tiga) Bagian yaitu:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.
  - b. Standarisasi dan Sertifikasi.
  - c. Tenaga Kerja
8. membahas tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah.  
Membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat.  
Membahas tentang Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari yaitu:
9. Pendanaan.
10. Membahas tentang Pengawasan dan Pengendalian
11. Pengaturan tentang Ketentuan Pidana.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Industri pariwisata bukan suatu industri yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Komponen-komponen kepariwisataan yang berperan dalam penyelenggaraan sistem industri pariwisata secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu, pemerintah, jasa-jasa kepariwisataan dan masyarakat di sekitar obyek dan atraksi wisata. Kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata. Pemerintah daerah beserta instansi-instansinya, industri jasa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk duduk bareng bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengemas paket-paket wisata.

Tindakan itu patut dilakukan karena aktivitas pariwisata tidak dapat dilakukan hanya pada satu area saja dan tersekat-sekat. Aktivitas pariwisata memerlukan ruang gerak dan waktu yang fleksibel. Adanya kerjasama dan komitmen akan terbentuk kemitraan yang saling mengisi, maka aktivitas berwisata yang memiliki mobilitas tanpa batas itu tidak akan mengalami kendala karena jalur-jalurnya yang menghubungkan antar atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya sudah tertata, terhubung dengan baik dan dari segi keamanan dapat dikoordinasikan bersama. Kegiatan promosi dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan swasta. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata harus dipandang sebagai suatu sistem. Dalam sistem tersebut tercakup berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi meliputi: pasar, perjalanan, destinasi dan pemasaran. Oleh karena itu perlu adanya sinergi kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata yang multi-sektor multi disiplin itu akan berhasil apabila dalam penyelenggaraannya didasarkan oleh berbagai perangkat kebijakan yang terpadu baik yang terkait langsung maupun tidak.

## B. Saran

Dengan pemberlakuan otonomi daerah seharusnya para investor atau pengusaha pariwisata lebih dijamin oleh pemerintah daerah terutama untuk kesederhanaan prosedur dan keringanan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi pemerintah daerah harus transparan dalam pembiayaan urusan investasi dan kesederhanaan prosedur dalam

pengurusan ijin. Pemerintah daerah harus proaktif dalam penanganan masalah-masalah investasi agar iklim investasinya aman dan nyaman. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan

perijinan investasi khususnya dalam bidang pariwisata agar para pengusaha dan investor tidak diperberat dan dipungut biaya berlebihan dalam kegiatan investasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Aceh, BPS. 2017. Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Banda Aceh . Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Ariqa Nurwilda Sugiarti, 2015. Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung (Tesis UPI Bandung)
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta
- Al-Hamarneh, A. (2011). Islamic tourism: A long term strategy of tourist industries in the Arab world after 9/11. Centre for Research on the Arab World. Retrieved from <http://www.staff.unimainz.de>.
- Aminul Islam, Md & Kärkkäinen, L. (2013). Islamic tourism as a prosperous phenomenon in Lapland. Thesis. Rovaniemi University of Applied Sciences.
- Asdhiana, I.M. (2013). Indonesia Berpotensi Kembangkan Wisata Syariah. Retrieved from <http://travel.kompas.com/read/2013/10/31/0852207/>. October 13, 2013.
- BPS Prov Aceh. 2017. *Provinsi Aceh Dalam Angka 2017*. Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Banda Aceh Tourism*. Edisi 1. 2017
- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII,
- Bagir Manan dalam Supardan Mudoeng, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang- undangan Tingkat Daerah*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001)
- Barber, R. 1993. *Pilgrimages*. London: The Boydell Press.
- Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung, 2013
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2014). Islamization Trends-Implication for Tourism Market. *Islamic Tourism Journal*, 73-82.
- Buhalis, D. 2000. *Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism*
- Chanin, O. 2015. *Guide Lines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand*. *Journal of Economics and Management* Vol 3, No 8
- Chookaew, S. 2015. *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*. *Journal of Economics, Business and Management*
- Chadwick, R. A. 1994. *Concepts, definitions, and measures used in travel and tourism research*. In *Travel, tourism, and hospitality research: A handbook for managers and researchers*, J. R. B. Ritchie and C. R. Goeldner, eds., 66. New York: John Wiley.
- Din, K. 1989. *Islam and Tourism: Patterns, issues, and options*. *Annals of Tourism*

- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009
- Ghadami, M. 2012. *The Role of Islam in the Tourism Industry. Elixir Management Arts*. Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
- Kamarudin, L. M. 2013. *Islamic Tourism: The Impacts to Malaysia's Tourism Industry. Proceedings of International Conference on Tourism Development*, Kemenpar. (2015).
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1998. *Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Wisata Ekologi Alam* (draft IV).
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002. *Pengelolaan Lingkungan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Agenda 21 Tourism*
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
- Nasional (Bappenas), 2002. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dengan Strategi Kemitraan. Naskah Kebijakan*.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002. *Kajian Pengembangan Ekowisata di Indonesia*
- Kovjanic, G. 2014. *Islamic Tourism as a Factor of the Middle East Regional Development*. Turizam Vol 18
- Michael Howlett dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press, Toronto
- Priyadi, U. e. 2015. *Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Syariah Islam*. UII
- Pendit, Nyoman, S. 2000. *Pariwisata, Sebuah Studi, Analisa dan Informasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Ilmu Pariwisata; Sebuah Pengantar Perdana*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soekadijo, R.G. 1997. *Anatomi Pariwisata "Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Solly Lubis M, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung, 2001.
- Yeni Yuniawati, 2013. *Pariwisata dalam Bingkai Syariah*. (Tesis UPI Bandung)
- Yoeti, Oka A, Drs. BA. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradya Paramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pemasaran Pariwisata*. Angkasa. Bandung.

## B. Jurnal

- Bon, Maedeh, & Mazhar Hussein. *Halal Food And Tourism Prospects and Challenges*. Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice, V 2, 47-59. 2010
- Ela, Pratiwi Ade. *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Management, 21(1), 97-152. DOI:[http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00095-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3). Research, 16(4), 542-563. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90008-X](http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(89)90008-X).
- Ermayanti. *Antropologi Pariwisata*. Jurnal Antropologi V/7. 2007
- Gilang, Kurniawan Widaggyo. *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 73-80. 2015
- Hartman, Katherine B, & Tracy Meyer, Lisa L. Scribner. *Culture cushion: inherently positive inter-cultural tourist experiences*. International Journal Of Culture, Tourism And Hospitality Research Vol. 3 No. 3 pp. 259-268. 2009
- Henderson, Joan C. Islam and Tourism Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice, V 2, 75-89. 2010
- Jaelani, A. 2016. *Islamic tourism development in Cirebon: The study heritage tourism in Islamic economic perspective*. Journal of Economics Bibliography, 3(2), 215-235. Available at MPRA Paper No. 74833: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74833/>.
- Jaelani, A. 2016. Cirebon as the silk road: A new approach of heritage tourism and creative economy. Journal of Economics and Political Economy, 3(2), 264-283. Available at MPRA Paper No. 75189: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75189/>.
- Jaelani, A., Setyawan, E., & Hasyim, N. 2016. Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary. Journal of Social and Administrative Sciences, 3(1), 63-76. Available at MPRA Paper No. 75181: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75181/>.
- Jafari, J., & Scott, N. 2014. Muslim world and its tourisms. Annals of Tourism Research, 44, 1-19.
- Khan, Faiza. The "Halalification" of Tourism. Jurnal of Islamic Marketing Vol. 8 No 4. 2017
- Meng, Fang, & Yingjiao Xu. Tourism shopping behavior: planned, impulsive, or experiential?. International Journal Of Culture, Tourism And Hospitality Research Vol. 6 No. 3 pp. 250-265. 2012
- Marini, Yushita. Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Jurnal Humaniora, 1(2), 61-70. 2017
- Oktaviyanti, Sri Safitri. Dampak Sosial Budaya Interaksi Wisatawan dengan Masyarakat Lokal di Kawasan Sosrowijayan. Jurnal Nasional Pariwisata, Vol. 5. No3. 2013
- Prabowo, Sulisty. Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. Journal of Islamic Marketing Vol. 6 No. 2. 2015

- Saad Sanad, Hasan, & Ayman Mounier Kassem, Noel Scott. Tourism and Islamic Law. *Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice*, V 2, 17-30. 2010
- Suwiryanta, Ardi. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap sosial budaya dan ekonomi. *Media wisata* Vol. 2. 2003
- Tajzadeh, N.A. 2013. *Value creation in tourism: An Islamic approach*. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 4(5). 1252-1264.
- Wingett, Fiona & Sarah Turnbull, Halal holidays: exploring expectations of Muslim friendly holidays. *Journal of Islamic Marketing* Vol. 8 No. 4 pp. 642-655. 2017

### C. Sumber lain

- BPS. 2010. Retrieved Nopember 2017, from Biro Pusat Statistik: <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>
- Brojonegoro, B. (2016). Kepala Bappenas Bambang: Daerah harus kompak bantu pariwisata. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2672032/kepala-bappenas-bambang-daerah-harus-kompak-bantu-pariwisata>.
- Dini Andriani, et al. 2015. *Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- Diyanet Isleri Baskanligi. 2011. *Helal (The Halal)*. Retrieved from <http://www.diyamet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=1884>.
- Duman, Teoman. 2011. *Value of Islamic tourism offering: Perspectives from the Turkish experience*. In *World Islamic Tourism Forum* (WITF 2011), July 12-13, 2011. Malaysia: GITO & IAIS.
- Franklin, A. 2003. *Tourism: A new introduction*. London: Sage Publications.
- Galzacorta, M.A. & Omil, B.G. 2016. *Pilgrimage As Tourism Experience: The Case Of The Ignatian Way*. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 4(4), 52.
- Graburn, N. 1998. *A quest for identity*. *Museum International*, 50(3), 13–18.
- Graburn, N. 2001. *Secular Ritual: A General theory of tourism*. In V.L. Smith (Eds.), *Hosts and guests revisited*. *Tourism Issues in the 21st Century*. New York: Cognizant Communication Corp.
- Graburn, N. H. H. (1983). The antropology of tourism. *Annals of Tourism Research*, 10(1), 9–33.
- Gulen, F. (2011). Halal lokma ve iffetli nesiller (Halal bite and virtuous generations). Retrieved from: [http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article\\_id=4597](http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article_id=4597).
- Hamzah, M. & Yudiana, Yi. 2015. *Analisis komparatif potensi industri halal dalam wisata syariah dengan konvensional*. Retrieved from <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html>.



- Hassan, A.R. 2004. *Islamic tourism: The concept and the reality*. *Islamic Tourism*, 14(2), 35-45.
- Hassan, A.R. (2007). Islamic tourism revisited. *Islamic Tourism*, 32(2).
- Henderson, J.C. (2010). Sharia-compliant hotel. *Tourism and Hospitality Research* 10(3), 246-254. DOI: <http://dx.doi.org/10.1057/thr.2010.3>.
- Ibo, A. (eds.). (2016). Ini 10 daerah dengan indeks pariwisata tertinggi di Indonesia. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2671822/ini-10-daerah-dengan-indeks-pariwisata-tertinggi-di-indonesia>. December 7, 2016
- Ibo, A. (eds.). 2016. Ini 5 Destinasi dengan Indeks Daya Saing Wisata Tertinggi. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2673886/ini-5-destinasi-dengan-indeks-daya-saing-wisata-tertinggi>. December 9, 2016.
- Ijaj, A. 2011. Halal concept & brands. Retrieved from <http://halal-brands.blogspot.fi/>.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Promosi, Bidang pemasaran dan Sumber Daya Pariwisata. *Majalah Pariwisata*
- Kementerian Pariwisata. 2012. Kemenparekraf promosikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata syariah dunia. Retrieved from <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>.
- Medic dan Middleton. 1973. *Product formulation in tourism*. *Tourism and Marketing*, 13:173-201.
- Media Wisata, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016
- Mill, R. C., & Morrison, A. M. 1998. *The tourism system*. Iowa: Kendall. Nash, D. 1996. *Anthropology of tourism*. Oxford: Pergamon.
- Park, D.B. & Yoon, Y.S. 2009. *Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study*. *Tourism Management*, 30(1), 99–108. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2008.03.011>
- Rinschede, G. 1992. *Forms of religious tourism*. *Annals of Tourism Research*, 19,51-67.
- Sahih al-Bukhari, USC-MSA web (English) reference.
- Samori, Z., Md Salleh, N.Z. & Khalid, M.M. 2016. *Current Trends in Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries*. *Tourism Management Perspectives*, 19: 131–136. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.
- Shackley, M. 2001. *Managing sacred sites*. London: Continuum.
- Shakiry, A.S. 2008. *Tourism halal imposing themselves little by little*. Retrieved from [http://www.islamictourism.com/news\\_A.php/3838](http://www.islamictourism.com/news_A.php/3838).
- Sigaux, J. 1996. *History of tourism*. London: Leisure Arts.
- Smith, V. 1989. *Hosts and guests: The anthropology of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Smith, V. 1992. *The quest in guest*. *Annals of Tourism Research*, 19, 1-17.
- Sofyan, R. 2012. *Prospek bisnis pariwisata syariah*. Jakarta: Republika
- The Minister of Tourism. 2014. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Jakarta: Kemenpar.

- The Minister of Tourism. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Kemenpar.
- Timothy, D.J., & Olsen, H. 2006. *Tourism, religion and spiritual journeys*. Oxford: Routledge.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Vukonic, B.1996. *Tourism and religion*. Oxford: Pergamon.
- Wuryasti, F. 2013. *Wisata halal, konsep baru kegiatan wisata di Indonesia*. Retrieved from <http://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/1382/>.
- Yahya, Arief. (2016). Alasan Indonesia Layak Jadi Kiblat Pariwisata Halal Dunia. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2684766/alasan-indonesia-layak-jadi-kiblat-pariwisata-halal-dunia>. December 13, 2016.
- Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. 2009. *Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: The cases of Iran and Saudi Arabia*. International Journal of Tourism Research, 12(1). <http://muhamadazhari.com/seputar-bisnis/potensi-wisata-syariah-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 desember 2017
- <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2015/12/08/352957/pengembangan-wisata-syariah-perlu-kreativitas/>, diakses pada tanggal 22 desember 2017
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7834/4.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 04 januari 2018
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/87872/potongan/S2-2015-350656-introduction.pdf>, diakses pada tanggal 04 januari 2018
- <http://purnamaalam71.blogspot.co.id/2011/07/dampak-pariwisata-terhadap-perubahan.html>, diakses pada tanggal 06 januari 2018
- <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah.pdf>, diakses pada tanggal 09 januari 2018
- <http://acehgreatwalltour.blogspot.co.id/> , diakses pada 23 februari 2018
- <https://bandaacehkota.bps.go.id/> , diakses pada tanggal 27 februari 2018
- <http://dispar.bandaacehkota.go.id/> , diakses pada tanggal 27 februari 2018
- <http://disbudpar.acehprov.go.id/> , diakses pada tanggal 27 februari 2018
- <https://bandaacehkota.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab5> ,diakses pada tanggal 03 maret 2018
- <http://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html> , diakses pada tanggal 03 maret 2018
- <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/41/daftar-produk-bersertifikasi-halal>, diakses pada tanggal 03 maret 2018
- <https://m.liputan6.com/labi-labi-transportasi-unik> , diakses pada tanggal 27 maret 2018
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yimmykurniawan.wordpress.com/2011/10/19/teknik-analisis-swot/amp> , diakses pada tanggal 10 april 2018

[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.academia.edu/16896593/Antropologi\\_Pariwisata&ved=](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.academia.edu/16896593/Antropologi_Pariwisata&ved=) , diakses pada tanggal 11 april 2018

<https://www.google.co.id//muslimafiyah.com/gembira-membuat-orang-lain-gembira.html> , diakses pada tanggal 28 april 2018

[https://www.google.co.id/url/Direktori/FPIPS/Lainnya/Liga\\_Suryadana](https://www.google.co.id/url/Direktori/FPIPS/Lainnya/Liga_Suryadana) , diakses pada tanggal 02 mei 2018

<https://www.google.co.id/abuarafah.wordpress.com> , diakses pada tanggal 02 m3i2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-pesawaran\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-pesawaran_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungutara\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungutara_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungtimur\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungtimur_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungbarat\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungbarat_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungselatan\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-lampungselatan_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-tanggamus\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-tanggamus_31.html), diakses tanggal 13 November 2018

Blogspot.com2010.[http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-waykanan\\_31.html](http://objekwisatalampung.blogspot.com/2010/08/objek-objek-wisata-kabupaten-waykanan_31.html), diakses tanggal 13 November 2018